



Namiartha "Ditelanjangi" di Sidang

Dianggap Lalai Menjalankan Tugas Sebagai Perbekel

DENPASAR, Radar Bali - Anggota DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Namiartha akhirnya merasakan kursi panas Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (11/3). Politisi PDIP itu "ditelanjangi" oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Denpasar dalam kasus korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBDes Dauh Puri Klod, Denpasar Barat.

Di sidang kemarin juga terungkap bobroknya pengelolaan keuangan Desa Dauh Puri Klod sejak 2010. Mulai dana yang ditarik tidak sesuai kebutuhan, dana yang ditarik tidak terealisasi kegiatan, hingga dana pendapatan desa dipinjam untuk kepentingan pribadi para aparatur desa.

Namiartha sendiri tampak tegang sejak awal sidang dimulai. Saat menjawab pertanyaan JPU I Nengah Astawa dkk, mantan perbekel itu beberapa kali gelagapan hingga harus mengulang omongannya karena tidak jelas. Suaranya juga gemetar seperti orang ketakutan ketika memberikan penjelasan.

Namiartha juga kerap dibentak hakim anggota Hartono lantaran sebagai kepala desa dianggap lalai dalam menjalankan pengawasan, sehingga terjadi penyelewengan dana hingga ratusan juta. "Saya sendiri bingung setelah ada audit dari BPMPD dan Inspektorat. Kenapa kok bisa ada selisih silpa? Saya bingung," ujar Namiartha saat ditanya JPU dari mana tahu ada selisih dana silpa.

"Saya juga tidak tahu uang pungutan yang diterima bendahara bisa dipinjam dan digunakan untuk insentif," imbuh Namiartha.

Keterangan itu membuat hakim Hartono meradang. "Perbekel kok tidak tahu. Sebagai kepala desa, Anda harus tahu!" bentak hakim Hartono. Sontak, Namiartha langsung kelimpungan.

Saat dicecar tugasnya sebagai perbekel bertanggung jawab atas penggunaan uang desa, Namiartha beralasan banyak kegiatan yang harus dijalani sehingga dirinya tidak bisa mengecek rekening desa. Ketidaksiwaan antara buku kas umum dengan rekening desa terjadi sejak 2014. Anehnya, Namiartha tetap tanda tangan pencairan dana meski terdakwa Ni Putu Ariyaningsih (mantan bendahara) tidak melampirkan SPJ. Ketika ditanya mengapa begitu, Namiartha langsung kelimpungan. Dia

berkilah tidak menguasai masalah keuangan. Namiartha malah menyudutkan terdakwa dan sekretaris desa yang bertugas memverifikasi pencairan dana.

Saat dikejar jaksa kenapa penarikan dana di bank beberapa kali lebih besar dari RAPBDes, Namiartha menyebut kelebihan dana itu untuk kas tunai pembiayaan operasional kantor. Seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan keperluan mendadak.

Hakim Hartono lantas mengejar alasan Namiartha mau meneken buku kas umum (BKU) yang dibuat terdakwa. BKU dibuat terdakwa tiga sampai enam bulan sekali. Lagi-lagi Namiartha berkilah. Dia mengaku tinggal tanda tangan karena tidak mengetahui masalah pembukuan. Setelah ada audit, Namiartha barulah tidak mau meneken BKU. "Karena hasil audit saya menjadi ragu. Hasil audit menyebut BKU banyak salah," terang Namiartha.

"Anda tidak tanda tangan BKU, tapi Anda meneken laporan pertanggungjawaban keuangan desa (LPJK). Padahal, catatan keuangan antara di BKU dengan LPJK sama persis," sodok hakim Hartono. Tak ayal, Namiartha langsung merah padam. Namun, politikus PDIP itu berkelit. "Saya tandatangan LKPJ karena sebelumnya

sudah dimusyawarahkan," kelitnya.

Sementara itu, JPU Astawa menyoal pengembalian keuangan oleh Namiartha ke kas desa. Setelah ada temuan audit, sejumlah perangkat desa ramai-ramai mengembalikan uang. Lagi-lagi Namiartha berkelit. Katanya, uang yang dikembalikan merupakan uang titipan dari salah satu petugas pungut desa yang sempat kasbon. "Sebagian (pengembalian) saya pinjamkan dari uang desa, sebagian saya talangi uang pribadi karena petugas yang meminjam itu sudah meninggal dunia," tuturnya.

Namiartha mengaku mengetahui terdakwa Ariyaningsih menggunakan uang Rp 700 juta lebih setelah Ariyaningsih mengaku sendiri. Terdakwa juga membuat surat pernyataan. Nah, yang menarik, Namiartha mampu menyebutkan secara tepat jumlah uang yang dikembalikan terdakwa Ariyaningsih ke kas negara sehari sebelum sidang. Yakni Rp 778.176.500. "Dari mana saksi tahu terdakwa mengembalikan uang?" tanya Astawa. Namiartha sempat terkejut ditanya demikian. Ia terdiam sejenak. "Saya tahu dari (berita) koran," jawabnya.

Saat ditanya tudingan terdakwa, bah-

wa perbekel pernah menarik sendiri sebanyak dua kali, Namiartha kembali menyangkal. "Saya tidak pernah menarik sendiri. Selalu berdua dengan bendahara," sergahnya.

Sementara itu, saksi I Putu Gede Sudiarsa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengaku mengetahui ada silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Kami minta kepala desa coba dicek, kenapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan padahal sudah direncanakan. Akhirnya dijawab, sebagian uang silpa tidak ada di rekening desa," jelas pria paruh baya itu.

Akhirnya BPD menyarankan diadakan audit. "Tapi, hasil audit itu tidak pernah dibuka dan dikasih pada kami. Mereka (kepala desa dan perangkatnya) beralasan hasil audit bukan wewenang BPD. Akhirnya kami tidak bisa berbuat banyak," ungkap Sudiarsa. Kendati begitu, masalah ini akhirnya menggeling hingga ke meja hijau. Saksi lain yang datang kemarin adalah Made Wardana (mantan perbekel sebelum Namiartha), IB Joni (mantan camat Denbar), I Made Mertajaya (Kadis Sosial dan mantan Kepala BPMPD), dan Gusti Ayu Sri Saraswini (pegawai BPD Bali). (san/yor)



Suasta Dihukum 18 Bulan Penjara

● Korupsi Dana Turnamen Bupati Cup 2106

DENPASAR, TRIBUN BALI

- I Ketut Suasta (51) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (18/3). Oleh majelis hakim, ia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.

Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Pengurus Cabang PSSI Gianyar dinyatakan bersalah terkait korupsi dana Turnamen Bupati Cup 2016 Gianyar sebesar Rp 152 juta lebih.

Sebelumnya JPU menuntut Suasta dengan pidana penjara selama dua tahun. Selain dituntut pidana badan, tim jaksa dari Kejari Gianyar juga menuntut Suasta denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara.

Menanggapi putusan majelis hakim, Suasta menerima. Di sisi lain tim jaksa Made Eddy Setiawan dan Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti masih pikir-pikir.

Terdakwa dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri



TRIBUN BALI/PUTU CANDRA

SIDANG - I Ketut Suasta menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (18/3).

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Suasta dijerat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31

tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sebagaimana dakwaan subsidair.

"Mengadili menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Suasta dengan pidana penjara satu tahun dan enam bulan, dikurangi selama menjalani tahanan sementara dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan penjara," tegas Hakim Ketua Esthar Oktavi. (can)

Edisi : Kamis, 19 Maret 2020

Hal : 8



Diresmikan Desember 2019, Jebol Januari 2020

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Belum genap setahun diresmikan, Taman Lansia atau Taman Lila Ulangun di kawasan DAM Oongan sudah jebol. Pantauan *Tribun Bali* kemarin, taman yang diresmikan 16 Desember 2019 ini jebol pada senderan sisi timur.

Panjang jebol sekitar tiga meter. Materialnya tergerus dan menyisakan lempengan yang merupakan jalan setapak bagian atas dan di bawahnya sedikit gundukan tanah.

Warga yang duduk di gazebo taman, Wayan Kerta mengatakan, senderan ini sudah lama jebol. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemkot Denpasar yang dalam hal ini Dinas PUPR Kota Denpasar.

Kerta pun menyesalkan jebolnya senderan ini yang tak kunjung diperbaiki dan seakan tak diperhatikan. "Ini sudah lama jebolnya. Harusnya kan segera dilakukan perbaikan," katanya, Senin (9/3).

Sedangkan Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta mengatakan, senderan ini telah jebol Januari 2020. Ini disebabkan kondisi air deras yang membuat senderan tidak kuat menahan derasnya alir-



TRIBUN BALI/I PUTU SUPARTIKA

JEBOL - Kondisi Taman Lansia Tukad Oongan, Senin (9/3). Senderan taman ini jebol sejak bulan Januari 2020.

an. "Pusaran air juga memang berpusat tepat di tempat jebolnya tersebut," katanya.

Jimmy menambahkan, proyek penataan ini masih merupakan tanggung jawab rekanan dengan masa pemeliharaan selama satu tahun. "Saat masih dilakukan pengkajian untuk memperkuat senderan agar tidak kembali tergerus. Setelah dilakukan pengkajian baru akan dilanjutkan dengan membuat case dam," katanya.

Untuk diketahui, penataan taman yang berada di Jalan Noja Saraswati, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara ini dilaksanakan di

atas lahan seluas 1.095 meter persegi. Dana untuk pembangunannya menggunakan Dana APBD Kota Denpasar sebesar Rp 3,6 miliar lebih.

Taman Lansia ini dilengkapi beberapa fasilitas, mulai dari parkir, toilet, ruang edukasi, pusat kuliner, taman, fasilitas vegetasi dan pencahayaan, serta jalur pejalan kaki.

Jimmy mengklaim, karena tempatnya yang jauh dari pusat kota akan membawa ketenangan bagi pengunjung. Penataan yang dimulai sejak 9 Juli 2019 lalu, telah rampung dikerjakan pada 5 Desember 2019 lalu. (sup)



Pelayanan Masyarakat Kemungkinan Dipindah

● Atap Beton Kantor Perbekel Sibang Kaja Badung Jebol

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Atap Kantor Desa Perbekel Sibang Kaja, Kabupaten Badung, Minggu (8/3), terlihat berhamburan. Pasalnya kantor desa tersebut jebol pada bagian atap depannya.

Beberapa masyarakat pun masih bertanya-tanya terkait jebolnya atap bangunan tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab jebol atap itu. Ada yang menduga karena cuaca ekstrim beberapa hari terakhir.

Menurut informasi di lapangan, kantor perbekel yang dibangun tahun 2007 itu diketahui jebol sekitar pukul 03.00 wita. Bangunan yang jebol berbahan gipsun dan plafon semen dengan rangka baja ringan. Bangunan yang jebol persis sebelah pinggir pada bagian depan gedung, dengan panjang sekitar 7 meter.

Mantan Perbekel Sibang Kaja, Ni Nyoman Rai Suda-

ni, didampingi Pj Perbekel Sibang Kaja, Ni Putu Indah Mariani, mengaku baru mengetahui jebolnya atap Kantor Perbekel Sibang Kaja dari warga yang rumahnya berada di depan kantor tersebut.

"Kami belum mengetahui secara pasti. Namun begini kondisinya sekarang," ujarnya sembari menunjukkan jebolnya bagian atap.

Berdasarkan penuturan warganya, kejadian jebolnya bangunan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 wita. Saat itu terjadi hujan lebat di seputaran Abiansemal.

Di saat bersamaan, warganya mendengar ada suara keras. Awalnya suara tersebut dikira karena terjadi kecelakaan (tabrakan) di jalan raya. "Warga kami sempat keluar. Karena dikira kecelakaan jadi dilihat di jalan. Namun saat keluar tidak ada apa-apa, sehingga warga kami balik ke rumah lagi," jelasnya.

Ketika sudah pagi, kata Rai Sudiani, barulah warganya tersebut melihat atap kantor kepala desa jebol. "Untuk saat ini kami belum ada solusi perbaikan menyeluruh karena dana bencana hanya dipasang sebesar Rp 50 juta dari APBDes. Kalau direnovasi secara menyeluruh atap tersebut, pastilah kurang dan perlu dikonsultasikan lagi ke kecamatan dan PUPR Badung," terangnya.

Sementara Camat Abiansemal, Ida Bagus Mas Arimbawa, mengharapkan untuk sementara pegawai desa tetap berkantor di kantor desa. Selanjutnya akan dilakukan survei untuk tempat yang cocok sementara memindahkan pelayanan kepada masyarakat. "Kami sudah laporkan musibah ini ke pimpinan, dalam hal ini Bupati Badung dan dinas-dinas terkait agar bisa diambil tindak lanjut," jelasnya. (gus)

Edisi : Senin 9 Maret 2020

Hal : 6



Tumari Tersangka Keenam Santunan Kematian

● Kaling Asri Ajukan Dokumen Fiktif dan Rangkap

NEGARA, TRIBUN BALI - Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Jembrana akhirnya merampungkan kasus korupsi dana santunan kematian. Terperiksa terakhir, Tumari (43) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tumari menyusul Sridani, mantan Kepala Lingkungan Asri Kelurahan Gilimanuk. Tumari merupakan mantan Kepala Lingkungan Asih Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya.

Data yang dihimpun *Tribun Bali* menunjukkan, Tumari merupakan tersangka keenam dari kasus dana santunan kematian. Selain Tumari, ada tersangka lain yakni Ni Luh Sridani yang sudah ditahan di Rutan Kelas II B Negara dan Komang Budiarta yang sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipidkor Denpasar. Sebelumnya, PN Tipikor Denpasar sudah menetapkan tiga terpidana. Yaitu, Indah Suryaningsih, I Gede Astawa dan I

Dewa Ketut Artawan yang divonis bersalah dan menjalani penahanan di Rutan Kelas II B Negara.

Wakapolres Jembrana, Kopol Supriadi Rahman mengatakan, pihaknya saat ini telah merampungkan berkas perkara tersangka Tumari. Yakni dengan merampungkan pemeriksaan saksi sebanyak 16 orang. Kemudian, penyitaan 11 jenis dokumen santunan kematian yang diajukan oleh tersangka kepada terpidana atau yang juga menjadi saksi yaitu Indah Suryaningsih. "Kami juga memeriksa saksi ahli dan perwakilan BPKP Bali," ucap Supriadi, Rabu (4/3).

Menurut Supriadi, kasus ini terjadi pada 2015. Dimana tersangka mengajukan santunan kematian bekerjasama dengan terpidana Indah Suryaningsih selaku staf di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dokumen Tumari tidak pernah diverifi-

kasi sehingga mendapat dana santunan kematian. Padahal dokumen itu fiktif. Bahkan, ada satu dokumen yang diajukan dua kali.

"Untuk tersangka ada sekitar 32 berkas di Lingkungan Asih yang diajukan berulang, dari 301 berkas berulang di Jembrana. Sedangkan pengajuan keseluruhan berkas dana santunan kematian di seluruh Jembrana ada 2.387 berkas," paparnya.

Tumari dalam kasus ini mendapat keuntungan sekitar Rp 48 juta. Dia sudah mengembalikan ke kas negara sebanyak Rp 9 juta. Tersangka tidak ditahan dan akan segera dilimpahkan ke Kejari Jembrana. Rp 48 juta itu dibagi dua antara Indah dan Tumari. Tumari mengaku mendapat bagian sekitar Rp 16 hingga 17 juta. "Tersangka akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jembrana," bebernya. (ang)



Aset Pemkab di Bedugul Dinilai Belum Dikelola Maksimal

Tabanan (Bali Post) -

Pengelolaan aset di wilayah Bedugul, Kecamatan Baturiti sejauh ini dinilai belum maksimal. Ironisnya lagi, pengelolaan aset itu diserahkan kepada pihak ketiga. Akibatnya aset belum memberikan hasil optimal. Hal itu kemudian jadi perhatian DPRD Tabanan yang tergabung dalam Pansus Aset, setelah kondisi aset dilihat dari dekat termasuk DTW Bedugul dan Ulundanu Beratan, Selasa (3/3) lalu.

Koordinator Pokja Aset Pansus VI, I Gusti Nyoman Omardani, mengatakan dari hasil kunjungan ke lapangan tiga aset daerah di Bedugul selama ini pengelolaannya masih diserahkan pada pihak ketiga. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, pengelolaannya dinilai masih belum maksimal. Melihat kondisi itu, ke depan dewan menilai pengelolaan aset harus dilakukan terintegrasi. Caranya dengan melibatkan masyarakat lokal.

"Pengelolaan Ulundanu sudah bagus. Namun pengembangan ke depan harus terintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. Jangan hanya dengan Ulundanu saja," terangnya dikonfirmasi, Rabu (4/3) kemarin.

Dewan meminta agar eksekutif menyiapkan tata ruang tepi danau dan menjalankan *grand design* wisata terintegrasi. Tujuannya agar tidak muncul persoalan terkait pengelolaan aset yang ada di Bedugul, terutama dengan kegiatan masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah miliknya. Dengan adanya tata ruang, tentu harus ada kejelasan zona atau kawasan mana saja yang boleh dikembangkan dan yang mana tidak. Selain itu, apa saja yang dikerjakan. Dimana letak titik parkir, pasar ataupun lokasi pedagang. Untuk pengembangan wisata, masyarakat lokal juga harus dilibatkan. Masyarakat lokal, kata Omardani harus menjadi prioritas dalam proses pengembangan pariwisata. Kemudian, dampak pariwisata juga harus dikembalikan ke masyarakat setempat.

"Pengelolaan sudah bagus seperti di DTW Ulundanu Beratan. Jika DTW Bedugul akan dikembangkan, lebih baik terintegrasi dengan masyarakat sekitarnya," terangnya.

Pihaknya meminta agar aset daerah dikosongkan agar sesuai dengan konteks awal penyusunan *grand design* di DTW Bedugul. Artinya, kontrak yang sudah ada di wilayah Bedugul distop sementara. "Jangan dilanjutkan dulu kontraknya. Sehingga dalam perencanaannya nanti kita melihat secara gamblang apa persoalan yang ada di sana dan bagaimana pula persiapan tempat harus direncanakan lebih awal," jelasnya.

Lahan yang dikelola pihak ketiga diminta sementara ini kontraknya distop. Karena itu, jangan membuat kontrak baru lagi. Bagusnya di sana akan dikembangkan *rest area* terintegrasi dengan pariwisata.

"Terintegrasi satu tiket ke beberapa tempat wisata yang ada di wilayah Bedugul, Baturiti," katanya. (kmb28)



Pemprov Keluarkan Dana Tak Terduga Rp 15 M

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bali siap mengeluarkan dana tak terduga sebesar Rp 15 miliar apabila virus Corona mewabah di Pulau Dewata. Dana tak terduga ini memang secara khusus dianggarkan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Itu bisa digunakan kalau benar-benar terjadi dan membutuhkan biaya yang besar. Kalau terjadi tapi sifatnya masih ditangani pihak rumah sa-

kit (dan) dinas kesehatan kan berjalan seperti biasa," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Dewa Made Indra di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (4/3).

Dana tak terduga yang berasal dari APBD ini memang diperuntukkan untuk mengatasi kejadian atau situasi darurat. Saat ini pemerintah sudah menetapkan wabah virus Corona sebagai Kejadian Luar Biasa.

BERSAMBUNG HAL 7

Pemprov Keluarkan Dana...

"Jadi kalau ada situasi darurat bisa menggunakan itu," kata mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali itu.

Jika seandainya dana darurat Rp 15 miliar ini kurang, Sekda Dewa Indra menyebut regulasi sudah memungkinkan Pemprov Bali melakukan penambahan dengan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang lain. "Untuk dana darurat tidak usah khawatir," cetusnya.

Namun yang lebih penting, Sekda Dewa Indra mengajak masyarakat untuk senantiasa berdoa agar virus Corona ini tidak sampai mewabah di Bali. Sampai saat ini pun belum ada pasien yang dinyatakan positif terkena virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, itu.

Pihaknya mengaku selama ini terus melakukan mitigasi atau pengurangan risiko. Upaya mitigasi ini tidak membutuhkan biaya, karena di Bandara Internasional Ngurah Rai sudah terdapat *thermo scanner* yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar.

"Itu (alatnya) sudah ada, tapi karena ada virus Corona maka mereka harus bekerja lebih cermat lagi, lebih baik lagi lebih intensif. Itu tidak membutuhkan biaya," katanya.

Disamping itu, rumah sakit di Bali memang sudah mempunyai ruang isolasi sehingga juga tidak membutuhkan biaya untuk membangun kembali ditengah isu virus corona.

Sekda Dewa Indra mengatakan semua lalu lintas tentang virus corona melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut

Kita memastikan bahwa turis atau penumpang yang turun atau masuk ke Bali memiliki HAC, selain itu dilakukan pemindaian suhu tubuh lewat thermal scanner

Lucky M. Tjahjono

Kepala KKP Kelas 1 Imigrasi Denpasar

Suarjaya. Namun untuk menerima laporan pihaknya sedang membangun counter informasi.

"Tadi Kadis Kominfo sedang menghubungi PT Telkom untuk bisa mendapatkan nomor telepon yang mudah diakses," jelasnya.

Call center mengenai virus Corona ini akan dibangun di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali. "Pertanyaannya bisa diarahkan ke sana," tuturnya.

Sambungan Hal.1

Health Alert Card

Sementara itu, KKP Kelas 1 Denpasar berupaya memastikan turis atau penumpang pesawat terbang yang masuk Bali memiliki Health Alert Card (HAC) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk proteksi penyebaran Covid-19 Virus Corona melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Kita memastikan bahwa turis atau penumpang yang turun atau masuk ke Bali memiliki HAC, selain itu dilakukan pemindaian suhu tubuh lewat thermal scanner," kata Kepala KKP Kelas 1 Imigrasi Denpasar Lucky M. Tjahjono.

HAC berisi pernyataan oleh penumpang berfungsi mengontrol riwayat kesehatan dan perjalanan. Apabila mengalami sakit dalam kurun 14 hari terakhir setelah berganti dari luar negeri atau datang dari negara endemis dan atau terjangkit.

Dalam HAC berisi data penumpang, seperti nama, umur, jenis kelamin, kebangsaan, nomor passport, alamat, datang dari negara mana, tanggal kedatangan hingga keluhan penyakit yang dirasakan.

"Sehingga bisa mengetahui apabila ada gejala langsung memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Selain itu mengetahui track alamat yang di Bali," jelasnya

"Ini sangat membantu pada saat ada kasus, ada lembar untuk petugas KKP," imbuh dia.

KKP 1 Denpasar menyiagakan 12 personel tenaga kesehatan dalam satu shift. "Ada 3 yang di klinik untuk kasus *emergency*, tidak hanya Corona tapi untuk hal lain tang sifatnya *emergency*," ujarnya. (sui/zae)



Pemkab Badung Ngaturang Bhakti Penganyaran di Pura Sad Kahyangan Batukau

SERANGKAIAN Karya Agung Pangurip Gumi, Mesaba Agung, Mapaselang, dan Pujawali Agung di Pura Sad Kahyangan Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan, Pemerintah Kabupaten Badung ngaturang bhakti penganyaran, Selasa (3/3). Rombongan Bhakti penganyaran Pemkab Badung dipimpin Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta istri. Wabup I Ketut Suiasa beserta istri juga hadir beserta jajaran DPRD, Organisasi Perangkat Daerah dan TP PKK Badung.

Semua prosesi upacara bhakti penganyaran yang dilaksanakan rombongan Pemkab Badung berjalan lancar. Kegiatan mulai pementasan tari wali to-peng sidakarya, rejang sari yang dibawakan Ny Seniasih Giri Prasta beserta tim TP PKK Kabupaten Badung. Selain itu untuk puncak prosesi upacara penganyaran, dipuput yajamana karya Ida Pedanda Griya Sandan dan Ida Kubayan Ling-sir sebagai pengraja karya.

Bupati Giri Prasta menyam-

paikan terima kasih kepada masyarakat Tabanan yang tulus ikhlas menggelar upacara Pengurip Bumi. Menurutnya, semua itu memiliki tujuan mulia untuk nunas kerahajengan dan kerahayuan alam semesta. "Pelaksanaan karya Pengurip Bumi tidak hanya untuk mendoakan jagat Tabanan, dan Bali semata tapi juga mendoakan NKRI agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa," imbuhnya.

Giri Prasta menambahkan pelaksanaan upacara penganyaran sebagai wujud bhakti kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa dengan menghaturkan persembahan yang dilandasi hati suci. "Kami harapkan dengan melaksanakan upacara bhakti nganyarin secara tulus ikhlas, dapat mewujudkan kedamaian di dunia. Semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan kelimpahan rejeki oleh Ida Betara yang melinggih di Pura Luhur Batukau," harapnya.

Kadis Kebudayaan Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, serangkaian upacara



bhakti penganyaran di Pura Batukau, Pemkab telah mempersiapkan sarana upacara dari Badung. Tidak hanya banten upakara, termasuk tari wali dan sekaa gong dipersiapkan.

Ketua Harian Karya Pura Batukau I Wayan Arya, mengatakan Karya Agung Pangurip Gumi ini berlangsung 11 November 2019 hingga 2 April 2020. "Sebenarnya puncak pujawali di Pura Batukau pada hari u-manis galungan (20/2) yang lalu. Namun Pem-

kab Badung mendapat giliran penganyaran pada Selasa (3/3), pelaksanaan Karya Agung Pangurip Gumi ini dilaksanakan berdasarkan pawisik Ida Bathara yang berstana di Pura Batukau," ujarnya.

Pada Upacara Nganyarin tersebut Pemkab Badung menghaturkan punia Rp 300 juta yang diserahkan Bupati Giri Prasta kepada I Wayan Arya selaku ketua harian Karya Agung Pengurip Bumi. (adv/gus)



Hadiri Karya "Melaspas Mendem Pedagingan" Pura Puseh dan Desa

● Giri Prasta Ingatkan Persatuan "Ngewangun Yadnya" Krama Adat Pelaga

SEIRING rampungnya pembangunan dan penataan pelinggih Ida Betara di Pura Puseh, Desa Adat Pelaga, Kecamatan Petang, Sabtu (29/2) krama Desa Adat Pelaga melaksanakan upacara melaspas dan mendem pedagingan.

Upacara yang bertepatan dengan Hari Suci Kuningan itu juga dihadiri I Nyoman Giri Prasta selaku Bupati sekaligus Krama Desa Adat Pelaga. Giri Prasta saat itu memberikan kehormatan ikut melaksanakan prosesi mendem pedagingan disalah satu pelinggih. Pada kesempatan itu pihaknya didampingi oleh Mangku Gede Pura Luhur Pucak Mangu, Camat Petang I Wayan Darma, Pj. Perbekel Desa Pelaga I Dewa Made Widana serta tokoh masyarakat setempat.

Pelaksanaan upacara ini di puput Ida Pedanda Gede Ngurah Putra Keniten Geria Kediri Sangeh. Rampungnya Pembangunan dan Penataan Pura Puseh dan Desa

Adat Pelaga itu karena mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Badung Rp 3,5 miliar.

Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta yang juga tokoh adat masyarakat Pelaga mengajak masyarakat untuk selalu bersatu dalam melaksanakan kegiatan di desa adat agar semua bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan.

Lebih lanjut Giri Prasta melakukan musyawarah dengan tokoh Desa Adat Pelaga mengenai rencana kerja desa adat. Rancangan tersebut seperti sejumlah agenda yakni penataan kantor desa adat dan LPD, ngodak tapakan ratu gede, nyekah bersama dan ngusaba desa dan ngusaba nini.

"Sesuai dengan sastra agama ngusaba desa lan ngusaba nini seharusnya dilaksanakan setiap 30 tahun sekali oleh desa adat. Namun kita di Desa Adat Pelaga dalam kurun waktu 50 tahun terakhir belum melaksana-



BUPATI Giri Prasta disaat menghadiri upacara melaspas dan mendem pedagingan di Pura Puseh, Desa Adat Pelaga, Kecamatan Petang dan bertepatan dengan Hari Suci Kuningan, Sabtu (29/2).

kannya. Untuk itu, saya bersama tokoh dan pengelingsir desa adat sudah sepakat akan melaksanakan upacara ngusaba desa lan ngusaba nini di tahun 2021 dengan menyiapkan anggaran sebesar 1,8 miliar," ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga mengatakan, mengingat banyaknya agenda penting desa adat yang akan dilak-

sanakan pihaknya meminta agar krama agung Desa Adat Pelaga untuk bersatu.

"Bersatu setengah perjuangan kita sudah berhasil. Semoga dengan Yadnya tuhus yang kita haturkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa, desa adat pelaga berserta isinya memperoleh kedamaian kebahagiaan dan kelimpahan rejeki," tegas Giri Prasta (**adv/Gus**)



Pemkab Siapkan Rp 17 M Tangani Corona

● Seminggu Siapkan RS Pratama Giri Emas Khusus Pasien Corona

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Pemkab Buleleng telah menyiapkan anggaran Rp 17 miliar untuk pembelian alat-alat medis di RS Pratama Giri Emas yang akan dikhususkan untuk pasien corona. RS itu terletak di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Buleleng.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, Selasa (17/3) mengatakan, anggaran Rp 17 miliar itu akan digunakan membeli alat pelindung diri (APD) berupa pakaian hazmat suit sebanyak 1.000 buah, ventilator, monitor pasien, alat radiologi serta beberapa kebutuhan lain, termasuk untuk pemenuhan gizi pasien seperti minuman tradisional (jamu)



TRIBUN BALI/RATU AYU

PUTU AGUS SURADNYANA

dan telur ayam kampung yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh.

Persiapan untuk menjadi-

kan RS Pratama Giri Emas menjadi RS isolasi, sebut Agus Suradnyana, membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Sebab, pihaknya juga harus melakukan beberapa perbaikan ringan di RS tersebut. Jadi, sembari menunggu RS Pratama Giri Emas siap, lima pasien yang dicurigai terinfeksi virus corona saat ini sementara diisolasi di RSUD Buleleng.

"RS Giri Emas ini jadi tipe B, penanggung jawabnya diambil alih oleh RSUD Buleleng. Jadi perilaku medisnya sama dengan tipe B," katanya.

Sekda Buleleng, Gede Suyasa yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Daerah (TPAD) mengatakan, anggaran Rp 17

miliar itu bersumber dari dana tak terduga Rp 3 miliar dan berasal dari Tunjangan Penghasilan (Tukin) Rp 14 miliar. Dimana, berdasarkan Permendagri, pembayaran Tukin tidak boleh lebih besar dari tunjangan 2019. Sementara Pemkab sudah memasang anggaran pembayaran Tukin sebesar Rp 114 miliar.

"Sudah kami hitung, dari Tukin ada selisih sekitar Rp 16 miliar. Rp 2 miliar kami kembalikan untuk bayar BPJS karena merealisasikan Tukin, sementara Rp 14 miliar untuk dana tak terduga. Sehingga total dana tak terduga untuk penanganan virus corona Rp 17 miliar," terangnya. (rtu)



PHRI Proyeksi PAD dari PHR Hilang Rp 1,6 Triliun

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Seorang pengusaha hotel di Badung, Pande sangat menyayangkan masih ditagihnya pajak hotel dan restoran (PHR), padahal Indonesia siaga virus Corona. Kepada Tribun Bali, pria ini menunjukkan edaran dari Pemkab Badung dengan nomor surat 973/7090/Bapenda tanggal 11 Maret 2020, yang tetap meminta PHR pada industri hotel di Badung.

"Alasan tetap ditagih ini, karena belum ada payung hukum, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis ke daerah," jelasnya tentang isi surat tersebut pada Tribun Bali, Senin (16/3).

Padahal sudah jelas wacana pemerintah pusat dan kementerian keuangan, tentang pembebasan PHR selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 2020.

Menanggapi hal ini, Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya,

menjawabnya. "Ini khan sudah keputusan pemerintah pusat, kebijakan itu langsung diterapkan ke daerah mulai selama 6 bulan, dan 10 destinasi akan mendapatkan hibah atau stimulus," tegasnya.

Ia berharap hotel dan restoran di Bali, khususnya di Badung tetap tenang dengan hal ini. Jangan panik sehingga tak kisruh.

Ia pun menegaskan PMK keluar sebelum akhir Maret 2020, bahkan diperkirakan sebelum tanggal 20 Maret 2020. "Mungkin karena PMK belum keluar, jadinya surat itu masih beredar," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap PMK segera turun ke daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Apalagi kondisi saat ini, banyak negara lockdown karena virus Corona, penerbangan juga tidak jalan normal. Pariwisata stuck, karyawan banyak dirumahkan sementara. Sehingga okupansi rate saat ini terjun bebas hanya 20

persen. Sementara biaya operasional terus berjalan.

Rai Suryawijaya mengapresiasi adanya banyak stimulus dan relaksasi dari otoritas pada industri. Termasuk stimulus pembebasan PHR ini, dan mencajarkan dana sebesar Rp 3,3 triliun untuk pengganti PHR ke 10 destinasi utama termasuk Bali.

Proyeksinya, PAD dari PHR yang hilang dari Maret sampai Agustus mencapai Rp 1,6 triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1,4 triliun. "Kalau tidak ada ini tentu program yang dicanangkan tidak ada berjalan sesuai dengan target," tegasnya.

Apabila hibah atau stimulus pengganti hanya Rp 3,3 triliun dibagi ke-10 destinasi maka hasilnya jauh dari harapan. Padahal, tegas dia, sektor pariwisata Indonesia dengan 16 juta lebih wisman, sebesar 39 persen disumbang dari Bali pada 2019. (ask)



Namiartha Bingung Ada Selisih Silpa

■ Mantan Perbekel Mengaku Tak Pahami Keuangan ■ Sidang Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Klod

DENPASAR, TRIBUN BALI

Mantan Perbekel Desa Dauh Puri Klod, IG Made Wira Namiartha duduk sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (11/3). Pria yang kini menjadi anggota DPRD Kota Denpasar itu memberi keterangan terkait dugaan korupsi APBDes 2017 Dauh Puri Klod, Denpasar Barat dengan terdakwa mantan bendahara Ni Luh Putu Ariyaningsih (33).

Selain Namiartha sejumlah saksi juga didengar keterangannya. Dalam jalannya persidangan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikomandoi Kasi Pidsus Kejari Denpasar, I Nengah Astawa mececar Namiartha dengan sejumlah pertanyaan.

Tim jaksa menanyakan seputar pengelolaan keuangan desa, tupoksi saksi selaku perbekel dan pertanggungjawaban mengenai adanya selisih sisá lebih penggunaan anggaran (Silpa). Terungkap buruknya pengelolaan ke-

uangan desa Dauh Puri Klod sejak 2010 dalam sidang.

Mulai dana yang ditarik tidak sesuai kebutuhan, dana yang ditarik tidak terealisasi kegiatan hingga dana pendapatan desa dipinjam untuk kepentingan pribadi para aparat desa.

"Saya hadir di sini karena ada laporan silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada Silpa yang tidak ada uangnya sebesar Rp 720 juta. Itu hasil audit," jelasnya mengawali kesaksian.

Kemudian jaksa menanyakan langkah saksi dengan ditemukannya selisih Silpa. "Saya disarankan membentuk tim dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Hasilnya terdakwa mengakui. Kemudian dibuat surat pernyataan, bahwa terdakwa mengakui dan akan mengembalikan uang itu," jawab Namiartha.

Ditanyakan terkait pengembalian keuangan oleh Namiartha ke kas desa, setelah ada temuan audit, sejumlah

perangkat desa kemudian mengembalikan uang. Lagi-lagi Namiartha berkelit.

Katanya uang yang dikembalikan merupakan uang tipuan dari salah satu petugas pungut desa yang sempat kasbon. "Sebagian (pengembalian) saya pinjamkan dari uang desa, sebagian saya talangi uang pribadi karena petugas yang meminjam itu sudah meninggal dunia," jelasnya.

Sebagai kepala desa, Namiartha dianggap lalai dalam menjalankan pengawasan. Sehingga terjadi penyelewengan dana hingga ratusan juta.

"Saya sendiri bingung setelah ada audit dari BPMPD dan Inspektorat. Kenapa kok bisa ada selisih silpa. Saya bingung," jawabnya. Saat ditanya jaksa mengenai dari mana dirinya mengetahui ada selisih dana silpa. "Saya juga tidak tahu uang pungutan yang diterima bendahara bisa dipinjam dan digunakan untuk

insentif," imbuh Namiartha.

Saat dicecar mengenai tugasnya sebagai perbekel yang bertanggungjawab atas penggunaan uang desa, Namiartha beralih banyak kegiatan yang harus dijalani sehingga dirinya tidak bisa mengecek rekening desa.

Ketidaksesuaian antara buku kas umum dengan rekening desa terjadi sejak 2014. Anehnya, Namiartha tetap tanda tangan pencairan dana meski terdakwa Ni Putu Ariyaningsih (mantan bendahara) tidak melampirkan SPJ.

"Kok bisa. Tidak ada SPJ tapi anda menandatangani slip penarikan. Kewajiban Anda itu memonitor dan mengawasi pengelolaan keuangan desa," ucap Hakim Anggota Hartono.

Namiartha mengaku tidak menguasai masalah keuangan. Namiartha juga menyalahkan terdakwa dan sekretaris desa yang bertugas memverifikasi pencairan dana.

Namiartha menyebut proses pencairan dana diawali laporan kepala seksi (kasi) kepada sekdes, lalu sekdes konfirmasi ke bendahara untuk menyiapkan penarikan uang sesuai RAPBDes.

Setelah itu dokumen diverifikasi lagi sekdes. Barulah sekdes melaporkan secara lisan pada perbekel. Tahap akhir barulah perbekel tandatangan slip pencairan dana ke bank. Jika perbekel berhalangan menyertakan surat kuasa.

Saat dikejar jaksa kenapa

penarikan dana di bank beberapa kali lebih besar dari RAPBDes, Namiartha menyebut kelebihan dana itu untuk kas tunai pembiayaan operasional kantor. Seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan keperluan mendadak.

Saksi Menyangkal

Ditemui usai sidang dan dikonfirmasi mengenai sumber uang yang dikembalikan oleh suami terdakwa yang diduga uang sebesar Rp 778.176.500 diberikan olehnya, Namiartha membantah. "Tidak ada. Saya

tahunya malah di koran (berita). Saya tidak mau banyak komentar memojokkan sanasini," katanya.

Disinggung janji akan memberikan bantuan pada terdakwa jika mau mengakui menggunakan dana, Namiartha kembali berkelit. Pun saat ditanya tuduhan terdakwa, bahwa perbekel pernah menarik dua kali sendiri, Namiartha kembali menyangkal. "Saya tidak pernah menarik sendiri. Selalu berdua dengan bendahara," ucapnya. (can)

Hasil Audit Disembunyikan

FAKTA baru diungkapkan saksi I Putu Gede Sudiarsa. Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sudiarsa memiliki tugas mengawasi kinerja kepala desa. Sudiarsa mengaku mengetahui ada silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Kami minta kepala desa coba dicek, kenapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan padahal sudah direncanakan. Akhirnya dijawab, sebagian uang silpa tidak ada di rekening desa," jelas pria paruh baya itu.

Akhirnya BPD menyarankan diadakan audit.

"Tapi, hasil audit itu tidak pernah dibuka dan dikasih pada kami. Mereka (kepala desa dan perangkatnya) beralasan hasil audit bukan wewenang BPD. Akhirnya kami tidak bisa berbuat banyak," ungkap Sudiarsa.

Selain Namiartha dan Sudiarsa, saksi lain memberikan keterangan adalah Made Wardana (mantan perbekel), IB Joni (mantan camat Denpasar), I Made Mertajaya (Kadis Sosial dan mantan Kepala BPMPD), dan Gusti Ayu Sri Saraswini (pegawai BPD Bali). (can)

Edisi : Kamis 12 Maret 2020

Hal : 8



Rapor PD Pasar

Merah

- Memberatkan, Penyertaan Modal dalam Bentuk Bangunan
- Akibat Penyusutan, Tahun Ini Potensi Kerugian Rp 1,2 M

SINGARAJA, Radar Bali - Nasib Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng kembali menjadi sorotan DPRD Buleleng. Kemarin (10/3) DPRD Buleleng mencecar pemerintah terkait rapor PD Pasar Buleleng yang selalu merah. Alias merugi saban tahun.

Kemarin (10/3), DPRD Buleleng memang membahas rencana perubahan status PD Pasar Buleleng. Pemerintah mengusulkan agar PD Pasar Buleleng berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Argha Nayottama.

Ketua Pansus Pasar Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, sebenarnya PD Pasar Buleleng saat ini dalam kondisi sehat. Hanya saja bentuk penyertaan modal yang diberikan pemerintah, memberatkan perusahaan dalam hal pembukuan. Sehingga dalam laporan rugi/laba, perusahaan dipastikan merugi dari tahun ke tahun.

Wandira menyebut, pemerintah memberikan penyertaan modal dalam bentuk bangunan yang harus dihitung biaya penyusutannya (amortisasi). Nah, beban penyusutan ini yang membuat laporan rugi/laba perusahaan selalu merah.

Dalam rencana bisnis perusahaan tahun 2020 saja, Wandira menyebut perusahaan berpotensi merugi hingga Rp 1,2 miliar. "Kalau kita menghitung pembukuannya, ya akan ada potensi kerugian sebesar itu. Karena ada beban penyusutan senilai Rp 2,25 miliar yang harus ditanggung. Tapi kalau perusahaan tidak menanggung biaya penyusutan itu, sebenarnya masih ada laba sampai Rp 1 miliar," kata Wandira.

Bahkan pada tahun-tahun mendatang, perusahaan berpotensi mengalami kerugian yang lebih dalam. Apabila pemerintah memasukkan Pasar Banyuasri dalam penyertaan

modal perusahaan.

"Kalau Pasar Banyuasri nanti masuk penyertaan modal, setahun itu PD Pasar harus menanggung beban penyusutan Rp 8,5 miliar. Itu baru beban penyusutan Pasar Banyuasri saja, belum pasar lain. Kalau begitu, bagaimana caranya perusahaan mau cari laba," imbuhnya.

Untuk itu, dewan mengusulkan agar pemerintah menghibahkan bangunan-bangunan pasar pada PD Pasar Buleleng. Alternatif kedua, perusahaan menyewa bangunan pasar pada pemerintah lewat mekanisme Barang Milik Daerah (BMD). Sehingga beban penyusutan tak lagi jadi tanggungan perusahaan.

Sementara itu Asisten Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna mengapresiasi saran yang diberikan oleh dewan. "Kami akan rumuskan kebijakan yang terbaik, untuk menindaklanjuti usulan dari dewan. Tentu saja kebijakan yang terbaik bagi semua pihak. Sebenarnya PD Pasar juga sudah terus berusaha melakukan pengelolaan yang lebih optimal, sehingga bisa menghasilkan laba," kata Karuna. (eps/gup)



Koruptor Tidak Bayar Denda

NEGARA, Radar Jembrana- Meski sudah divonis terbukti bersalah, I Komang Budiarta, terpidana kasus korupsi santunan kematian fiktif, belum jua membayar denda.

Mantan Kaling Jineng Agung Kelurahan Gili-manuk tersebut sebelumnya divonis setahun penjara dan denda Rp 50 juta. Namun, hingga saat ini terpidana belum menyatakan kesiapan membayar denda.

Menurut informasi, terpidana yang terbukti melanggar pasal 3 jungto pasal 18 UU 31/ 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan UU 20/ 2001 tentang Perubahan atas UU 31/ 1999 tentang Tipikor, tidak sanggup membayar denda sebesar Rp 50 juta sebagaimana putusan majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Senin lalu (24/2).

Kasipidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra mengatakan, mengenai putusan pidana penjara hingga kemarin, terpidana masih belum diek-

sekusi dan denda yang harus dibayar terpidana juga belum ditanyakan pada terpidana. "Kami baru terima putusan, sehingga eksekusi belum dilakukan. Mengenai denda, kami perlu bersurat pada terpidana, apakah sanggup atau tidak membayar denda," jelasnya.

Sedangkan tiga terpidana sebelumnya, hanya Indah Suryaningsih yang membayar denda dan membayar uang pengganti kerugian negara. Sedangkan Klian Banjar Munduk Ranti Tukadaya I Gede Astawa dan mantan Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Tukadaya I Dewa Ketut Artawan, divonis 4 tahun pidana penjara dengan denda masing-masing Rp 200 juta, apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 1 bulan. Keduanya juga dibebani uang pengganti. Ivan menambahkan, dua tersangka lagi, Tumari dan Ni Luh Sridani, sudah ditahan di Rutan Negara. **(bas/djo)**



Namiartha "Ditelanjangi" di Sidang

Dianggap Lalai Menjalankan Tugas Sebagai Perbekel

DENPASAR, Radar Bali - Anggota DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Namiartha akhirnya merasakan kursi panas Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (11/3). Politisi PDIP itu "ditelanjangi" oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Denpasar dalam kasus korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBDes Dauh Puri Klod, Denpasar Barat.

Di sidang kemarin juga terungkap bobroknya pengelolaan keuangan Desa Dauh Puri Klod sejak 2010. Mulai dana yang ditarik tidak sesuai kebutuhan, dana yang ditarik tidak terealisasi kegiatan, hingga dana pendapatan desa dipinjam untuk kepentingan pribadi para aparatur desa.

Namiartha sendiri tampak tegang sejak awal sidang dimulai. Saat menjawab pertanyaan JPU I Nengah Astawa dkk, mantan perbekel itu beberapa kali gelagapan hingga harus mengulang omongannya karena tidak jelas. Suaranya juga gemetar seperti orang ketakutan ketika memberikan penjelasan.

Namiartha juga kerap dibentak hakim anggota Hartono lantaran sebagai kepala desa dianggap lalai dalam menjalankan pengawasan, sehingga terjadi penyelewengan dana hingga ratusan juta. "Saya sendiri bingung setelah ada audit dari BPMPD dan Inspektorat. Kenapa kok bisa ada selisih silpa? Saya bingung," ujar Namiartha saat ditanya JPU dari mana tahu ada selisih dana silpa.

"Saya juga tidak tahu uang pungutan yang diterima bendahara bisa dipinjam dan digunakan untuk insentif," imbuh Namiartha.

Keterangan itu membuat hakim Hartono meradang. "Perbekel kok tidak tahu. Sebagai kepala desa, Anda harus tahu!" bentak hakim Hartono. Sontak, Namiartha langsung kelimpungan.

Saat dicecar tugasnya sebagai perbekel bertanggung jawab atas penggunaan uang desa, Namiartha beralasan banyak kegiatan yang harus dijalani sehingga dirinya tidak bisa mengecek rekening desa. Ketidaksiwaan antara buku kas umum dengan rekening desa terjadi sejak 2014. Anehnya, Namiartha tetap tanda tangan pencairan dana meski terdakwa Ni Putu Ariyaningsih (mantan bendahara) tidak melampirkan SPJ. Ketika ditanya mengapa begitu, Namiartha langsung kelimpungan. Dia

berkilah tidak menguasai masalah keuangan. Namiartha malah menyudutkan terdakwa dan sekretaris desa yang bertugas memverifikasi pencairan dana.

Saat dikejar jaksa kenapa penarikan dana di bank beberapa kali lebih besar dari RAPBDes, Namiartha menyebut kelebihan dana itu untuk kas tunai pembiayaan operasional kantor. Seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan keperluan mendadak.

Hakim Hartono lantas mengejar alasan Namiartha mau meneken buku kas umum (BKU) yang dibuat terdakwa. BKU dibuat terdakwa tiga sampai enam bulan sekali. Lagi-lagi Namiartha berkilah. Dia mengaku tinggal tanda tangan karena tidak mengetahui masalah pembukuan. Setelah ada audit, Namiartha barulah tidak mau meneken BKU. "Karena hasil audit saya menjadi ragu. Hasil audit menyebut BKU banyak salah," terang Namiartha.

"Anda tidak tanda tangan BKU, tapi Anda meneken laporan pertanggungjawaban keuangan desa (LPJK). Padahal, catatan keuangan antara di BKU dengan LPJK sama persis," sodok hakim Hartono. Tak ayal, Namiartha langsung merah padam. Namun, politikus PDIP itu berkelit. "Saya tandatangan LKPJ karena sebelumnya

sudah dimusyawarahkan," kelitnya.

Sementara itu, JPU Astawa menyoal pengembalian keuangan oleh Namiartha ke kas desa. Setelah ada temuan audit, sejumlah perangkat desa ramai-ramai mengembalikan uang. Lagi-lagi Namiartha berkelit. Katanya, uang yang dikembalikan merupakan uang titipan dari salah satu petugas pungut desa yang sempat kasbon. "Sebagian (pengembalian) saya pinjamkan dari uang desa, sebagian saya talangi uang pribadi karena petugas yang meminjam itu sudah meninggal dunia," tuturnya.

Namiartha mengaku mengetahui terdakwa Ariyaningsih menggunakan uang Rp 700 juta lebih setelah Ariyaningsih mengaku sendiri. Terdakwa juga membuat surat pernyataan. Nah, yang menarik, Namiartha mampu menyebutkan secara tepat jumlah uang yang dikembalikan terdakwa Ariyaningsih ke kas negara sehari sebelum sidang. Yakni Rp 778.176.500. "Dari mana saksi tahu terdakwa mengembalikan uang?" tanya Astawa. Namiartha sempat terkejut ditanya demikian. Ia terdiam sejenak. "Saya tahu dari (berita) koran," jawabnya.

Saat ditanya tudingan terdakwa, bah-

wa perbekel pernah menarik sendiri sebanyak dua kali, Namiartha kembali menyangkal. "Saya tidak pernah menarik sendiri. Selalu berdua dengan bendahara," sergahnya.

Sementara itu, saksi I Putu Gede Sudiarsa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengaku mengetahui ada silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Kami minta kepala desa coba dicek, kenapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan padahal sudah direncanakan. Akhirnya dijawab, sebagian uang silpa tidak ada di rekening desa," jelas pria paruh baya itu.

Akhirnya BPD menyarankan diadakan audit. "Tapi, hasil audit itu tidak pernah dibuka dan dikasih pada kami. Mereka (kepala desa dan perangkatnya) beralasan hasil audit bukan wewenang BPD. Akhirnya kami tidak bisa berbuat banyak," ungkap Sudiarsa. Kendati begitu, masalah ini akhirnya menggelinging hingga ke meja hijau. Saksi lain yang datang kemarin adalah Made Wardana (mantan perbekel sebelum Namiartha), IB Joni (mantan camat Denbar), I Made Mertajaya (Kadis Sosial dan mantan Kepala BPMPD), dan Gusti Ayu Sri Saraswini (pegawai BPD Bali). (san/yor)



KORUPSI

1,5 Tahun Penjara untuk Eks Sekum PSSI Gianyar



DENPASAR, Radar Bali - Sidang kasus korupsi di tubuh PSSI Gianyar akhirnya sampai babak puncak.

Ketut Suasta, 51, mantan sekretaris umum (Sekum) PSSI Gianyar itu dinyatakan terbukti bersalah menyalahgunakan jabatannya menyalahgunakan dana turnamen Bupati Cup Gianyar 2016 sebesar Rp 152 juta ■

TERBUKTI : I Ketut Suasta kemarin diganjar hukuman 1,5 tahun.

► **Baca 1,5 Tahun Penjara... Hal 11**

ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

Laporan Kegiatan Akal-Akalan

■ 1,5 TAHUN PENJARA....

Sambungan dari hal 1

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ketut Suasta dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun)," tandas hakim Esthar Oktavi yang memimpin persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (18/3).

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan jaksa. Yakni, melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Selain dipidana penjara selama setahun enam bulan, juga didenda Rp 50 juta subsidier dua bulan kurungan.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelum-

ya, JPU Kejarri Gianyar Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti dan I Made Eddy Setiawan meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsidier tiga bulan penjara. JPU juga mengajukan pidana denda Rp 50 juta subsidier tiga bulan kurungan.

Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Awalnya untuk menjalankan Bupati Cup itu, terdakwa mengajukan proposal ke bupati Gianyar. Proposal itu

ditandatangani Ketua PSSI Gianyar Pande Made Purwatha, dengan bantuan dana Rp 600 juta. Selanjutnya bupati memberikan atau menyetujui hibah kepada KONI Gianyar sebesar Rp 2,5 miliar.

Atas dasar itu, KONI Gianyar mengajukan surat perihal penyaluran hibah Rp 2,5 miliar, yang salah satunya diperuntukkan PSSI Gianyar sebesar Rp 500 juta. Dana itu pun cair melalui BPD Bali Cabang Gianyar.

Turnamen Bupati Cup 2016 pun berjalan. Namun, laporan penggunaan dana yang dilaporkan terdakwa Ketut Suasta, diduga tidak benar, akal-akalan dan tidak sesuai dengan riil pengeluarannya. (san/pit)

Edisi : Kamis 19 Maret 2020

Hal : 1-11



DPRD KABUPATEN BADUNG

Dewan Terima LKPJ Bupati 2019

MANGUPURA, Radar Bali - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung, Senin (9/3) kemarin. Laporan terhadap pelaksanaan APBD 2019 ini diserahkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung, I Made Wira Dharmajaya dan diterima langsung Ketua DPRD Badung, Dr.Drs. I Putu Parwata MK, MM, didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, SH, dan Sekretaris Dewan Badung, I Gusti Agung Made Wardika.

Ditemui usai menerima LKPJ Bupati, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengapresiasi Bupati dan Pemkab Badung yang sudah tepat waktu menyelesaikan dan menyerahkan LKPJ kepada DPRD. LKPJ Bupati atas APBD Badung 2019 ini akan segera dibahas di DPRD. "Kami apresiasi pemerintah daerah telah menyerahkan LKPJ tiga bulan setelah tahun anggaran selesai dan kami akan jadwalkan lebih lanjut untuk pembahasannya," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan pembahasan-pembahasan dengan detail mengenai program yang telah terlaksanakan sesuai dengan APBD yang telah disepakati. "Pelaporan LKPJ merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi, karenanya kami akan membentuk pansus apa yang sudah disepakati apa sudah dilaksanakan," ucapnya.

Dikatakan, pansus akan mengevaluasi setiap program yang telah disepakati secara detail. Hal ini berfungsi mengetahui apakah program yang telah dicanangkan di 2019 telah terealisasi atau belum. "Nanti akan ada koreksi-koreksi, catatan-catatan dan rekomendasi, setelah itu baru dipaparkan dalam sidang," tegasnya. (adv/dwi/yog)

Edisi : Selasa 10 - Maret 2020

Hal : 6



Guru Honorer Belum Gajian

Dari Bulan Januari

GIANYAR, Radar Bali - Sejak Januari hingga Maret 2020 ini guru berstatus honorer di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum menerima gaji. Itu karena mereka tidak memiliki Nomor Unit Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Dinas Pendidikan pun menyiapkan anggaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Pendidikan Gianyar I Wayan Sadra mengakui guru honorer yang tidak memiliki NUPTK saat ini memang tidak bisa dibayar dari dana BOS reguler. "Saya kira para guru sudah menyadari bahwa mereka dari persyaratan sudah kurang," ujarnya kemarin (9/3).

Sadra mengatakan sebagai penggantinya diberikan anggaran melalui BOS pendamping APBD. "Pemda Gianyar akan membayarkan dari bos APBD. Untuk guru honor yang selama ini dibayar berdasarkan surat keputusan kepala sekolah," ujarnya.

Anggaran dari APBD untuk



INDRA PRASETIARADAR BALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN: Wayan Sadra.

pembayaran tersebut sudah ada. Namun, pihaknya masih mempersiapkan petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran tersebut. "Maka kami dari dinas pendidikan tinggal menyiapkan regulasi yang jumlahnya untuk SMP Rp 180 ribu per siswa, untuk SD per sekolah Rp 10 juta. Itu jumlah dana BOS pendamping," jelasnya.

Diakui, akibat kondisi tersebut hingga awal Maret 2020 gaji guru belum terbayarkan. Pihaknya bergerak cepat menuntaskan

juknis. Sehingga dalam waktu dekat gaji guru honor dapat terbayarkan. "Makanya sampai Maret ini belum terbayarkan. Kami menunggu regulasi, sedang diproses, paling tidak pertengahan ini sudah selesai," ungkapnya.

Terkait mekanisme guru memperoleh NUPTK, guru honor itu harus mengajukan permohonan. Juga harus ada keputusan pejabat yakni bupati atau wakil bupati. Namun, pihaknya lebih berharap pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait hal ini. "Kami hanya bisa berharap agar bagi mereka memenuhi syarat mencari NUPTK, ini mendapat kebijakan dari pusat. Dan, kami berharap pusat mengeluarkan kebijakan itu," pungkasnya. (dra/dot)



Atap Kantor Perbekel Sibang Kaja, Abiansemal Runtuh

MANGUPURA, Radar Bali

- Bangunan kantor Perbekel Sibang Kaja, Abiansemal, Badung, roboh. Bangunan kantor yang dibangun sejak tahun 2007 itu diketahui jebol, Minggu (8/3) dini hari sekitar pukul 03.00. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Informasi yang dihimpun koran ini, kejadian jebol atap Kantor Perbekel Sibang Kaja diketahui dari warga di depan kantor. Sabtu malam lalu kebetulan ada hujan lebat dan sekitar pukul 03.00 (Minggu dini hari) ada suara keras dikira awalnya ada orang kecelakaan.

Namun ketika dicari tidak ada, dan ternyata atap kantor yang jebol. "Syukur hari minggu tidak ada yang ngantor jadi tidak ada korban saat itu," ujar Mantan Perbekel Sibang Kaja, Ni Nyoman Rai Sudani didampingi Pj Perbekel Sibang Kaja, Ni Putu Indah Mariani, Minggu kemarin.

Rai Sudani mengakui, saat menjadi perbekel untuk pemeliharaan gedung rutin dilakukan, tapi sudah diperbaiki ada saja rembesan air di atap sehingga ada beberapa ruangan yang bocor. "Untuk saat ini kami belum ada solusi per-

baikan menyeluruh karena dana bencana hanya dipasang sebesar Rp 50 juta dari APBDes. Kalau di renovasi secara menyeluruh atap tersebut pastilah kurang dan perlu dikonsultasikan lagi ke Kecamatan dan PUPR Badung," ungkapnya.

Sementara Pj Perbekel Sibang Kaja, Ni Putu Indah Mariani mengakui, solusi pertama yang dilakukan adalah para pegawai desa

dipindah dulu masuk ke gedung dari pintu sebelah sebelum adanya arahan untuk pindah dari pihak kecamatan. "Kita

akan lapor pimpinan dan menunggu arahan selanjutnya," ujarnya.

Camat Abiansemal, Ida Bagus Mas Arimba-

wa mengharapkan untuk sementara pegawai desa tetap berkantor di kantor desa sembari melakukan survei. (dwi/rid)



KORUPSI LPD TUWED

Rp 800 Juta, untuk Keperluan Sehari-hari

NEGARA, Radar Jembrana- Kasus korupsi LPD Desa Pakraman Tuwed, diduga tidak hanya menyeret satu orang tersangka. Selain menyelidiki dugaan keterlibatan orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi, Kejari Jembrana menelusuri aliran dana hasil korupsi Kepala LPD Desa Pakraman Tuwed Dewa Putu Astawa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasipidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra mengatakan, pada saat proses penyelidikan dan penyidikan sudah melakukan audit keuangan LPD Desa Pakraman Tuwed. Setelah hasil audit dari auditor independen keluar dan kerugian negara ditemukan, sudah konfirmasi pada tersangka mengenai aliran dana yang dikorupsi. "Dari pengakuan tersangka saat pemeriksaan, hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya. Ditanya mengenai dugaan pembelian aset dari hasil korupsi, jaksa menyebut pemeriksaan masih melakukan penyidikan secara mendalam mengenai modus korupsi, termasuk penggunaan uang hasil korupsi yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

"Kami masih lakukan pemeriksaan tersangka, jadi belum bisa menemukan bukti penggunaan uang untuk membeli aset dari hasil korupsi," tegasnya. Kuasa hukum tersangka, Supriyono, juga menegaskan bahwa hasil korupsi tersangka tidak digunakan untuk membeli aset berharga, baik tanah maupun kendaraan. Uang hasil korupsi digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi sehari-hari. "Semua untuk kepentingan pribadi, tidak ada membeli aset," tegasnya. Dewa Putu Astawa, Kepala LPD Desa Pakraman Tuwed ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp 1 miliar. Khusus tersangka, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 800 juta. (bas/djo)



EKA PRASETYA/RADAR BALI

DIBAHAS: BPNT bagi warga tak mampu akan mengalami kenaikan.

BPNT Naik Rp 200 Ribu

SINGARAJA, *Radar Bali* - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini mengalami kenaikan. Nominal kenaikan bantuan yang diterima keluarga miskin nyaris mencapai dua kali lipat. Ini pertama kalinya bantuan tersebut mengalami peningkatan, sejak program tersebut digulirkan pada 2017 lalu.

Terhitung sejak Maret 2020, para pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT akan menerima bantuan non tunai senilai Rp 200 ribu, dari semula Rp 110ribu. Bantuan itu sudah dapat dicairkan sejak pekan pertama Maret 2020. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disebut telah menerima kenaikan nominal tersebut.

Tak hanya menerima kenaikan nominal, keluarga miskin juga disebut bisa menukarkan bantuan dengan berbagai jenis makanan. Sebelumnya bantuan tersebut hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur. Kini bantuan itu bisa ditukarkan dengan sumber karbohidrat berupa beras, kentang, dan sejenisnya; protein hewani yang bersumber dari ikan, daging, atau telur; protein nabati yang bersumber dari kacang-kacangan; maupun sayur atau buah-buahan.

"Saya baru dapat informasi dari KPM, kalau ada kenaikan sampai Rp 200 ribu. Memang ada wacana kenaikan dari Kemensos, tapi kami belum terima surat resminya. Ternyata sudah direalisasikan kenaikannya," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Buleleng, Ni Nyoman Mariani Febrianti, Kamis (6/3).

Lebih lanjut Mariani mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Kemensos, kenaikan BPNT itu disebut akan berlaku selama enam bulan kedepan. Artinya nominal sebesar Rp 200 ribu per keluarga itu, akan diterima hingga Agustus 2020 mendatang. (eps/gup)

Edisi : Jumat, 6 - 3 - 2020

Hal : 4



Pemerintah Pastikan Proyek Pasar Jalan Terus

Ancaman Rasionalisasi Anggaran di Buleleng

SINGARAJA, Radar Bali - Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, akan tetap berjalan. Meski kini pemerintah terancam menghadapi rasionalisasi anggaran besar-besaran, proyek tersebut dipastikan masuk dalam prioritas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Gede Sugiarta Widiada yang dihubungi kemarin (6/3), menyatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk proyek tersebut. Total pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 180 miliar, yang dipasang pada dua tahun

anggaran.

Masing-masing sebesar Rp 50 miliar yang dipasang pada APBD 2019 lalu, serta Rp 130 miliar yang dipasang pada APBD 2020 ini. Anggaran tersebut disebut sudah siap dan dalam kondisi terparkir di kas daerah.

"Dana itu sudah siap anggarannya. Tahun lalu kan sudah kami siapkan Rp 50 miliar. Nah tahun ini kami juga sudah siapkan lagi Rp 130 miliar. Memang belum kami bayarkan semua. Karena pembayaran ini kan pakai termin anggaran," kata Sugiarta.

Sementara itu Sekkab Buleleng Gede Suyasa yang dihubungi terpisah

menyatakan hingga kini belum ada hal-hal yang memicu proyek revitalisasi Pasar Banyuasri mengalami kendala dari sisi pendanaan. Suyasa menyebut, proyek tersebut sebagian memang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran (DBH PHR) Kabupaten Badung.

"Memang dari PHR Badung itu ada Rp 25 miliar. Tapi itu untuk pendanaan tahun lalu. Itu sudah ditransfer dan sudah dibayarkan. Kalau untuk pendanaan tahun ini, tidak ada yang bersumber dari PHR Badung," kata Suyasa.

Menurutnya pada tahun 2019 lalu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran itu bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali sebesar Rp 25

miliar dan DBH PHR Badung sebesar Rp 25 miliar.

Sementara untuk tahun 2020 ini, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 130 miliar. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 94,3 miliar, DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 545,8 juta, DBH Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) sebesar Rp 2,4 miliar, DBH pajak rokok Rp 255 juta, BKK Pemprov Bali Rp 25 miliar, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 7,4 miliar.

Meski nantinya akan terjadi rasionalisasi anggaran, Suyasa memastikan pemerintah akan menyediakan anggaran yang cukup untuk proyek revitalisasi Pasar Banyuasri. Suyasa menyatakan proyek

tersebut masuk dalam daftar prioritas dalam pelaksanaan proyek fisik di Kabupaten Buleleng.

"Dana dari provinsi juga kami yakini akan tetap ditransfer. Karena ini proyek prioritas, kami usahakan tidak terkendala dari sisi pendanaan dan pembayaran. Jadi kontraktor pelaksana bisa melaksanakan proyek tanpa ragu. Tidak perlu khawatir pemerintah tidak sanggup membayar," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Buleleng mendesak pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk proyek revitalisasi Pasar Banyuasri. Dewan khawatir, rasionalisasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 70 miliar, akan berdampak pada proyek tersebut. (eps/gup)



Akui Korupsi, Siap Ganti Rugi

Saat Mantan Kepala LPD Tuwed Diperiksa sebagai Tersangka

NEGARA, Radar Jembrana—Dewa Putu Astawa, tersangka kasus korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tuwed, Melaya, Jembrana, menjalani pemeriksaan perdana di Kejari Jembrana, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan kepala LPD tersebut, mengakui perbuatannya dan akan bertanggungjawab pada hukum. Plus, siap mengembalikan kerugian negara.

Benarkah? Hal tersebut diungkapkan kusa hukum tersangka, Supriyono, usai mendampingi pemeriksaan sebagai tersangka, Rabu (3/3).

Menurutnya, tersangka sudah mengakui perbuatannya, dan akan bertanggungjawab



Sudah menyiapkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 400 juta dari total kerugian negara sekitar Rp 800 juta. Sisanya, aset berupa tanah sudah diserahkan pada LPD.”

SUPRIYONO

Kuasa Hukum Tersangka

jawabkannya. “Kalau tanggungjawabnya dia (tersangka, Red), akan bertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Nanti akan ada tersangka lain yang menggunakan kas LPD,” ujarnya.

Tersangka juga menginginkan, proses hukum cepat selesai. Serta sudah menyiapkan uang pengganti kerugian nega-



M. BASIRI/RADAR JEMBRANA

TAK MENGELAK: Pemeriksaan pertama Dewa Putu Astawa sebagai tersangka korupsi LPD Tuwed di Kejari Jembrana, kemarin.

ra sebesar Rp 400 juta dari total kerugian negara sekitar Rp 800 juta. Sisanya, aset berupa tanah sudah diserahkan pada LPD untuk dijual, jika ada lebih diminta untuk diserahkan pada keluarga tersangka. “Tersangka tidak berdalih apa-apa, bahkan mengakui bersalah,” jelasnya.

Dewa Putu Astawa, mantan kepala LPD Desa Pakraman Tuwed ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp 1 miliar. Khusus tersangka, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 800 juta. Perbuatan tersebut dilakukan sejak 2011 hingga 2018. Dari



KORUPSI LPD TUWED

1. Jumlah kerugian: Sekitar Rp 1 miliar
2. Tersangka pertama: Dewa Putu Astawa (sekitar Rp 800 juta)
3. Kejadian: 2011-2018
4. Modus: Pinjam pakai nama orang lain
5. Progres: Ngaku korupsi, siap ganti rugi

hasil penyelidikan, diduga tidak hanya melibatkan satu orang tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, *jungto* pasal 18 Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jungto* pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, *jungto* pasal 64 KUHP. Subsidiernya, tersangka dijerat pasal 3 UU 31/1999. (bas/djo)



INFRASTRUKTUR

Rekanan Janjikan Perbaikan

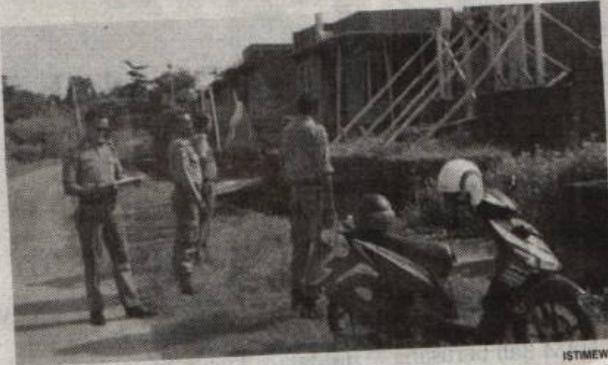
NEGARA, Radar Jembrana- Rekanan yang mengerjakan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, membantah berita; *Belum Setahun, Senderan dan Aspal Susah Jebol*, seperti diberitakan *Jawa Pos Radar Jembrana*, Selasa (3/3).

Pihak rekanan menyebukan, perbaikan jalan dengan beton tersebut disebabkan ada penurunan tanah setelah pembuatan senderan di kanan dan kiri jalan. Penurunan tanah tersebut disebabkan curah hujan tinggi. Sehingga membuat tanah yang ada di bawah aspal turun. Dalam perawatannya, untuk menutupi tanah yang turun, termasuk aspalnya cukup dengan tanah uruk. Tetapi, rekanan menutup dengan beton agar tanah yang turun lebih kuat. "Saat kami buat senderan kiri dan kanan, karena terjadi hujan terus menerus ada penurunan tanah pada urukan tanah. Tapi, tidak sampai membuat senderan sampai rusak parah dan jebol," kata I Kade Sudiatmika Direktur CV. Aditya Jaya Perkasa, rekanan yang mengerjakan proyek, kemarin. Selanjutnya, jalan akan dilapisi dengan beton, lapisan atas akan di-*hotmix* lagi.

Jadi, perbaikan tidak hanya dengan beton seperti saat ini. "Beton itu hanya penguat. Secepatnya akan kami lapisi lagi dengan *hotmix*," janjinya. Sebelumnya diberitakan, pembangunan senderan dan aspal jalan di Kelurahan Baler Bale Agung, Negara, dipertanyakan. Pasalnya, pengerjaan sejak September lalu sudah jebol. Bahkan, aspal juga rusak. Namun, perbaikan aspal ala kadarnya, hanya dengan tambalan rabat beton. Pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut, berdasarkan papan nama proyek, tertanggal 9 September 2019. Dikerjakan selama 90 hari atau 3 bulan. Anggaran yang dikeluarkan melalui APBD Jembrana sebesar Rp 8,65 juta. Namun, baru dua bulan selesai dikerjakan, sudah rusak. **(bas/djo)**



PELANGGARAN PERDA



ISTIMEWA

SIDAK: Petugas Satpol PP Gianyar menggelar sidak ke lokasi perumahan tak berizin, kemarin.

Lagi, Pengembang Nakal Tak Urus Izin

GIANYAR, *Radar Bali* - Pembangunan perumahan terus menjamur di kabupaten Gianyar. Namun, pengembang nekat membangun tanpa mengurus izin. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar pun tak bisa menyetop perumahan bodong itu.

Banyaknya perumahan tanpa izin lengkap itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar oleh Satpol PP Gianyar. Ada dua lokasi perumahan yang disasar. Yakni perumahan di Desa Temesi dan di Desa Tulikup. Keduanya berada di Kecamatan Gianyar.

Pembangunan perumahan yang disidak itu nyaris finishing. "Perumahan yang disidak tidak bisa menunjukkan izin," tegas Kepala Satpol PP Gianyar, Made Watha, kemarin (4/3).

Menurut Watha, pihaknya tidak bisa langsung menghentikan pembangunan perumahan tanpa izin itu. Watha beralasan ada prosedur yang harus dilalui. "SOP (Standa Operasional Prosedur) kami awali pembinaan dulu, kalau tidak digubris baru memberikan Surat Peringatan (SP)," jelasnya.

SP itu pun berjenjang. Yakni SP 1 hingga 3. "Kalau sampai diberikan SP 3 belum mengurus izin, baru kami stop pembangunannya," tegasnya.

Watha mengimbau pengembang taat aturan. "Kami ingin para pengusaha atau pengembang, bila mana membangun atau berusaha agar urus izin dulu. Kita *kan* negara hukum. Setiap warga taat aturan," pungkasnya. (dra/dot)

Edisi : Kamis 5 Maret 2020

Hal : 2



Proyek Pasar Banyuasri Terancam Mandeg

Dampak Rasionalisasi Anggaran di Buleleng

SINGARAJA, Radar Bali - Pelaksanaan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri terancam mandeg. Menyusul rencana rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkab Buleleng. Potensi itu muncul, karena sebagian dana proyek bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Informasi yang dihimpun *Jawa Pos Radar Bali*, proyek prestisius

tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp 159,5 miliar. Anggaran itu berasal dari beberapa sumber pendapatan. Diantaranya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali sebesar Rp 25 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) PHR Badung sebesar Rp 25 miliar, dan Rp 109,5 miliar sisanya berasal dari APBD Buleleng.

Seiring dengan wacana larangan pemungutan PHR di Bali, hal itu jelas berdampak pada proyek pasar. Setidaknya sumber anggaran sebesar Rp 25 miliar yang berasal dari DBH PHR Badung, terancam

hilang. Belum lagi sumber-sumber penganggaran yang berasal dari APBD Buleleng.

Potensi mandegnya proyek itu, terungkap saat Komisi II DPRD Buleleng melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, Selasa (4/3). Sidak itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa. Dalam rombongan terlihat anggota I Wayan Parwa, Made Sudiarta, Luh Sri Sami, Ketut Wirsana, dan I Wayan Indrawan.

Mangku Budiasa mengatakan, dari

sisi kualitas dan *progress* pekerjaan proyek, ia optimistis tidak ada persoalan yang terjadi. Hanya saja, rencana rasionalisasi anggaran hingga Rp 70 miliar yang dilakukan tahun ini, berpotensi berdampak pada proyek. "Kami akan komunikasi dengan BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Red), agar dana untuk proyek ini tidak dutak-atik. Jangan sampai ada kekurangan anggaran yang membuat proyek ini terhambat," kata Mangku.

Ia juga meminta agar pemerin-

tah benar-benar memerhatikan sumber pendanaan dalam proyek ini. Dewan tak ingin pemerintah sampai berhutang pada kontraktor pelaksana, gara-gara tak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai proyek. "Dimungkinkan ada utang daerah. *Yen be sing ngelah pis kan terpaksa ngutang*. Tapi kami tidak ingin hal itu terjadi. Apalagi ini proyek ikonik dan prestisius. *Lek atine*," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra mengatakan pihaknya akan segera melapor pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait proyek tersebut. Selain itu ia juga meminta dukungan dari dewan, agar sumber pendanaan pada proyek revitalisasi pasar bisa aman. "Sumber dananya banyak, ada dari Pemprov, (PHR) Pemkab Badung, dan APBD Buleleng sendiri. Kami akan lapor pada TAPD dan pimpinan. Kami yakin akan ada langkah strategis yang diambil," tukas dia. (eps/gup)



Jaya Negara dan Kadek Agus Disebut

DENPASAR, Radar Bali - Peran mantan perbekel Desa Dauh Puri Klod yang kini menjadi anggota DPRD Kota Denpasar, IG Made Wira Namiartha dalam pusaran kasus korupsi APBDes Dauh Puri Klod mulai terang benderang. Peran Namiartha diungkapkan para saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan terdakwa mantan bendahara Ni Putu Ariyaningsih, 33.

Sidang kemarin (3/3) siang sempat berjalan remang-remang selama kurang lebih 1,5 jam karena listrik padam. Selain membeber peran Namiartha, nama Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara juga ikut disebut. JPU I Nengah Astawa, I Kadek Wahyudi, dan Mia Fida pun mengorek keterangan dari lima orang saksi yang hadir.

Salah seorang saksi, I Nyoman Mardika di hadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Rumega mengungkapkan, Namiartha pernah datang ke rumahnya. Saat itu Namiartha menyebut Ariyaningsih ternyata telah memakai uang sebesar Rp 700 juta. Padahal, kepada Mardika sendiri Ariyaningsih waktu itu mengaku memakai uang kisaran Rp 100 juta lebih. "Wira (Namiartha) kemudian meminta agar Ariyaningsih mengaku terus terang memakai uang berapa. Katanya, nanti akan dibantu setelah menjadi anggota

dewan," ungkap Mardika.

Yang menarik, entah kebetulan atau tidak, sehari sebelum Ariyaningsih disidang benar-benar mendapat bantuan. Bahkan, bisa disebut keajaiban. I Made Agus Wiragama yang tak lain suami Ariyaningsih tiba-tiba datang ke Kejari Denpasar menyerahkan uang Rp 778 juta sebagai pengembalian kerugian negara. Segepok uang baru pecahan Rp 100 ribuan itu diklaim Agus sebagai hasil menjual 16 unit mobil bekas miliknya. Belakangan, dari penelusuran koran ini ternyata Agus tidak memiliki usaha jual beli mobil seperti yang dikoarkan.

Lebih lanjut Mardika menjelaskan, Namiartha kemudian meminta tolong dirinya membuat draf pernyataan untuk terdakwa Ariyaningsih bahwa telah memakai uang APBDes. Mardika kemudian membuat draf tersebut dengan kolom nominal dikosongkan.

Mardika sendiri mengaku mengetahui ada ketidakberesan APBDes setelah mendapat informasi adanya hasil monitoring dan evaluasi (monev) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kota Denpasar.

Dari hasil monev diketahui ada dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2017 sekitar Rp 1,8 miliar. Silpa tersebut tercatat di buku kas desa. Namun, setelah ditelisik, ternyata uang yang tersedia hanya Rp 900 juta, bukan Rp 1,8

desa untuk membiayai kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan," tukas Mardika. (san/yor)

miliar. Artinya ada selisih Rp 900 juta. "Antara catatan di buku dengan uang yang ada tidak cocok," imbuh Mardika.

Ditambahkan Mardika, sebelumnya juga sempat ada penelusuran beberapa kali dari tim audit internal desa. Di mana Mardika menjadi anggotanya. Masing-masing kaur dan kasi diaudit. Setelah ada audit, BPMPD meminta agar kasus ini diselesaikan secara internal. Tak lama kemudian, terdakwa dan perangkat desa lainnya yang merasa memakai uang desa mengembalikan uang. Tak terkecuali Namiartha ikut mengembalikan sekitar Rp 5 juta.

Menariknya adalah permintaan terdakwa Ariyaningsih agar diadakan audit independen. Sebab, Ariyaningsih merasa tidak sendirian menggunakan uang. Namun, setelah diinformasikan biaya audit internal mencapai Rp 50 juta, akhirnya terdakwa pasrah.

Terkait munculnya nama politisi PDIP Kadek Agus dan Jaya Negara, Mardika menyebut dirinya pernah diajak bertemu dengan dua orang tersebut. Jaya Negara meminta Inspektorat melakukan investigasi dan diselesaikan secara internal. "Kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan kendati Inspektorat sudah turun tangan. Sesampainya di inspektorat tidak ada tindakan tegas," beber pria yang juga berstatus kepala dusun itu.

Adapun modus pemakaian uang yaitu dengan cara kas bon. "Kegiatan yang tidak ada dalam RAB APBDes dibiayai oleh APBDes. Jadi, modusnya kas bon atau meminjam uang

Pencairan Dana Wewenang Perbekel dan Bendahara

KESAKSIAN Nyoman Mardika ini setali tiga uang dengan kesaksian Desak Ketut Istri Mahyuni, mantan kaur kesra yang saat ini menjabat Kasi Pelayanan Desa Dauh Puri Klod dan I Putu Wirawan, mantan kaur keuangan Desa Dauh Puri Klod. Dijelaskan Wirawan, dana Silpa terjadi selama dua periode Namiartha menjadi perbekel. Sejak 2010 disebut sudah ada Silpa, tapi jumlahnya sedikit. Silpa mulai menumpuk pada 2013 dan 2014. Meski terjadi Silpa yang tidak sesuai antara

buku dan realita, semuanya diam. Hal ini membuat hakim anggota

"Sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi, semua mendiamkan. Bendahara diam, perbekel tahu juga diam. Mendiamkan inilah yang menjadi pintu terjadinya korupsi," sentil hakim Hartono.

Menurut Wirawan, yang punya kewenangan mencairkan dana adalah bendahara dan perbekel. Selain keduanya tidak bisa. Sementara saksi Desa mengatakan, terdakwa melakukan kas bon mengajukan kegiatan lebih

dulu sementara kegiatan belum ada. Pengajuan kas bon ini tanpa disertai surat permintaan pembayaran (SPJ). Semua kasbon cair atas persetujuan Namiartha sebagai perbekel. "Setiap kasbon di-acc (disetujui, Red) perbekel atau kepala desa dengan tanda tangan di lembar kasbon," terang Desak.

Permintaan kas bon tanpa adanya SPP ini melanggar Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di mana setiap pencairan dana harus disertai bukti. (san/yor)



Pemkab Badung Ngaturang Bhakti Penganyaran di Pura Sad Kahyangan Batukau Tabanan

SERANGAKAIAN Karya Agung Pangurip Gumi, Mesaba Agung, Mapaselang, dan Pujawali Agung di Pura Sad Kahyangan Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan, Pemerintah Kabupaten Badung ngaturang bhakti penganyaran, Selasa (3/3). Rombongan bakti penganyaran Pemkab Badung dipimpin langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta istri, Wabup I Ketut Suiasa beserta istri, jajaran DPRD, Organisasi Perangkat Daerah dan TP PKK Kabupaten Badung.

Tampak semua prosesi upacara bakti penganyaran yang dilaksanakan rombongan Pemkab Badung berjalan dengan hikmat, mulai dari

pementasan tari wali topeng sidakarya, rejang sari yang dibawakan oleh Ny Seniasih Giri Prasta beserta tim TP PKK Kabupaten Badung, maupun puncak prosesi upacara penganyaran yang dipuput oleh yajamana karya Ida Pedanda Griya Sandan dan Ida Kubayan Lingsir sebagai pengraja karya berlangsung dengan lancar dan khushuk.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Tabanan yang sudah dengan tulus ikhlas menggelar upacara Pengurip Bumi di pura Batukau, yang memiliki tujuan sangat mulia untuk nunas kerahajengan dan kerahayuan alam semesta.



HUMAS PEMKAB BADUNG FOR RADAR BALI

NGAYARIN: Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa melaksanakan bhakti penganyaran di Pura Sad Kahyangan Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan Serangakaian Karya Agung Pangurip Gumi, Mesaba Agung, Mapaselang, dan Pujawali Agung, Selasa (3/3) kemarin.

"Pelaksanaan karya Pengurip Bumi tidak hanya untuk mendoakan jagat Tabanan, dan Bali semata tetapi juga untuk mendoakan NKRI agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa," imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta menambahkan pelaksanaan upacara penganyaran oleh Pemkab Badung sebagai wujud bakti ke hadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa dengan menghaturkan persembahan yang dilandasi dengan hati suci, yang merupakan kewajiban dalam hidup manusia. "Kami harapkan dengan melaksanakan upacara bakti nganyarin secara tulus ikhlas, dapat mewujudkan kedamaian di dunia. Semoga kita semua

dianugerahi kesehatan dan kelimpahan rejeki oleh Ida Betara yang melinggih di Pura Luhur Batukau," tambahnya

Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha yang ditemui di sela-sela ngaturang penganyaran mengatakan, serangkaian upacara bakti penganyaran di Pura Batukau, jajaran Pemkab Badung telah mempersiapkan seluruh sarana upacara penganyaran dari Badung. Tidak hanya banten upakara (bebangkit, pulagembal dan caru ayam siki), tapi termasuk juga tari wali dan sekaa gong.

Sementara itu Ketua Harian Karya Pura Batukau I Wayan Arya, mengatakan Karya Agung Pangurip Gumi ini berlangsung

selama 4 bulan sejak 11 November 2019 hingga berakhir 2 April 2020. "Sebenarnya puncak pujawali di Pura Batukau pada hari umanis galungan (20/2) yang lalu. Namun Pemkab Badung mendapat giliran nganyaran pada hari Selasa (3/3), pelaksanaan Karya Agung Pangurip Gumi ini dilaksanakan berdasarkan pawisik Ida Bathara yang berstana di Pura Batukau," ujarnya.

Pada Upacara Nganyarin tersebut Pemkab Badung menghaturkan Punia sebesar Rp. 300 juta rupiah yang diserahkan langsung oleh Bupati Giri Prasta kepada I Wayan Arya selaku ketua harian Karya Agung Pengurip Bumi. (adv/dwi/dit)



Kepala LPD Tuwed Tersangka

Dalam Dugaan Korupsi Rp 800 Juta

NEGARA, Radar Jembrana- Setelah proses penyelidikan dan penyidikan selama setahun, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana menetapkan tersangka dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tuwed. Kepala LPD Desa Pakraman Tuwed Dewa Putu Astawa ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Tersangka korupsi tersebut masih berpotensi menyeret tersangka lain.

Penetapan tersebut disampaikan Kepala Kejari (Kajari) Jembrana Pipiet Suryo Priarto Wibowo, Selasa (3/3). Menurutnya, penetapan Dewa Astawa sebagai tersangka setelah mengantongi dua alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Di antaranya; kerugian negara. "Hasil penyelidikan dan penyidikan, kepala LPD (Kepala LPD Desa Pakraman Tuwed Dewa Putu Astawa, Red) menjadi tersangka kasus korupsi," kata Kajari di Negara, kemarin.



FOTO-FOTO: M. BASIR/RADAR JEMBRANA

RUGIKAN NEGARA RP 800 JUTA: Tersangka Dewa Astawa saat diperiksa penyidik Kejari Jembrana. Kejari memberi sinyal bakal ada tersangka baru, dari total korupsi hampir Rp 1 miliar ini.

Modus korupsi yang dilakukan tersangka, dengan menggunakan nama orang lain untuk meminjam uang di LPD, serta menggunakan kas LPD. Perbuatan tersebut dilakukan sejak 2011 hingga 2018. Sehingga, mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 800 juta.



"Pinjaman dan kas nasabah dipakai sendiri untuk kepentingan pribadi," urainya, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra.

Dari hasil penyelidikan, diduga

tidak hanya melibatkan satu orang tersangka. Kejari masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga turut andil dalam dugaan korupsi tersebut.

Pasalnya, total kerugian negara dari korupsi tersebut hampir Rp 1 miliar. Sedangkan, satu tersangka dari hasil audit menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 800 juta. "Masih kami kembangkan, nanti akan ada tersangka lagi," tegasnya.

Selain dugaan korupsi kas LPD, korps Adhiyaksa ini, juga mendalami keluhan dari nasabah yang tidak bisa mengambil uang

Hasil penyelidikan dan penyidikan, kepala LPD (Kepala LPD Desa Pakraman Tuwed Dewa Putu Astawa, Red) menjadi tersangka kasus korupsi."

PIPIET SURYO PW
Kajari Jembrana

jungto pasal 64 KUHP.

Subsidiernya, tersangka dijerat pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan penyimpangan di LPD Tuwed sejak 2018. Bermula diduga ada oknum pengurus melakukan penyelewengan dana LPD Tuwed untuk kepentingan pribadi. Hasil audit keuangan dari buku keuangan, terdapat banyak kejanggalan catatan keuangan. Hingga akhirnya, ditemukan kerugian negara sekitar hampir Rp 1 miliar. (bas/djo)

yang disimpan di LPD. Nasabah khawatir, uang mereka turut digunakan untuk kepentingan pribadi oknum pengurus LPD.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya tidak melakukan penahanan. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, jungto pasal 18 Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,



Hadiri Karya “Melaspas Mendem Pedagingan” Pura Puseh dan Desa

Giri Prasta Ingatkan Persatuan “Ngewangun Yadnya” Krama Adat Pelaga

Seiring telah rampungnya pembangunan dan penataan pelinggih Ida Betara di Pura Puseh, Desa Adat Pelaga, Kecamatan Petang dan bertepatan dengan Hari Suci Kuningan, Sabtu (29/2) krama Desa Adat Pelaga melaksanakan upacara melaspas dan mendem pedagingan. Dalam upacara tersebut juga dihadiri I Nyoman Giri Prasta selaku Bupati sekaligus Krama Desa Adat Pelaga. Giri Prasta saat itu diberikan kehormatan ikut melaksanakan prosesi mendem pedagingan disalah satu pelinggih dan



FOTO HUMAS BADUNG FOR RADAR BALI

MENDEM PEDAGINGAN: Bupati Giri Prasta disaat menghadiri upacara melaspas dan mendem pedagingan di Pura Puseh, Desa Adat Pelaga, Kecamatan Petang dan bertepatan dengan Hari Suci Kuningan, Sabtu (29/2).

didampingi oleh Mangku Gede Pura Luhur Pucak Mangu, Camat Petang I Wayan Darma, Pj. Perbekel Desa Pelaga I Dewa Made Widana serta tokoh masyarakat setempat.

Pelaksanaan upacara ini

di-puput Ida Pedanda Gede Ngurah Putra Keniten Geria Kediri Sangeh. Rampungnya Pembangunan dan Penataan Pura Puseh dan Desa Adat Pelaga mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten

Badung Rp 3,5 miliar. Disela sambutannya Bupati Giri Prasta yang juga tokoh adat masyarakat Pelaga mengajak masyarakat untuk selalu bersatu dalam melaksanakan kegiatan di desa adat agar semua bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan.

Lebih lanjut Giri Prasta melakukan musyawarah dengan tokoh Desa Adat Pelaga mengenai rencana kerja desa adat, seperti merancang sejumlah agenda yakni penataan kantor desa adat dan LPD, ngodak tapakan ratu gede, nyekah bersama dan ngusaba desa dan ngusaba nini. “Sesuai dengan sastra agama ngusaba desa lan ngusaba nini seharusnya dilaksanakan setiap 30 tahun sekali oleh desa adat, namun kita di Desa

Adat Pelaga dalam kurun waktu 50 tahun terakhir belum melaksanakannya. Untuk itu, saya bersama tokoh dan pengelingsir desa adat sudah sepakat akan melaksanakan upacara ngusaba desa lan ngusaba nini di tahun 2021 dengan menyiapkan anggaran sebesar 1,8 miliar,”ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga mengatakan, mengingat banyaknya agenda penting desa adat yang akan dilaksanakan pihaknya meminta agar krama agung Desa Adat Pelaga untuk bersatu. “Bersatu setengah perjuangan kita sudah berhasil. Semoga dengan Yadnya tulus yang kita haturkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa, desa adat pelaga berserta isinya memperoleh kedamaian kebahagiaan dan kelimpahan rejeki,” paparnya. (adv/dwi/dit)



Badung Gelontor

Miliaran Rupiah

Untuk Penanggulangan Wabah Korona

MANGUPURA, Radar Bali - Pemkab Badung menyiapkan anggaran penanggulangan wabah korona. Tahap awal akan digunakan dana tak terduga sebesar Rp 3 miliar, jika tidak mencukupi maka akan dilakukan pergeseran anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa menerangkan pihaknya saat ini fokus dalam penanganan wabah korona. Untuk anggaran dimanfaatkan dana tak terduga sebesar Rp 3 miliar. "Kalau anggaran dana tak terduga masih kurang, akan lakukan pergeseran anggaran," jelas Adi Arnawa dalam rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Corona Virus Desease (Covid-19), Senin (16/3).

Lebih lanjut, Adi Arnawa yang juga sebagai Ketua Penanggulangan Corona Virus Desease (Covid-19) Kabupaten Badung mengakui rencana aksi telah disiapkan, dan rencananya besok (Selasa, hari ini) masing-masing bidang akan memberikan laporan rencana aksi termasuk perencanaan anggarannya. Selain itu, ia juga mengeluarkan edaran di antaranya mengenai kegiatan belajar mulai tingkat PAUD, TK, SD dan SMP dilakukan di rumah dengan pembelajaran sistim online, serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah diupayakan dilakukan di rumah terkecuali untuk pelayanan publik. "Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir persebaran virus korona," ujar pejabat asal Pecatu ini.

Lebih lanjut, pengadaan thermometer scanner dilakukan dan dibagikan ke kantor-kantor desa, pengadaan masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan ke ruang-ruang publik termasuk obyek-obyek wisata. Yang tak kalah penting menurutnya, RS Mangusada harus siap dalam penanganan pasien korona. Selain itu juga akan menyediakan call center, yang saat ini sedang di proses oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Secara terpisah Kepala Diskominfo Badung IGN Jaya Saputra menyatakan sedang berkoordinasi dengan pihak Telkom. "Untuk call center, sedang kita koordinasikan dengan Telkom," pungkasnya. (dwi/dot)



Siapkan Tambahan Anggaran Rp 12,8 Miliar

SEMENTARA itu, setelah melalui penyisiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jembrana, akhirnya terkumpul sementara anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 12,8 miliar. Anggaran tersebut, berasal dari dana intensif daerah (DID) dan penyisiran anggaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah

(OPD) di Jembrana.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jembrana I Made Sudiada mengatakan, berdasarkan hasil penyisiran anggaran yang telah dilakukan, sementara sudah ada anggaran terkumpul sebesar Rp 7,8 miliar dari DID, ditambah anggaran dari OPD sebesar Rp 5 miliar. Jadi sementara terkumpul anggaran Rp 12,8 miliar.



DOK. RADAR JEMBRANA

SIAP ATASI COVID-19: Sekkab Jembrana I Made Sudiada.

Anggaran hasil penyisiran untuk penanggulangan Covid-19 tersebut, di antaranya untuk membeli alat pelindung diri. "Nanti dana itu kami taruh di dana tak terduga. Akhirnya (anggaran) besok (hari ini, Red)," jelas Sekkab, kemarin.

Anggaran tersebut, berdasarkan dari hasil penyisiran anggaran sementara, karena belum dipotong kegiatan perjalanan

dinas. Karena berdasarkan kebijakan dari Bupati Jembrana I Putu Artha, dengan perkiraan 2,5 bulan tidak melakukan perjalanan dinas, maka dipotong 20 persen. "Mudah-mudahan kami dapat banyak (anggaran, Red). Karena masih dirapatkan lagi menyisir anggaran. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, untuk penanggulangan Covid-19," harapnya. (bas/djo)



Kejaksanaan Bongkar Korupsi

BUMDes Puncak Sari

SINGARAJA, Radar Bali - Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu, menemui titik terang. Kejari Buleleng yang membidik dugaan penyimpangan dana gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara dibidik sejak tahun 2019 lalu dengan kerugian negara ditaksir jutaan rupiah. Seorang pengurus BUMDes pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Inisialnya NJ, dan hingga saat ini belum ditahan.

"Saat ini kami sudah tetapkan tersangka dengan inisial NJ salah satu pengurus BUMDes Puncak Sari, Busungbiu. Terbukti dia melakukan perbuatan melawan hukum perkara korupsi," kata Kasi Intel AAN. Jayalantara di dampingi Kasipidsus I Wayan Genip kemarin (19/3). Sekadar diketahui mencuat

kasus ini sejatinya sejak 2018 lalu. Awalnya Desa Puncak Sari mendapat suntikan dana Gerbangsadu sekitar Rp 1 miliar lebih dari Pemprov Bali.

Dana tersebut kemudian dikelola melalui BUMDes di desa dengan dua bidang usaha. Yakni unit simpan pinjam dan unit toko usaha. Masing

dengan modal Rp 400 juta. Sisa dana gerbang sadu digunakan untuk pembangunan fisik unit usaha dan pembiayaan operasional.

Namun setelah berjalan terjadi pengelolaan keuangan yang tidak normal. Mulai dari uang di BUMDes diduga digunakan oleh pengurus hingga diduga membuat laporan keuangan fiktif soal pengelolaan BUMDes. Hingga BUMDes mengalami pailit. Kasus ini muncul

dipermukaan sehingga dilakukan penyelidikan oleh Kejaksanaan Negeri Buleleng. Demikian, untuk kerugian pasti masih menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

Inspektorat. "Kerugian Negara kami taksir sekitar Rp 130 juta lebih dari perkiraan penyidik. Tetapi kami tetap menunggu hasil audit lembaga berwenang. Mudah-mudahan bisa turun secepat dari BPKP dan Inspektorat," tukasnya. (uli/gup)



Proyek Pasar Banyuasri

Diklaim On Progress

■ Lebih Target, Pondasi dan Struktur Tiang Beton Terpasang ■ Anggaran Rp 159 Miliar, Jadi Proyek Prestisius Buleleng

SINGARAJA, Radar Bali – Pemerintah mengklaim proyek revitalisasi Pasar Banyuasri yang kini tengah berjalan, masih *on progress*. Meski mulai terjadi perlambatan ekonomi sebagai dampak merebaknya penyakit covid-19, proyek diklaim masih sesuai dengan kalender kerja.

Hingga Minggu (29/3), *progress* pengerjaan Pasar Banyuasri disebut sudah mencapai angka 30 persen. Capaian itu lebih tinggi tiga persen dari target pengerjaan. "Kalau melihat kalender kerja, semestinya di angka 27 persen. Tapi sekarang sudah 30 persen. Artinya plus tiga persen," kata Plt. Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra, saat dihubungi kemarin (30/3).

Khusus untuk bangunan utama, pondasi dan struktur tiang beton di lantai pertama sudah seluruhnya terpasang. Bahkan kini sudah masuk proses pengerjaan untuk lantai dua. Selain itu bangunan ruko di bagian barat pasar, struktur bangunannya juga mulai dikerjakan.

Adiptha mengatakan, saat ini sebenarnya relative tidak ada masalah terhadap jalannya proyek. Karena beberapa bahan bangunan sudah datang lebih awal, sebelum masalah covid-19 muncul. Selain itu pekerja yang sudah ditempatkan juga cukup

banyak.

Namun untuk jangka panjang, tak menutup kemungkinan akan ada hambatan. "Pertama *kan* masalah pengiriman bahan, kemudian kalau kurang tenaga, kita harus cari tenaga. Kondisi paling berat itu sebenarnya fluktuasi harga. Karena ada bahan yang harus beli di luar Bali, sedangkan harganya juga sekarang sudah mulai naik," imbuh Adiptha.

Meski begitu, Adiptha cukup optimistis proyek bisa berjalan sesuai target. Sehingga seluruh pekerjaan bisa tuntas pada Desember mendatang, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani. Sekadar diketahui, proyek revitalisasi Pasar Banyuasri memakan dana hingga Rp 159,52 miliar. Proyek itu diharapkan tuntas pada akhir tahun 2020 mendatang. Proyek ini sekaligus menjadi proyek yang paling prestisius di Buleleng dalam 10 tahun terakhir. (eps/gup)



Tangani Korona, Siapkan Rp 15 M

- RS Pratama Giri Emas Tak Terima Pasien Umum
- Operasional dan Gizi Pasien Digelontor Rp 5,2 Miliar

SINGARAJA, Radar Bali - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran hingga Rp 15 miliar untuk penanganan Korona atau covid-19. Anggaran tersebut sebagian besar akan difokuskan untuk mendukung pengadaan alat dan operasional di RS Pratama Giri Emas. Mengingat rumah sakit itu kini telah dijadikan sebagai rumah sakit isolasi.

Pantauan *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (17/3), rumah sakit sudah tak lagi menerima pasien sejak kemarin. Pasien yang ada di RS Pratama pun sudah sembuh dan diizinkan pulang. Alat-alat medis yang berada di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dipindahkan ke ruang perawatan.

Selama masa siaga darurat covid-19, operasional RS Pratama Giri Emas akan berada di bawah RSUD Buleleng. "Sekarang status RS Pratama adalah bagian dari RSUD Buleleng. Jadi perlakuan dan penanganan medisnya, sesuai dengan standar RSUD Buleleng yang sudah tipe B. Khusus pasien yang dirawat dengan perlakuan isolasi, yang dirawat di sana," kata Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat memberikan keterangan pers, Selasa pagi.

Untuk mendukung operasional RS Pratama sebagai rumah sakit isolasi, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp 9,8 miliar untuk pengadaan alat medis. Seperti ventilator, monitor pasien, alat radiologi, serta beberapa kebutuhan

ANGGARAN BULELENG LAWAN KORONA

15 MILIAR

DANA sebesar itu digunakan untuk pengadaan alat dan operasional RS Pratama Giri Emas sebagai RS isolasi.

SATU KOMANDO

PASIENT yang dirawat di RS Pratama Giri Emas ditangani sesuai standar RSUD Buleleng. Untuk ruang isolasi disiapkan anggaran Rp 9,8 miliar. Dan Rp 5,2 miliar untuk operasional termasuk pemenuhan gizi pasien.

DUA SISI

PASIENT juga akan diberikan jamu atau loloh yang mengacu pada usadha di Bali. Sehingga peningkatan imunitas tubuh bisa lebih maksimal

GRAFIS: OT. DEWANTARA/RADAR BALI

lain. Termasuk pengadaan alat pengaman diri (APD) berupa pakaian hazmat yang memakan biaya Rp 2,2 miliar. Total ada seribu set pakaian yang digunakan.

Selain itu pemerintah juga menyiapkan anggaran hingga Rp 5,2 miliar untuk biaya operasional. Termasuk pemenuhan gizi pasien. Khusus untuk pemenuhan gizi, pemerintah menyiapkan asupan gizi yang lebih baik. Termasuk beberapa jenis loloh yang mengacu pada usadha di Bali. Sehingga peningkatan imunitas tubuh bisa lebih maksimal.

Agus memperkirakan rumah sakit tersebut baru akan siap menerima pasien pekan de-

pan. Sebab pemerintah butuh waktu menyediakan alat-alat medis yang dibutuhkan. Untuk sementara, pasien-pasien dalam pengawasan, akan dirawat di RSUD Buleleng hingga RS

Pratama Giri Emas siap. "Hari ini ada perbaikan ringan, dalam dua hari sudah selesai. Nanti tiga hari lagi beberapa alat medis sudah datang bertahap sampai

minggu depan. Alat-alat ini perlu waktu seminggu pengiriman. Sementara melengkap, kami akan tetap gunakan RSUD Buleleng dulu," tegas Agus. (eps/gup)



Lagi, Jalan Penghubung 13 Banjar Amblas

AMLAPURA, NusaBali

Jalan pelintas penghubung 13 banjar yang melintasi sungai Embah Epi di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Karangasem, amblas lagi setelah diterjang banjir, Minggu (15/3). Pengusaha galian C kembali melakukan pengukuran, Rabu (18/3). Hanya saja pengukuran bertahan selama dua jam karena kembali diterjang banjir.

Tokoh Banjar Nangka, I Wayan Atot Suragata, mengatakan selama jalan pintas amblas, terpaksa mencari jalan melingkar. "Saya melintasi jalan melingkar ke arah barat melewati Tukad Taksu. Jika di Tukad Taksu banjir, maka kesulitan beraktivitas ke luar rumah," ungkap Wayan Atot Suragata, Rabu (18/3). Pejalan Desa Adat Nangka, I Made Junita, mengungkapkan

setiap hujan terjadi banjir dan material digunakan menguruk jalan hanyut sehingga tidak bisa melintas menyeberangi sungai. Diharapkan pemerintah membangun jembatan agar warga di 13 banjar tidak kesulitan setiap musim hujan.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Ketut Arimbawa mengaku kebingungan melakukan penanganan jalan amblas yang melintasi

sungai Embah Api. "Pengukuran itu sifatnya penanganan sementara. Begitu turun hujan, amblas lagi. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Tahun 2020 ini persiapan membangun jembatan," jelas Ida Ketut Arimbawa. Sementara Kadis PUPR Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, membenarkan telah ada anggaran di APBD 2020 untuk membangun jembatan. 7 k16

Edisi : Kamis 19 Maret 2020

Hal : 8



Pasar Badung Belum Bisa Terapkan Pungutan Online

DENPASAR, NusaBali

PD Pasar Kota Denpasar belum bisa menerapkan pungutan online di Pasar Badung. Pasalnya, satu-satunya pasar dari 16 pasar yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar ini belum ada ketetapan resmi atas retribusi di Pasar Badung.

Dirut PD Pasar Kota Denpasar, IB Kompyang Wiranata saat dihubungi, Kamis (12/3) mengatakan, pihaknya belum sepenuhnya bisa menerapkan sistem online dalam pungutan di pasar yang dinaungi oleh PD Pasar. Hal itu karena Pasar Badung belum ditetapkan proses pengelolannya dan masih dalam kajian.

Namun pasar lainnya sudah sepenuhnya melakukan pungutan baik pungutan sewa dan biaya operasional harian juga sudah menggunakan sistem online. Nantinya, pada pertengahan tahun 2020, pihaknya akan melakukan pungutan selain sewa, biaya operasional juga akan menggunakan sistem online. "Ya karena belum ada ketetapan resmi atas retribusi, karena bangunan belum sepenuhnya hak pengelolaan oleh Perumda Pasar," jelasnya.

Untuk pungutan lain, selain sewa dan biaya operasional seperti pungutan tambahan pemakaian listrik, atau kebersihan pihaknya mengaku sedang

menyiapkan sistem online juga. Dalam pertengahan tahun 2020 sudah bisa direalisasikan pengoperasian alatnya.

Untuk anggaran penerapan pungutan online selain biaya operasional dan sewa ini, kata Wiranata, biaya yang dibutuhkan tak lebih dari Rp 100 juta. "Setelah beberapa kali presentasi dari vendor-vendor, untuk retribusi online pungutan tambahan dibutuhkan tak lebih dari Rp 100 juta untuk semua pasar," katanya.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kebocoran pemasukan. Juga untuk mengurangi tunggakan pembayaran retribusi pasar. Karena pihaknya menemukan ada penyimpangan

di lapangan yang dilakukan oleh oknum bawahannya yang nakal. Dimana ada oknum yang tidak melakukan penyetoran pungutan dan ketika dicek ternyata pedagang sudah membayar.

Untuk e-retribusi yang diberlakukan pihaknya bekerjasama dengan Bank BPD Bali dengan menggunakan system registrasi melalui rekening. Dalam hal ini pedagang membuat rekening pada bank yang diajak kerjasama. Dengan demikian pedagang akan melakukan pembayaran secara online baik itu untuk pembayaran biaya operasional pedagang (BOP) ataupun biaya sewa melalui rekening yang dimiliki.

"Dengan sistem ini peda-

gang hanya perlu menunjukkan nomor rekening yang telah didaftarkan oleh petugas. Proses pembayaran akan dibantu oleh petugas dari PD Pasar dengan menggunakan mesin electronic data capture (EDC)," katanya.

Selain memberikan kemudahan bagi pedagang dalam bertransaksi serta mengajak pedagang memanfaatkan media digital, dengan e-retribusi ini juga mampu membantu meningkatkan pendapatan PD Pasar. Pemberlakuan e-retribusi baik untuk kios dan los di pasar tradisional dikatakannya berpengaruh terhadap menurunnya tunggakan serta mempercepat khas masuk ke PD Pasar. mis

Edisi : Jumat, 13 Maret 2020

Hal : 3



Atasi Banjir,

Dinas PUPR Bangun Sodetan di Banjar Dajan Peken ^v

MANGUPURA, NusaBali

Dalam upaya mengatasi masalah banjir di Jalan Raya Mengwitani, Kecamatan Mengwi, khususnya di Banjar Dajan Peken, Desa Mengwitani, Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang (PUPR) Badung membangun proyek sodetan. Pengerjaan proyek dimulai Kamis (12/3).

Kepala Dinas PUPR Badung IB Surya Suamba, menjelaskan proyek sodetan ini termasuk prioritas yang digarap oleh PUPR. Pasalnya kawasan tersebut menjadi langganan banjir setiap musim hujan.

"Kalau musim hujan, kerap terjadi banjir yang airnya masuk ke sejumlah rumah di Banjar Dajan Peken, akibat limpahan air



DINAS PUPR Badung membangun sodetan di Jalan Raya Mengwitani Banjar Dajan Peken, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kamis (12/3). • IST

yang tidak mampu ditampung oleh drainase. Makanya salah satu solusi, harus dibuatkan sodetan ke arah timur menuju sungai," tutur Surya Suamba.

Sebelum melaksanakan proyek, Dinas PUPR Badung telah meminta izin kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Bali, karena jalan tersebut statusnya jalan nasional. "Satker sudah memberikan izin terkait pembangunan sodetan jalan tersebut, makanya tadi pagi (kemarin) mulai kami kerjakan," kata Surya Suamba.

Mengenai anggaran pembangunan sodetan, birokrat asal Tabanan tersebut men-

yatakan sebesar Rp 100 juta. Anggaran tersebut termasuk untuk normalisasi drainase ke timur menuju sungai.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Banjar Dajan Peken, Desa Mengwitani, Nyoman Gede Wiratemaje, mengungkapkan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah merespons aspirasi masyarakat Mengwitani. "Hampir setiap musim penghujan rumah warga kami, termasuk rumah saya kebanjiran," ucapnya.

Dia berharap, dengan selesainya nanti proyek ini tidak akan lagi terjadi banjir di wilayah tersebut. Dengan demikian, warga tidak lagi cemas saat datang musim penghujan. asa

Edisi : Jumat 13 Maret 2020

Hal : 2



Dukung dan Wujudkan Kota Layak Anak

Desa Didorong Alokasikan Anggaran



Rapat Dengar Pendapat Pansus II, Senin (9/3), membahas Ranperda Kota Layak Anak di ruang Komisi IV DPRD Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali

Pemerintah Desa dan Kelurahan di Buleleng didorong mengalokasikan anggaran untuk mendukung mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Lima klaster masuk dalam prioritas utama yang harus disiapkan. Mulai dari penjaminan hak sipil, lingkungan keluarga yang nyaman, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak yang tersangkut kasus hukum. Penganggaran di masing-masing desa dan kelurahan segera akan memiliki dasar setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KLA disahkan.

Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng, Made Arya Sukerta ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pansus II DPRD Buleleng, Senin (9/3), tak menampik jika masih ada banyak hal yang kurang mewujudkan KLA. Sehingga penggodokan Raperda KLA terus digenjut agar cita-cita Kabupaten Buleleng menjadi KLA bisa segera tercapai.

"Masih ada banyak yang kurang untuk menjadi Kota Layak Anak. Setidaknya ada lima klaster yang harus dibangun. Misalnya saja kebebasan anak bermain sekarang tidak di semua tempat ada, paling di

rumah atau beberapa Taman Kota. Untuk menjadi kota layak anak harusnya semua tempat fasilitas pemerintah menyediakan tempat itu," jelasnya.

Klaster lainnya juga menjadi fokus penyertaan dalam Raperda KLA yakni kesempatan berekspreasi yang dimediasi oleh event-event. Sehingga dengan hal ini masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan membuat program kegiatan untuk memberikan daya dukung kegiatan anak.

Mantan Asisten I Setda Buleleng ini juga mengatakan untuk menjadi Kabupaten KLA, tidak dapat didukung oleh satu atau dua OPD saja. Seluruh OPD termasuk peran desa sangat menentukan pencapaian KLA di Buleleng. Menurut Arya Sukerta, persyaratan menjadi KLA sangat kompleks dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. "Di desa anggarannya sebenarnya ada hanya belum diatur dan dialokasikan ke situ karena belum ada Perda. Setelah Perda ini sah, desa atau kelurahan bisa alokasikan anggaran baik dari dana desa, alokasi dana desa, APBD, pajak atau PAD murni desa," jelas Arya Sukerta yang juga mantan Kadishub Buleleng itu.

Sementara itu Ketua Pansus II DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari, mengatakan dari RDP itu menyebut pihaknya

menyepakati Raperda yang diajukan oleh eksekutif, meski ada beberapa catatan. Salah satunya dari segi penganggaran yang sejauh ini hanya bersumber dari APBD saja, dewan menginginkan tak hanya pemerintah tetapi juga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apsai) ikut berperan aktif. "Kami harapkan pengusaha juga berperan aktif dan disertakan dalam Perda, sehingga bersifat mengikat dan memaksa," ucap Rani.

Selain juga yang menjadi catatan khusus biaya visum rumah sakit ketika ada kasus kekerasan seksual pada anak agar dapat digratiskan rumah sakit. Anggota DPRD Buleleng asal Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan ini juga akan menyarankan rumah sakit menyediakan areal khusus anak yang steril dari berbagai macam penyakit.

Setelah ini Pansus II DPRD Buleleng juga berencana akan menggelar RDP kembali untuk mendengar saran dan masukan dari seluruh praktisi yang berhubungan langsung dengan anak. "Raperdanya sudah hampir final, tinggal undang elemen masyarakat yang berkaitan dengan anak, nanti akan kami laporkan kembali ke Ketua dan mintakan pertimbangan dan saran untuk Perda ini," jelas dia. **k23**



Dewan Badung Terima LKPJ Bupati Tahun 2019



KETUA DPRD Badung I Putu Parwata (kanan) menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2019 dari Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya, Senin (9/3).

MANGUPURA, NusaBali

DPRD Kabupaten Badung menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung, Senin (9/3). Laporan

pelaksanaan APBD 2019 ini diserahkan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya, diterima

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa, Sekretaris Dewan Badung I Gusti Agung Made Wardika.

Ditemui usai menerima LKPJ, Putu Parwata mengapresiasi Bupati dan Pemkab Badung yang sudah tepat waktu menyelesaikan dan menyerahkan LKPJ kepada DPRD. LKPJ Bupati atas APBD Badung 2019 ini akan segera dibahas di dewan.

"Kami apresiasi pemerintah daerah telah menyerahkan LKPJ tiga bulan setelah tahun anggaran selesai. Kami akan jadwalkan lebih lanjut untuk pembahasannya," kata Putu Parwata.

Menurutnya, dewan akan melakukan pembahasan dengan detail mengenai program yang telah terlaksana sesuai dengan APBD yang sudah disepakati. "Pelaporan LKPJ merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi, karenanya kami akan membentuk pasus apa yang sudah disepakati apa sudah dilaksanakan," tutur Parwata.

Dikatakannya, pansus akan mengevaluasi setiap program yang telah disepakati secara detail. Hal ini berfungsi mengetahui apakah program yang telah dicanangkan di 2019 sudah direalisasikan atau belum. "Nanti akan ada koreksi-koreksi, catatan-catatan, dan rekomendasi, setelah itu baru dipaparkan dalam sidang," tandas Parwata. @ asa

Edisi : Selasa, 10 Maret 2020

Hal : 2



Inspektorat Agendakan Periksa DPT Pura Dalem Tengaling



• NUSABALI/EKA SRI
Sekretaris Inspektorat Bangli,
I Wayan Nuarta.

BANGLI, NusaBali

Inspektorat Bangli segera periksa kegiatan fisik di Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli. Salah satu objek sasaran yakni pembuatan dinding penahan tanah (DPT) di Pura Dalem Tengaling. Baru dibangun beberapa bulan, DPT sudah hancur. Penegak hukum sudah turun menggali informasi.

Sekretaris Inspektorat Bangli, I Wayan Nuarta, mengatakan Inspektorat Bangli secara rutin melakukan pemeriksaan reguler menasar 50 persen jumlah desa. "Jumlah petugas pemeriksa masih kurang maka pemeriksaan

reguler tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sehingga pemeriksaan mengambil 50 persennya," jelas Wayan Nuarta, Senin (9/3). Dikatakan, pembangunan DPT di Pura Dalem Tengaling Desa Tamanbali jadi sorotan karena baru dibangun sudah jebol.

Wayan Nuarta menjelaskan, kegiatan fisik pembangunan DPT di Pura Dalem Tengaling menggunakan anggaran Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) APBDes Tamanbali tahun 2019. "Sejauh ini belum ada pengaduan dari masyarakat. Pekerjaan yang hancur tersebut sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangli oleh panitia," ungkap Wayan Nuarta. Dipastikan, kegiatan fisik ini tidak luput dari pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan reguler akan dilihat pertanggungjawaban dari realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. "Tujuan utama pemeriksaan reguler agar setiap desa bisa menjalankan pemerintahannya dengan tertib administrasi," terangnya. Aspek pemeriksaan, salah satunya keuangan dan pemeriksaan fisik di lapangan. Sementara Perbekel Desa Tamanbali, I Nyoman Suargita, mengaku sudah siap jika ada pemeriksaan. Sebab segala kegiatan sudah ada pelaporannya. esa



DPRD Temukan Dua Aset Mubazir

TABANAN, NusaBali

Pansus VI Pokja Aset DPRD Tabanan getol melakukan pengecekan aset Pemkab Tabanan berupa tanah di dua lokasi berbeda yakni Desa Beraban dan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Senin (9/3). Terungkap aset yang dicek ke lapangan itu masih mubazir atau belum dimanfaatkan.

Aset tanah di Desa Beraban, Kecamatan Tabanan kawasan Pantai Nyanyi seluas 1,55 hektare sudah ada dua orang yang ingin bekerjasama. Desa Adat Beraban ingin bekerjasama untuk membuat wahana air, dan perseorangan ingin bekerjasama untuk membuat restoran.

Namun menjadi perhatian khusus yakni aset tanah di Desa Pangkung Tibah seluas 2,25 hektare belum ada perencanaan matang. Dinas Pariwisata menyebutkan sudah ada rencana membuat pengaman pantai sekaligus akses jalan dan membangun pondok selancar.

Cek aset Pemkab tersebut diikuti seluruh anggota Pansus VI Pokja Aset. Dari esekutif turut turun ke lapangan dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Bagian Aset dan Dinas Pariwisata.

Koordinator Pokja Aset I Gusti Nyoman Omardani mengatakan, Pokja Aset, sesuai perintah ketua pansus, mendata aset-aset yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD). "Di beberapa tempat seperti di Kecamatan Baturiti dan Terminal Pesiapan, Tabanan sudah kami cek. Kini kami fokus di Desa Beraban dan Desa Pangkung Tibah," ujarnya dilokasi.

Aset di Desa Beraban dari pantauan dewan, berpotensi dikembangkan secara optimal. Sudah ada perencanaan dan beberapa orang yang ingin melakukan kerjasama baik orang perorangan maupun dari Desa Adat Beraban. "Hanya saja kami di Pojka tidak ada kapasitas dalam urusan sewamenyewa," imbuhnya.

Kendati demikian, Omardani dan beberapa anggota Pokja Aset sudah memberikan pertimbangan kepada Dinas Pariwisata untuk mengkaji. Karena dewan tak ingin dalam pengelolaan aset ada intervensi dan kepentingan luar. Biar murni bahwa pengelolaan itu untuk kepentingan daerah



• NUSABALI/DESAK

DPRD Tabanan cek aset Pemkab Tabanan di kawasan Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan, Senin (9/3).

dan bermanfaat kepada daerah. "Contohnya sewa, sewa itu agar diperhitungkan secara ekonomi bisa meningkatkan PAD. Apakah nanti sewa itu bisa memberikan peningkatan PAD atau tidak. Begitu pun nanti kerjasama harus dikaji secara jelas. Dan pada intinya jangan sampai aset tertidur tidak bermanfaat," bebernya.

Dengan itu, aset di Desa Beraban bisa dimanfaatkan dan sekitar 1 hektare masih rawa. Termasuk juga nanti ketika ada pembangunan kerjasama tempat sandar jukung nelayan juga harus diperhatikan. Menurut Omardani, aset di Desa Pangkung Tibah, dewan meminta kepada Dinas Pariwisata untuk menyiapkan perencanaan terlebih dahulu. Walaupun saat ini belum ada akses jalan menuju lokasi aset, namun tetap direncanakan supaya diketahui kelemahan dan kesulitan. "Kalau tidak ada perencanaan bagaimana mengembangkan kawasan ke depan. Minimal perencanaan harus ada," tegasnya.

Salah satunya, menurut Omardani, untuk memanfaatkan aset bisa membuat senderan pantai. Sehingga secara otomatis bisa dimanfaatkan menjadi aset daerah. "Yang seperti ini harus dipertimbangkan, jangan didiamkan dan tidak ada perencanaan berkaitan dengan aset-aset. Jadi aset ini masih tidur," katanya.

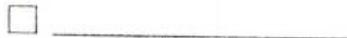
Omardani mengaku melihat titik aset yang sebelumnya ditinjau, dewan mendorong dari segi aturan juga harus dioptimalkan. Dimana masing-masing DTW seperti Tanah Lot, DTW Bedugul dan

DTW yang lain minimal sudah ada payung hukum yang mengatur. Dewan meminta kepada Dinas Pariwisata agar payung hukum itu diprioritaskan. Karena payung hukum tersebut menjadi salah satu upaya tata kelola di masing-masing DTW.

Dewan juga meminta berkaitan dengan pengelolaan aset agar setiap mengambil keputusan harus berkoordinasi dengan DPRD. Supaya nantinya ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan DPRD. "Saya tegaskan dalam pengelolaan aset daerah jangan sampai ada intervensi dan hanya memikirkan keuntungan sesaat. Namun harus memikirkan pertimbangan dan keputusan jangka panjang sehingga harus dipertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan," tegas politisi asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Tabanan ini.

Ditambahkan oleh Ketua Pansus VI I Nyoman Arnawa alias Komet, pansus dibentuk agar leluasa mengecek aset Pemkab Tabanan. Dasarnya adalah untuk mengetahui keberadaan dan kejelasan administrasi. "Itu tugas pokok Pansus VI untuk mengetahui aset Pemkab," jelasnya.

Kata dia, dari aset yang ada perlu dilakukan kajian agar semuanya bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan. Yang penting untuk meningkatkan PAD. "Jadi disini juga perlu ada anggaran dari Pemkan Tabanan untuk mendorong mengembangkan aset yang ada," imbuh politisi asal Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan ini. **des**



✓ Lomba Ogoh-ogoh, Wabup Kembang Ajak Pemuda Adu Ide dan Kreativitas



WABUP Jembrana I Made Kembang Hartawan menyerahkan bantuan dana pembuatan ogoh-ogoh di Gedung Pendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Sabtu (7/3).

NEGARA, NusaBali

Pemkab Jembrana kembali menggelar lomba ogoh-ogoh serangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942. Selain melestarikan tradisi, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan berharap, lomba ogoh-ogoh ini menjadi ajang unjuk ide dan kreativitas sekaa teruna (ST).

"Melalui lomba ini, anak-

anak muda bisa menyalurkan kreasinya, ide-ide baru yang visioner. Silakan tampilkan kreativitas yang dimiliki sesuai koridor yang ditetapkan panitia. Ide-ide segar itu juga membuat lomba ogoh-ogoh ini akan makin menarik setiap tahunnya," ujar Wabup Kembang, saat acara sosialisasi lomba ogoh-ogoh di hadapan ratusan anggota ST se-Jembra-

na, di Gedung Pendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Sabtu (7/3).

Dalam acara sosialisasi yang juga dihadiri para perbekel/lurah, bendesa adat, camat, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) serta Majelis Desa Adat (MDA) Jembrana itu, Wabup Kembang mengaku selain adu kreativitas, harapan terbesar lainnya tentu akan tumbuh semangat gotong royong di antara anggota ST.

Terkait penilaian dalam lomba nanti, Wabup Kembang menjamin, para juri bekerja profesional. Penilaian dilakukan seobjektif mungkin, tanpa intervensi pihak manapun. "Saya minta kepada para juri, usai melaksanakan penilaian, langsung dibahas, sehingga hasilnya bisa segera disampaikan usai lomba," tegas Wabup Kembang, yang sekaligus menyerahkan bantuan dana pembuatan ogoh-ogoh kepada ST se-Jembrana.

Panitia Lomba Ogoh-ogoh Kabupaten Jembrana I Ketut Arya Tangkas mengatakan, untuk mendukung pembuatan ogoh-ogoh, Pemkab Jembrana

memberikan bantuan kepada ST. "Lomba kali ini akan diikuti 284 ST se-Jembrana. Kepada setiap peserta, kami siapkan bantuan Rp 1 juta per ST," ujarnya.

Menurut Arya Tangkas, persyaratan umum lomba ogoh-ogoh tahun ini, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain harus berbentuk bhuta kala, diwajibkan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan tinggi serta lebar ogoh-ogoh maksimal 3 meter.

Dalam lomba ogoh-ogoh tingkat kabupaten yang akan diikuti 3 ogoh-ogoh terbaik dari masing-masing kecamatan atau total 15 ogoh-ogoh saat tawur kesanga atau H-1 Nyepi itu, akan dicari 5 pemenang yang berhak mendapat hadiah berupa sertifikat serta uang. Hadiah juara I Rp 10 juta, juara II Rp 8 juta, juara III Rp 6 juta, serta juara harapan I dan harapan II masing-masing Rp 4 juta. "Hadiah lomba tahun ini, juga meningkat. Kalau tahun sebelumnya juara I hadiahnya Rp 5 juta, sekarang menjadi Rp 10 juta," ucap Tangkas. @



Revitalisasi Pasar Banyuasri Dipastikan Aman

★ Pendanaan *Multiyears* DBH Badung
Sudah Klop Dittransfer

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng memastikan mega proyek revitalisasi Pasar Banyuasri aman dari rasionalisasi. Seluruh anggaran yang sudah terpasang disebut sudah oke. Bahkan 15 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Badung sudah tuntas ditransfer pada anggaran tahun 2019 lalu. Sisa anggaran yang lainnya juga dinyatakan tak ada masalah karena menggunakan anggaran *multiyears*.

Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, Kamis (5/3). Menurut Sekda Suyasa, dampak larangan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang akan berujung pada rasionalisasi anggaran disebut tak akan terjadi pada anggaran revitalisasi Pasar Banyuasri. "Sejauh ini tidak ada hambatan, utamanya dari sisi pendanaan karena menggunakan skema *multiyears*," ungkap mantan Kadisdikpora Buleleng itu.

Dari data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng sumber pendanaan mega proyek senilai Rp 159,5 miliar sudah disiapkan anggaran penuh. Termasuk DBH Kabupaten Badung sebesar Rp 25 miliar untuk revitalisasi Pasar Banyuasri sudah klop ditransfer di tahun anggaran 2019 lalu. Sehingga tahun ini tidak ada transfer dana dari DHB Badung lagi.

Proyek pembangunan revitalisasi Pasar Banyuasri tahun ini akan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng. Selain juga dana Ban-



Proyek revitalisasi Pasar Banyuasri yang dinyatakan aman di tengah potensi rasionalisasi anggaran, dampak larangan pungutan PHR karena virus Corona.

tuang Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali yang saat ini belum ada konfirmasi pembatalan. "Posisi anggaran masih tersedia. Untuk BKK Provinsi Bali tahun 2020, sampai saat ini belum ada konfirmasi bahwa dana tidak akan ditransfer. Karena ini proyek prioritas, tentu diusahakan tidak terkendala dari sisi pendanaan sehingga proyek bisa dilaksanakan tanpa ragu-ragu," imbuh Sekda Suyasa.

Sementara itu seluruh pelaksanaan mega proyek berlantai tiga dengan anggaran ratusan miliar itu ditarget selesai di akhir tahun 2020 mendatang. Hingga saat ini progres pembangunan sudah merangkak diangka 30 persen. Ratusan pekerja dari perusahaan pemenang tender, sedang dalam pendirian tiang pancang.

Sebelumnya diberitakan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri terancam mandeg dengan isu larangan pungutan PHR karena penurunan kunjungan wisata pasca penyebaran virus Corona secara masif di belahan dunia. **k23**

Edisi : Jumat, 6 - 3 - 2020.

Hal : 4



Bulan Dana PMI Buleleng Kumpulkan Lebih Rp 264 Juta

SINGARAJA, NusaBali

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Buleleng berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 264.352.875 selama bulan dana PMI tahun 2020. Dana ratusan juta dari seluruh lapisan masyarakat itu selanjutnya akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepalangmerahan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul itu pun diserahkan langsung secara simbolis oleh Ketua Panitia Ni Made Rousmini kepada Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra yang juga sebagai Ketua PMI Kabupaten Buleleng, Kamis (5/3) di Gedung Unit IV Setda Buleleng.

Menurut Wabup Sutjidra usai serah terima dana bulan PMI, mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh swasta, para pelajar dan mahasiswa serta tokoh masyarakat hingga tingkat desa. Dana sumbangan



Penyerahan Dana Bakti PMI 2020 yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepalangmerahan di Buleleng, oleh Ketua Panitia Ni Made Rousmini kepada Ketua PMI Buleleng, dr I Nyoman Sutjidra, Kamis (5/3).

sukarela dari seluruh element masyarakat ini dipastikan akan dikelola secara profesional sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat kembali diman-

faatkan kepada masyarakat Buleleng. "Kami mengapresiasi sudah banyak yang peduli untuk kegiatan kepalangmerahan. Harapannya ke depan

dapat terus ditingkatkan," ucap Wabup Sutjidra.

Bantuan dana dari masyarakat ini disebutnya sangat berguna untuk menunjang kegiatan kepalangmerahan di lingkup kerja PMI Buleleng dengan bentangan wilayah Buleleng yang sangat luas. Selain itu PMI Buleleng tahun ini juga tengah fokus menyiapkan kegiatan Jumbara V se- Provinsi Bali yang rencananya akan dilaksanakan di Buleleng. Acara akbar itu disebut Sutjidra merupakan acara besar yang memerlukan anggaran yang tak sedikit. Namun dirinya selaku Wabup menyatakan sudah menyiapkan dana hibah Rp 600 juta yang dialokasikan untuk kegiatan itu.

"Kegiatan yang cukup besar ini tentu membutuhkan alokasi dana yang cukup besar pula, semoga dengan adanya dana hibah yang diberikan Pemkab dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Jumbara di Bule-

leng," tambah Sutjidra.

Ditemui di tempat yang sama Ketua Panitia Bulan Dana PMI Buleleng, Made Rousmini menjelaskan jumlah dana yang terkumpul akan dimaksimalkan kembali meskipun ada beberapa sektor di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum optimal sehingga akan lebih ditingkatkan kembali pada bulan dana PMI 2020.

Ia menyadari tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, perolehan dana sebesar itu mungkin akan sulit untuk dikumpulkan. "Kepada masyarakat, semua petugas dan relawan yang telah bekerja mengumpulkan dana kami apresiasi tinggi kerjasamanya yang baik sejauh ini yang mendukung pengumpulan dana bakti PMI, yang akan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan," ucap Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng itu. **k23**

Edisi : Jumat, 6-3-2020

Hal : 4

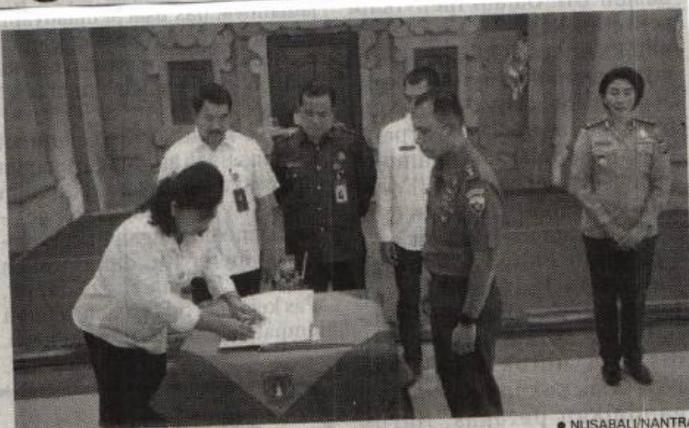


Bupati Mas Sumatri Tandatangan NPHD

AMLAPURA, NusaBali

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) menyongsong Pilkada Karangasem 23 September 2020, di Aula Nawa Satya Kantor Bupati Karangasem Jalan Ngurah Rai Amlapura, Rabu (4/3). Walau anggaran telah tertuang di APBD 2020, tetapi agar bisa sah diamprah, mesti ada naskah perjanjian kedua pihak.

Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri mengatakan, walau PAD (Pendapatan Asli Daerah) Karangasem kecil, tetap bertekad agar mampu menyukseskan jalannya Pilkada Karangasem 2020, berjalan aman dan damai, tanpa riak-riak di masyarakat. Atas dasar itulah mohon dukungan Kapolres AKBP Ni Nyoman Suartini, Dandim Letkol Inf Bima Santosa, dan segenap masyarakat agar sama-sama mendukung kelancaran pesta demokrasi



• NUSABALI/NANTRA

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri (kiri) menandatangani hibah NPHD di Aula Nawa Satya Kantor Bupati Karangasem, Rabu (4/3).

tersebut.

Mulanya akibat kecilnya PAD, katanya, tetap berupaya meningkatkan semangat agar tetap bekerja profesional, menjaga toleransi antar warga yang heterogen. Hanya saja belakangan, PAD yang relatif kecil bahkan dipengaruhi erupsi

Gunung Agung, dan ancaman virus corona.

"Walaupun biaya untuk pelaksanaan Pilkada Karangasem 2020, terbilang kecil, agar tetap berusaha menghasilkan yang terbaik. Kekurangannya, bisa diupayakan di APBD Perubahan 2020," jelas Bupati I

Gusti Ayu Mas Sumatri.

Selain Kapolres dan Dandim, juga hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat I Ketut Kanginan Subandi, Ketua KPUD I Gede Krisna Adi Widana, Ketua Bawaslu I Putu Suastrawan, dan undangan lainnya.

Pj Sekda Karangasem I Gede Darmawa melaporkan, besaran anggaran hibah untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada Karangasem 2020, di mana proses penganggaran hibah telah melalui tahapan pengusulan, pengkajian, pembahasan, terakhir penganggaran di APBD 2020.

Hibah katanya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD. Juga mengacu Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran

APBD 2020, Keputusan Bupati Karangasem Nomor 19/HK/2019 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, Kepolisian Resort Karangasem, Komando Distrik Militer 1623 Karangasem.

Dijabarkan, nominal, dari NPHD itu untuk KPUD Karangasem Rp 26,11 miliar, Polres Karangasem Rp 10,165 miliar, Bawaslu Karangasem Rp 8,96 miliar, dan Kodim Karangasem Rp 3,034 miliar. "Nominal hibah itu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga dana itu berkurang dari NPHD yang telah ditandatangani 1 Oktober 2019," kata Pj Sekda I Gede Darmawa.

Jadi, jelas dia, dengan adanya penandatanganan NPHD, maka anggaran yang tertuang dalam APBD 2020, sah bisa digunakan. @ k16



Mantan Kaling Asih Jadi Tersangka Keenam



WAKAPOLRES Jembrana, Kopol Supriadi Rahman (tengah), saat merilis kasus penetapan tersangka, Tumari, 43, di Mapolres Jembrana, Rabu (4/3)

NEGARA, NusaBali

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Jembrana, kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015. Tersangka kali ini, adalah Tumari, 43, mantan Kelian Lingkungan (Kaling) Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, yang dilimpahkan tahap dua ke Kejari Jembrana, Rabu (4/3).

Tumari ini menjadi tersangka keenam, dalam rentetan kasus korupsi dana santunan kematian dengan melibatkan mantan oknum PNS Jembrana, Indah Suryaningsih, 48, yang sebelumnya tersangka utama. Wakapolres Jembrana, Komol Supriadi Rahman, saat rilis kasus di Mapolres Jembrana, Rabu (4/3), mengatakan, Tumari yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini, juga menjadi terakhir berkejasama dengan dana santunan kematian tahun 2015 lalu. Tumari ini, sebelumnya diketahui mengajukan 32 berkas dana santunan kematian fiktif

melalui kerjasama dengan Indah Suryaningsih, mantan staf di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kesosnakertrans) Jembrana, dan menyebabkan kerugian negara Rp 48 juta.

Dari total Rp 48 juta hasil pencarian dana santunan kematian fiktif itu, sambung Kopol Supriadi Rahman, Tumari mengaku dapat bagian sekitar Rp 17 juta. Sedangkan sisanya, dinikmati Indah Suryaningsih, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka utama, dan telah menjalani hukuman di Rutan Negara. Di mana Indah Suryaningsih sendiri, sebelumnya divonis hukuman 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar pada bulan Agustus 2018. "Untuk tersangka T (Tumari, red) ini tidak kami tahan. Untuk berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap dari Kejaksaan, dan hari ini kami lakukan pelimpahan tahap dua," ujarnya.

Sebelumnya, selain Indah Suryaningsih, ada 2 mantan Kelian Banjar di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, yakni

I Gede Astawa (mantan Kelian Banjar Munduk Ranti) dan I Dewa Ketut Artawan (mantan Kelian Banjar Sari Kuning), serta 2 mantan Kaling di Kelurahan Gilimanuk, I Komang Budiarta (mantan Kaling Jineng Agung), dan Ni Luh Sridani (mantan Kaling Asri), yang ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam rentetan kasus korupsi dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015 ini.

Khusus dua mantan Kelian Banjar di Desa Tukadaya, I Gede Astawa dan I Dewa Ketut Artawan yang menyusul ditetapkan sebagai tersangka susulan setelah Indah Suryaningsih, juga sudah ditetapkan sebagai terpidana yang sama-sama divonis hukuman 4 tahun penjara pada bulan Mei 2018 lalu. Kemudian tersangka selanjutnya, yakni mantan Kaling Jineng Agung, I Komang Budiarta, juga sudah divonis hukuman 1 tahun penjara pada tanggal 24 Februari 2020. Sedangkan tersangka Ni Luh Sridani, yang sudah pelimpahan tahap dua ke Kejakaan Negeri (Kejari) Jembrana, Senin (2/3).

Menurut Kopol Supriadi, pada tahun 2015 lalu itu, diketahui ada sebanyak 2.387 pengajuan dana santunan kematian yang sempat dicairkan melalui Dinas Kesosnakertrans Jembrana dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.580.500.000. Dari 2.387 pengajuan dana santunan kematian itu, 301 diantaranya terungkap fiktif, dengan total kerugian Negara sebesar Rp 451.500.000. Dimana pencarian dana santunan kematian fiktif itu, dilakukan Indah Suryaningsih dengan berkejasama dengan 5 tersangka lainnya yang merupakan 2 mantan Kelian Banjar di Desa Tukadaya, dan 3 mantan Kaling di Kelurahan Gilimanuk. **ode**



Rekanan Proyek

Pasar Didenda Rp 700 Juta

AMLAPURA, NusaBali

Rekanan penggarap proyek Pasar Amlapura Barat, Jalan Kesatrian Amlapura, didenda Rp 700 juta. Sebab pengerjaan proyek molor hingga diperpanjang 50 hari. Mestinya, proyek ini tuntas 27 Desember 2019, namun terpaksa diperpanjang dan selesai Sabtu (15/2).

Perpanjangan pekerjaan 50 hari, sesuai ketentuan pasal 54 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2016. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Karangasem I Wayan Sutrisna memaparkan hal itu saat mendampingi Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri meninjau Pasar Amlapura Barat, di Jalan Kesatrian Amlapura, Rabu (4/3).

Sesuai ketentuan, kata I Wayan Sutrisna, denda per hari Rp 14 juta, selama 50 hari total Rp 700 juta. Sehingga Pasar Amlapura Barat tuntas dibangun berlantai II, untuk memenuhi kebutuhan 330 pedagang termasuk 62 kios.

Ketika dipertanyakan, setelah Pasar Amlapura Barat tuntas dikerjakan, apakah dinyatakan telah kelar pengerjaannya, dan tidak ada masalah secara teknis. "Masih ada bocor-bocor sedikit, kan ada biaya pemeliharaan," kata I Wayan Sutrisna.

Saat melakukan peninjauan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, sempat mengecek keberadaan air dan aliran listrik, juga dipertanyakan menyangkut kebersihan lantai. Lampu belum menyala, karena belum ada sambungan listrik dari PT PLN, begitu juga aliran air belum bisa mengalir, karena untuk mengangkat air perlu ada tenaga listrik. "Bagaimana ini listriknya, dan airnya, kenapa belum bisa diujicoba?" tanya Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri.

Kadisperindag I Wayan Sutrisna menjelaskan, instalasi listrik telah terpasang semuanya lengkap dengan lampu. Hanya saja, belum disambungkan ke PLN. Listrik telah diujicoba



• NUSABALINANTRA

Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri didampingi Kadis Perindag I Wayan Sutrisna mengecek Pasar Amlapura Barat yang tuntas dibangun di Jalan Kesatrian Amlapura, Rabu (4/3).

gunakan genset, sedangkan air agar bisa mengalir mesti digerakkan tenaga listrik. "Pada akhirnya nanti, saat melaspas Pasar Amlapura Barat, Purnama Kasanga, Soma Wage Medangsia, Senin (9/3), telah siap dioperasikan," lanjut I Wayan Sutrisna.

Pasar Amlapura Barat yang lokasinya di barat Terminal Amlapura, tanpa parkir, hanya disediakan jalan lingkar keliling pasar. Parkir direncanakan menggunakan sebagian Terminal Amlapura, dengan menggeser pedagang yang di Terminal Amlapura masuk Pasar Amlapura Barat.

pura Barat.

Proyek senilai Rp 14,054 miliar dikerjakan 180 hari, sejak 26 Juli 2019, mestinya tuntas 27 Desember 2019. Sedangkan tahapan yang selesai hingga 27 Desember 2019, sebesar 85 persen, untuk menuntaskan itulah diperpanjang pengerjaannya 50 hari lagi, yang dikerjakan PT Adi Murti.

Usai upacara melaspas menurut I Wayan Sutrisna berlanjut melakukan undian untuk para pedagang di lantai I dan lantai II, serta mengundi untuk pedagang yang hendak menempati 62 kios.

Hanya saja yang perlu dilakukan sebelum upacara melaspas, lanjut I Wayan Sutrisna, membersihkan lantai, agar tidak berdebu. Hadir pula sejumlah petugas Satpol PP Karangasem menyosialisasikan kepada para pedagang, untuk segera pindah ke Pasar Amlapura Barat, dilarang jualan di Terminal Amlapura. **k16**

Edisi : Kamis 5 Maret 2020

Hal : 8



Pemkab Badung Ngaturang Bhakti Penganyaran di Pura Sad Kahyangan Batukau Tabanan

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung ngaturang bhakti penganyaran serangkaian Karya Agung Pangurip Gumi, Mesaba Agung, Mapaselang, dan Pujawali Agung di Pura Sad Kahyangan Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan, Anggara Kliwon Julungwangi, Selasa (3/3). Rombongan Pemkab Badung dipimpin Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta istri, didampingi Wabup I Ketut Suiasa beserta istri, jajaran DPRD, OPD, dan TP PKK Badung.

Prosesi upacara bhakti penganyaran oleh rombongan Pemkab Badung berjalan hikmat, mulai dari pementasan tari wali Topeng Sidakarya, Rejang Sari yang dibawakan oleh Ny Seniasih Giri Prasta beserta tim TP PKK Kabupaten Badung, maupun puncak upacara penganyaran yang dipuput oleh yajamana karya Ida Pedanda Griya Sandan dan Ida Kubayan Lingsir sebagai pangrajang karya.



BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) menghaturkan punia sebesar Rp 300 juta, diterima Ketua Harian Karya Agung Pangurip Bumi Pura Luhur Batukau, Desa Wongaya Gede, Penebel, Tabanan, I Wayan Arya, Selasa (3/3).

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada krama Tabanan yang dengan tulus ikhlas menggelar upacara Pangurip Bumi di Pura Batukau, untuk nunas karahajengan dan kerahayuan alam semesta. "Karya Pangurip Gumi tidak hanya untuk mendoakan jajat Tabanan dan Bali, tetapi

juga untuk mendoakan NKRI agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa," imbuhnya.

"Kami harapkan dengan melaksanakan upacara bhakti nganyarin secara tulus ikhlas, dapat mewujudkan kedamaian di dunia. Semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan kelimpahan rezeki oleh

Ida Betara yang malinggih di Pura Luhur Batukau," tambahnya

Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha, mengatakan jajaran Pemkab Badung telah mempersiapkan seluruh sarana upacara penganyaran dari Badung. Tidak hanya banten upakara (bebangkit, pulagem-bal, dan caru ayam siki), tapi termasuk juga tari wali dan sekaa gong.

Ketua Harian Karya Pura Batukau I Wayan Arya, mengatakan Karya Agung Pangurip Gumi ini berlangsung sejak 11 November 2019 hingga berakhir 2 April 2020. "Sebenarnya puncak pujawali di Pura Batukau pada Umanis Galungan (20/2). Namun Pemkab Badung mendapat giliran nganyarin pada hari Selasa (3/3)," ujarnya.

Pada upacara nganyarin tersebut Pemkab Badung menghaturkan punia sebesar Rp 300 juta, yang diserahkan oleh Bupati Giri Prasta kepada Ketua Harian Karya Agung Pangurip Gumi I Wayan Arya. @



15 Persen Anggarannya dari PHR Badung Proyek Pasar Banyuasri Terancam Mandeg

SINGARAJA, NusaBali

Pengerjaan mega proyek revitalisasi Pasar Banyuasri yang dikerjakan sejak akhir 2019, terancam mandeg. Karena 15 persen dari total anggaran pembangunan pasar ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DHB PPHR Badung. Di sisi lain, pemerintah akan menyetop pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selama enam bulan, sejak Maret 2020.

Proyek revitalisasi Pasar Banyuasri itu menelan anggaran Rp 159,5 miliar, bersumber dari berbagai sumber anggaran. Sumber utamanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng Rp 109,5 miliar, sisanya didukung dari DBH PHR Badung Rp 25 miliar dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali yang juga Rp 25 miliar.

Potensi terganggunya proyek *multiyears* itu terungkap saat jajaran Pemkab Buleleng berencana merasionalisasi anggaran Rp 70 miliar akibat larangan pungutan PHR, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kekhawatiran

akan potensi proyek mandeg karena kekurangan anggaran itu muncul saat Komisi II DPRD Buleleng melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, Selasa (3/3).

Sidak dipimpin Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa bersama anggota komisi. Komisi ini lain mendapati kecenderungan tersebut. Mangku Budiasa yang didampingi anggota I Wayan Parwa, Made Sudiarta, Luh Sri Sami, Ketut Wirvana, dan I Wayan Indrawan, mengaku tak menyangsikan soal progres pengerjaan fisik bangunan yang saat ini bergerak ke angka 30 persen. Namun yang menjadi kekhawatiran soal rasionalisasi anggaran akibat larangan pungutan PHR di Buleleng diperkirakan mencapai Rp 70 miliar. "Rasionalisasinya cukup besar. Jangan sampai ada kekurangan anggaran yang membuat proyek terhambat. Kami minta dana untuk proyek ini jangan diutak-atik dulu," jelas pentolan kader partai PDIP Kecamatan Sukasada ini.

Mangku Budiasa mengaku akan segera melakukan pendekatan dan komunikasi lebih intens dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, untuk memperhatikan betul sumber pendanaan proyek ini. "Kami tidak ingin sampai ada hutang dengan kontraktor. Ini proyek ikonik dan prestisius di Buleleng," imbuh dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra tak memungkiri jika pendanaan mega proyek revitalisasi Pasar Banyuasri memang didanai dari berbagai sumber. Dia mengaku segera akan melapor kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng terkait proyek dan situasi terkini tentang proyek secara menyeluruh. "Pasti nanti ada langkah strategis yang diambil TAPD dan pimpinan. Kami juga mohon dukungan dari dewan agar sumber anggaran proyek ini bisa aman," jelas Plt Adiptha. **k23**

Edisi : Paba 4 Maret 2020

Hal : 4



Saksi Ungkap Peran Jaya Negara

★ Sidang Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod

"Jadi, modusnya kas bon atau meminjam uang desa untuk membiayai kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan,"

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi APBDes Dauh Puri Kelod dengan terdakwa mantan Bendahara Desa, Ni Putu Ariyaningsih, 33, menyeret nama petinggi di Kota Denpasar. Selain mengungkap peran mantan Perbekel yang kini menjabat anggota DPRD Kota Denpasar, I Gusti Made Wira Namiartha, saksi yang dihadirkan juga menyebut nama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara yang disebut mengetahui awal perkara ini.

Hal ini diungkap salah satu saksi, I Nyoman Mardika yang merupakan salah satu anggota tim yang dibentuk untuk menelusuri masalah APBDes di Desa Dauh Puri Kelod. Dalam keterangannya di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (3/3), dirinya mengetahui adanya masalah ini setelah ada Tim Money dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kota Denpasar. Saat itu ditemukan ada Silpa

APBDes 2017 sekitar Rp 900 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu dibuat tim untuk menelusuri kemana uang yang hilang ini. "Saya salah satu anggota tim," jelasnya.

Nah, dalam salah satu pertemuan inilah, mantan Perbekel Namiartha mengajak tim bertemu Wakil Walikota, Jaya Negara dan anggota dewan Kadek Agus Arya Wibawa. Dalam pertemuan di rumah Jaya Negara tersebut, Jaya Negara sempat menelpon Inspektorat untuk turun melakukan penyelidikan. "Saat itu diminta supaya Inspektorat melakukan investigasi dan menyelesaikan masalah ini secara internal," tegasnya.

Setelah Tim Inspektorat turun, lalu keluar LHP yang harus ditindaklanjuti setelah 60 hari. Namun hingga 60 hari lebih, tidak ada tindak lanjut dari pihak Desa maupun Inspektorat. Sehingga Mardika membuat laporan ke aparat penegak hukum. "Tapi saya tidak melaporkan orang. Saya hanya melaporkan adanya dugaan uang Silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Mardika juga mengungkap jika dirinya sempat didatangi Namiartha ke rumahnya. Saat itu Namiartha menyebut Ariyaningsih ternyata telah memakai uang sebesar Rp 700 juta. Padahal, kepada Mardika sendiri Ariyaningsih waktu itu mengaku memakai uang kisa-

ran Rp 100 juta lebih. "Wira (Namiartha) kemudian meminta agar Ariyaningsih mengaku terus terang memakai uang berapa. Katanya, nanti akan dibantu setelah menjadi anggota dewan," ungkap Mardika.

Ditambahkan Mardika, sebelumnya juga sempat ada pengembalian uang dari terdakwa dan perangkat desa lainnya. Termasuk mantan Perbekel Namiartha yang ikut mengembalikan sekitar Rp 8,5 juta. Mardika juga mengungkap modus pemakaian uang yaitu dengan cara kas bon. "Kegiatan yang tidak ada dalam RAB APBDes dibiayai oleh APBDes. Jadi, modusnya kas bon atau meminjam uang desa untuk membiayai kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan," beber Mardika.

Kesaksian Mardika ini sama dengan keterangan Desak Ketut Istri Mahyuni, mantan Kaur Kesra yang saat ini menjabat Kasi Pelayanan Desa Dauh Puri Klod dan I Putu Wirawan, mantan Kaur keuangan Desa Dauh Puri Klod. Dijelaskan Wirawan, dana Silpa terjadi selama dua periode Namiartha menjadi perbekel. Sejak 2010 disebut sudah ada Silpa, tapi jumlahnya sedikit. Silpa mulai menumpuk pada 2013 dan 2014. Meski terjadi Silpa yang tidak sesuai antara buku dan realita, semuanya diam. Menurut Wirawan, yang punya kewenangan mencairkan dana adalah bendahara dan perbekel.

Sementara saksi Desak mengatakan, terdakwa melakukan kas bon mengajukan kegiatan lebih dulu sementara kegiatan belum ada. Pengajuan kas bon ini tanpa disertai surat permintaan pembayaran. Semua kasbon cair atas persetujuan Namiartha sebagai perbekel. "Setiap kasbon di acc perbekel atau kepala desa dengan tanda tangan di lembar kasbon," terang Desak.

Permintaan kas bon tanpa adanya SPP ini melanggar Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana setiap pencairan dana harus disertai bukti. **rez**



Data Aset Disperindag Amburadul, Dewan Tabanan Geram dan Kecewa

TABANAN, NusaBali

Panitia Khusus (Pansus) VI Bidang Pokja Aset DPRD Tabanan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) setempat, Senin (2/3). Namun Dewan dibuat geram lantaran data aset yang dikelola Disperindag amburadul. Bahkan yang membuat Dewan kecewa, Kepala Disperindag tidak ada di tempat padahal sebelumnya dewan telah bersurat akan berkunjung.

Kunker Pokja Aset ke Disperindag itu dimulai pukul 11.00 Wita atau berlangsung sekitar 40 menit. Rombongan Pansus VI Bidang Pokja Aset yang terdiri dari I Gusti Nyoman Omardani, I Gusti Komang Wastana, I Wayan Eddy Nugraha, I Gusti Ngurah Mayun, Putu Yuni Widyadnyani, dan staf ahli dewan diterima oleh Sekretaris Disperindag I Ketut Suarsana bersama staf. Selain berkunjung ke Disperindag, Pojak VI juga berkunjung ke Terminal Pasar Kediri dan Terminal Pasar Pesiapan untuk melihat aset yang dikelola OPD.

Dari awal kunjungan itu Dewan sudah dibuat kecewa lantaran Kepala Disperindag I Gusti Nyoman Arya Wardana tidak ada. Padahal sebelumnya sudah bersurat. Ditambah

pula saat Dewan bertanya tentang data aset, staf menjawab kebingungan serta data yang diberikan dinilai amburadul. Bahkan mirisnya untuk melakukan pendataan aset dipertanggungjawabkan oleh pegawai kontrak bukan ASN.

"Jadi ini sistemnya masih amburadul. Disperindag masih duduk manis, bagaimana bisa tingkatkan PAD kalau seperti ini. Kita cari data untuk melihat data pasar, pasar senggol yang dikelola. Kadis juga tidak ada padahal sudah bersurat, kalau tidak siap, mundur saja dari jabatan. Malu dilihat rakyat, dewan sudah semangat tahutahunya begini," kata Gusti Ko-

mang Wastana, politisi PDIP.

Padahal dengan kecanggihan teknologi sekarang, kata Gusti Wastana data sebenarnya harus sudah jelas. Mencari jumlah kios dan los di masing-masing pasar seharusnya tinggal klik. "Harusnya semua semangat, jadi kami ingin data yang jelas agar bisa dikordinasikan lagi lebih jelas," imbuh politisi asal Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, ini.

Kekecewaan juga dilonarkan oleh I Wayan Eddy Nugraha. Menurut politisi PDIP asal Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, ini kinerja di Disperindag asal-asalan karena untuk

data saja masih kurang valid. Dengan kondisi ini dia bisa menyimpulkan kinerja di Disperindag tidak pernah dicek/dipantau oleh pimpinan. "Ini menjadi perhatian, dengan kondisi ini saya tahu berarti Anda (staf) tidak pernah dicek oleh pimpinan," tandas Eddy Nugraha.

Selain data yang amburadul, Disperindag juga dinilai tidak ada inovasi. Hanya duduk manis dan memungut potensi yang sudah ada. Padahal ada sejumlah potensi yang ada dan milik aset daerah tetapi belum didata. "Tujuannya kita ingin mencari data, saran, dan persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan aset. Itu saja, tidak ada lain-lain. Ini dilakukan supaya pengelolaan aset benar-benar jelas untuk sekarang dan ke depan. Kalau hanya memungut yang sudah ada, berarti tidak ada inovasi. Meskipun ada pasar atau pasar senggol yang dikelola adat, harus didata," tambah Gusti Nyoman Omardani selaku Koordinator Pokja Aset.

Politisi asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ini juga menilai oknum yang semestinya membidangi terkait tugas masing-masing masih kebingungan. Contohnya di aset

padahal bidang aset sangat krusial. Tetapi yang memegang data adalah tenaga kontrak. Semestinya harus ASN, tenaga kontrak bertugas membantu.

Dengan kondisi itu pihaknya memberi waktu Disperindag mendata selama sepekan. Artinya data valid sudah harus diberikan pada Senin (9/3) mendatang. Karena selama ini Disperindag masih mendata pasar utama saja. Padahal banyak potensi yang menggunakan aset daerah dan faktanya setiap hari ada pasar senggol, dan pasar senggol hanya terdata satu yakni di Jalan Gajah Mada Tabanan.

Sementara itu, di Terminal Pesiapan dan Kediri masih ditemukan beberapa los dan kios ternyata tidak terdata dalam kepemilikan aset potensi pendapatan. Namun yang ada hanya pungen mobil yang rentan dimanipulasi. "Kios di Terminal Pesiapan juga tidak ada perjanjian antara pemda dengan masyarakat. Ada satu yang sudah, tetapi itu perjanjian sewa tanah tahun 1982. Bagaimana bisa kita pungut retribusi kalau tidak ada perjanjian," tandas Omardani, politisi PDIP. des



Rp 1,6 Triliun Melayang, Badung Surati Kemenkeu

★ Tabanan Kehilangan Rp 38 M, Jembrana Cemas Tak Dapat Jatah PHR dari Badung

MANGUPURA, NusaBali
DPRD Badung layangkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, terkait kebijakan pusat stop selama 6 bulan pungutan pajak hotel dan restoran (PHR) sebagai upaya pemulihan pariwisata akibat wabah virus Corona. Intinya, Pemkab Badung minta diberi ruang oleh Kemenkeu untuk konsultasi terkait kebijakan stop pungut

PHR, yang menyebabkan daerah terkaya di Bali ini kehilangan pendapatan Rp 1,6 triliun.
Surat DPRD Badung bernomor 170/848/DPRD yang ditujukan ke Kemenkeu tersebut sudah dilayangkan ke Jakarta, Senin (2/3). Surat tersebut ditandatangani Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. "Surat ke Kemenkeu itu sudah

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Rp 1,6 Triliun Melayang, Badung Surati Kemenkeu

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

kami layangkan ke Jakarta hari ini (kemarin). Kami ingin konsultasi terkait masalah penghentian sementara pungut PHR itu," ujar Putu Parwata saat dikonfirmasi NusaBali, Senin kemarin.

Menurut Parwata, dalam surat yang dilayangkan tersebut, rencananya Pimpinan DPRD Badung akan berangkat konsultasi ke Kemenkeu bersama jajaran eksekutif, dalam hal ini Bupati Badung Nyoman Giri Prasta. Konsultasi ini penting, karena pemberhentian sementara pungutan PHR akan sangat berdampak terhadap program pembangunan di Badung.

"Pendapatan dari PHR kan digunakan untuk pembangunan dan belanja pegawai. Jadi, perlu dipertimbangkan penghentian pungutan PHR di Badung. Bila pendapatan turun, tentu seluruh pembangunan tidak akan jalan, pegawai bisa tak digaji," papar politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara yang juga menjabat Sekretaris DPC PDIP Badung ini.

Paparan senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Badung dari Demokrat, I Made Sunarta. "Kita mohon waktu kepada Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk berkoordinasi dan konsultasi mengenai rencana pemberhentian pungutan PHR, serta insentif bagi Bali," kata Sunarta.

Jika pemerintah pusat tetap menghentikan pungutan PHR selama 6 bulan dan memberikan insentif sebesar Rp 3,3 triliun untuk 10 destinasi

di Indonesia termasuk Bali, tentu akan sangat merugikan Badung. Pasalnya, target pungutan PHR selama 6 bulan di Badung minimal Rp 1,6 triliun. Imbal balik yang akan diperoleh Badung atas kebijakan stop pungut PHR pastinya jauh lebih kecil dari Rp 1,6 triliun.

"Sekarang kalau dilarang pungut PHR, harus ada imbal balik yang seimbang," tegas Sunarta. Imbal balik dimaksud adalah besaran subsidi sesuai dengan target pendapatan PHR selama 6 bulan, yakni Rp 1,6 triliun. "Kalau subsidi yang diberikan pusat lebih kecil, ini akan sangat merugikan kita," tandas Ketua DPC Demokrat Badung ini.

Sementara itu, Pemkab Tabanan juga kelabakan dengan kebijakan pemerintah pusat stop pungut PHR selama 6 bulan. Pasalnya, dengan kebijakan tersebut, Tabanan akan kehilangan pendapatan dari PHR sekitar Rp 38 miliar. Akibatnya lebih jauh, beberapa kegiatan pembangunan akan tertunda.

"Ya, berdasarkan hitung-hitungan, Tabanan akan kehilangan Rp 38 miliar dari PHR," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, secara terpisah di Tabanan, Senin kemarin.

Wiratmaja menyebutkan, pemerintah pusat memang berencana memberikan kompensasi berupa hibah sebesar Rp 3,3 triliun untuk 10 daerah destinasi pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk Bali. Jika dihitung prosentasi, kata

Wiratmaja, Badung dipastikan akan kebagian hibah paling banyak, disusul Gianyar dan Denpasar.

"Sedangkan Tabanan dan 5 kabupaten lainnya di Bali diperkirakan hanya mendapatkan hibah masing-masing Rp 5 miliar. Kalau hanya diberikan Rp 5 miliar, padahal kita kehilangan Rp 38 miliar, ini sangat berdampak dan menjadi beban bagi Tabanan," terang Wiratmaja.

Terkait persoalan tersebut, Pemkab Tabanan berencana menggelar rapat dengan Tim Optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), Selasa (3/3) ini. Menurut Wiratmaja, rapat ini untuk menentukan langkah-langkah mendapatkan peluang pengganti pendapatan PHR yang hilang. "Ini harus kita lakukan. Kalau kita menunggu pusat, iya kalau keluarnya hibah setara. Jika kurang banyak, bagaimana?" tandas Wiratmaja.

Wiratmaja menegaskan, jika Rp 38 miliar dari PHR tak ada penggantinya, maka nantinya akan ada sejumlah kegiatan yang ditunda. "Yang ditunda adalah kegiatan internal yang tidak berpengaruh terhadap masyarakat, seperti perbaikan kantor. Bahkan, kemungkinan juga ada opsi tunda pembayaran proyek, di mana proyek tahun 2020 dibayar pada 2021," jelas Wiratmaja.

Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Pemkab Jembrana terkait kebijakan pusat stop pungut PHR selama 6 bulan. Pemkab Jembrana kha-

watir kuruan penyisihan PHR rutin dari Kabupaten Badung akan dibatalkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana, I Dewa Gde Kusuma Antara, mengatakan sesuai MoU, untuk tahun 2020 ini Jembrana dialokasikan menerima dana PHR dari Badung sebesar Rp 50 miliar. "Sampai saat ini, PHR Badung memang belum turun. Jika kebijakan pusat stop pungutan PHR selama 6 bulan diberlakukan, kami khawatir bantuan PHR Badung itu dibatalkan," keluh Kusuma Antara kepada NusaBali di Negara, Minggu (1/3) lalu.

Menurut Kusuma Antara, alokasi bantuan PHR Badung sebesar Rp 50 miliar itu tergolong cukup besar. Nilainya 10 kali lipat dibanding pendapatan PHR Jembrana yang hanya Rp 5 miliar setahun. "Total PAD Jembrana adalah Rp 141 miliar, sebanyak Rp 5 miliar di antaranya dari PHR," katanya.

Kusuma Antara menyebutkan, alokasi dana PHR dari Badung sebesar Rp 50 miliar itu, rencana pemanfaatannya sudah masuk dalam APBD Jembrana 2020. Pemanfaatannya lebih banyak untuk pembangunan menyangkut pariwisata, serta pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata lainnya. "Kami berharap Badung tetap memberikan PHR sesuai MoU yang telah disepakati," harap Kusuma Antara. asa,des,ode

Edisi : Selasa 3 Maret 2020

Hal : 1-15



Dampak Larangan Pungutan PHR Enam Bulan

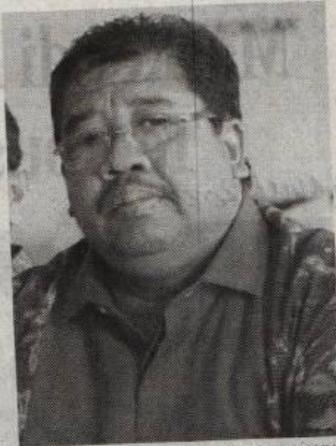
APBD Buleleng Terancam Rasionalisasi Rp 70 M

SINGARAJA, NusaBali

Larangan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diserukan Presiden RI Joko Widodo, akibat sebaran virus Corona (covid-19), beberapa waktu lalu, membuat pemerintah daerah ketar-ketir.

Bali secara umum yang bergantung pada sektor pariwisata akan mengalami dampak utama. Pemkab Buleleng pun terancam akan merasionalisasi APBD 2020 hingga Rp 70 miliar.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana ST, usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda Buleleng, di Lobby Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Senin (2/3), mengatakan dengan larangan pemungutan PHR akan berdampak besar pada anggaran



• NUSABALI/LILIK
BUPATI Buleleng
Putu Agus Suradnyana ST.

yang dikelola tahun ini. Penyebaran virus Corona yang dikabarkan sudah masuk ke Indonesia akan mem-

buat ekonomi dan pariwisata merosot hingga berdampak pada pendapatan daerah. "Pasti ada penurunan target pendapatan. Alternatifnya harus ada program yang dirasionalisasi, harapan kami pekan ini sudah rampung," ucap Bupati Agus Suradnyana.

Kondisi tersebut, menurut Bupati PASS, sejumlah proyek fisik akan ditunda pelaksanaannya. Selain itu, perjalanan dinas di instansi pemerintahan maupun di DPRD juga akan dipangkas. Bupati Agus Suradnyana juga berencana akan bertemu dengan pimpinan DPRD Buleleng dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD Buleleng. Dia juga meminta agar instansi yang berurusan dengan bidang keuangan, segera menyusun

alternatif program-program yang dirasionalisasi. "Jumlah tujuh puluh miliar ini akan banyak yang dirasionalisasi. Karena sendi perekonomian kita terpengaruh semua. Saat ini yang paling penting adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan," imbuh dia.

Ketua DPC PDIP Buleleng ini merinci, penurunan potensi pendapatan dari sektor PHR mencapai Rp 78,09 miliar. Jumlah tersebut terakumulasi dari PHR Buleleng Rp 28,09 miliar dan Dana bagi hasil (DBH) PHR Badung Rp 50 miliar. Saat ini Pemkab Buleleng masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terkait kepastian penerapan larangan pemungutan PHR yang baru disampaikan secara lisan. k23



Mantan Sekertaris PSSI Gianyar Divonis 1,5 Tahun

★ Terbukti Korupsi Anggaran Bupati Cup Rp 150 Juta

DENPASAR, NusaBali

Pasca dituntut 2 tahun, mantan Sekretaris PSSI Gianyar, I Ketut Suasta yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran Bupati Cup akhirnya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (18/3).

Dalam putusan, majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi menyatakan terdakwa Ketut Suasta dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Atas perbuatannya, eks Sekretaris PSSI Gianyar ini dijerat Pasal 3 UU Tipikor.

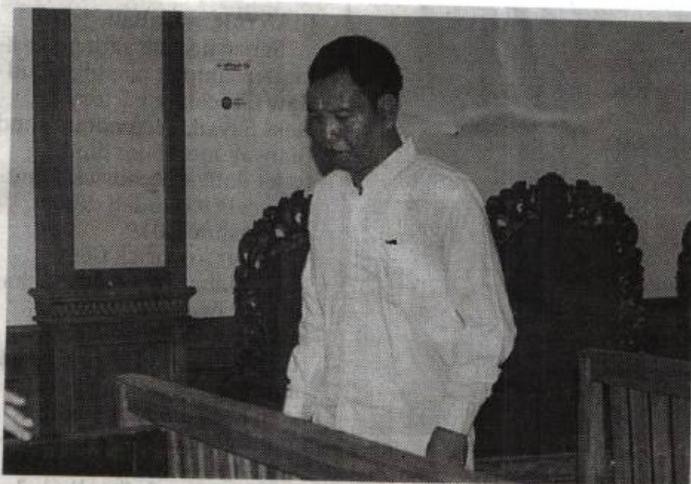
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ketut Suasta dengan pidana penjara selama

satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun, red). Ditambah denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan," tegas majelis hakim.

Dalam pertimbangan memberatkan, terdakwa Suasta tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi. Sementara pertimbangan meringankan terdakwa sopan, kooperatif dan mengakui perbuatannya.

Atas putusan tersebut, Ketut Suasta menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Eddy Setiawan dan Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti yang sebelumnya menuntut hukuman 2 tahun penjara.

Kasus ini berawal saat Piala Bupati Cup 2016 digelar. PSSI



• NUSABALI/YUDA

MANTAN Sekretaris PSSI Gianyar, I Ketut Suasta saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (18/3).

Gianyar kala itu memperoleh hibah Bupati Gianyar sebesar Rp 500 juta. Namun yang di-

gunakan tidak sampai sebesar itu. Saat tersangka menjabat sekretaris PSSI Gianyar, dilaku-

kan pemotongan pada honor atlet yang berlaga. Tidak hanya itu, honor panitia juga banyak dipotong oleh tersangka, sehingga tidak sesuai dengan pertanggung jawaban. Selain itu juga ada penggunaan anggaran untuk tenaga kesehatan fiktif. "Untuk honor atlet, misal seharusnya dapat honor Rp 3 juta, tetapi hanya Rp 2 juta diberikan ke atlet, sementara dalam pertanggung jawaban tetap Rp 3 juta," ungkapny.

"Selisih laporan yang tidak benar atau anggaran fiktif termasuk top score itu berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152.450.000," ujar JPU dalam dakwaan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. rez



Jalan Banjar Kayuaya Dibeton

AMLAPURA, NusaBali

Pemerintah Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Karangasem memperbaiki jalan desa penghubung Banjar Kayuaya menuju Subak Abian Gede Bakalan. Perbaikan rabat beton sepanjang 1.500 meter, lebar 2,5 meter dengan anggaran Rp 334,86 juta. Sistem pekerjaan dilelang.

Perbekel Desa Sukadana, I Gede Suardana, mengatakan dengan anggaran di atas Rp 200 juta

maka pengerjaannya dilelang. Dikatakan, sepanjang jalan di Banjar Kayuaya yang dirabat beton, mobil tidak bisa berpapasan. Salah satu mobil harus ada yang berhenti mencari celah untuk bisa berpapasan. "Ini jalan desa, lebarnya 2,5 meter," jelas Gede Suardana. Sebelum diperbaiki, jalan setapak itu berlubang dan berbatu sehingga hanya bisa dilalui sepeda motor.

Rencananya jalan itu dilebarkan,

namun anggaran terbatas sehingga hanya dibuat 2,5 meter. Harapan ke depan agar jalan itu diambilalih jadi jalan kabupaten sehingga bisa dilebarkan dan dirabat beton atau diaspal. Jika jalan lebar maka warga lebih leluasa melintas. Saat membuka jalan di jalur Banjar Kayuaya, para pemilik lahan telah merelakan lahannya untuk kepentingan bersama. Banjar Kayuaya memiliki penduduk cukup padat 1.286 jiwa. **k16**



Eks Sekretaris PSSI Gianyar Dituntut 2 Tahun

★ Terbukti Korupsi Anggaran Bupati Cup 2016

DENPASAR, NusaBali

Mantan Sekretaris PSSI Gianyar, I Ketut Suasta yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran Bupati Cup dituntut hukuma 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (10/3). Terdakwa juga dituntut pidana tambahan denda Rp 50 juta dan diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp152.450.000.

"Dengan ketentuan jika tidak mampu membayar satu bulan setelah putusan maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," tegas Jaksa Penuntut Umum (JPU), I Made Eddy Setiawan dan Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti.

Dalam tuntutan, terdakwa Ketut Suasta dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Atas



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA mantan Sekretaris PSSI Gianyar, I Ketut Suasta (tengah) saat menunggu sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (10/3).

perbuatannya, eks Sekretaris PSSI Gianyar ini dijerat Pasal 3 UU Tipikor.

Dalam pertimbangan memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi. Sementara pertimbangan meringankan terdakwa sopan, kooperatif

dan mengakui perbuatannya. Atas tuntutan tersebut, terdakwa Ketut Suasta melalui kuasa hukumnya minta waktu untuk menyiapkan pembelaan (pledoi). "Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pledoi dari terdakwa," tutup hakim ketua Esthar Oktavi.

Kasus ini berawal saat

Piala Bupati Cup 2016 digelar. PSSI Gianyar kala itu memperoleh hibah Bupati Gianyar sebesar Rp 500 juta. Namun yang digunakan tidak sampai sebesar itu. Saat tersangka menjabat sekretaris PSSI Gianyar, dilakukan pemotongan pada honor atlet yang berlaga. Tidak hanya itu, honor panitia juga banyak dipotong oleh tersangka, sehingga tidak sesuai dengan pertanggung jawaban. Selain itu juga ada penggunaan anggaran untuk tenaga kesehatan fiktif. "Untuk honor atlet, misal seharusnya dapat honor Rp 3 juta, tetapi hanya Rp 2 juta diberikan ke atlet, sementara dalam pertanggung jawaban tetap Rp 3 juta," ungkapny.

"Selisih laporan yang tidak benar atau anggaran fiktif termasuk top score itu berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152.450.000," ujar JPU dalam dakwaan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. rez



Serahkan LKPD Tepat Waktu

BPK-RI Perwakilan Bali Apresiasi Pemkab Tabanan

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Daerah Bali di Aula Rapat Kantor BPK-RI Perwakilan Bali, Jalan Panjaitan No. 2 Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Kamis (12/3) kemarin. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 itu diserahkan secara langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan diterima langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto. Bupati Eka saat itu didampingi Sekda Kabupaten Tabanan, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Tabanan, Kepala Bapelitbang Tabanan dan Kepala Bakeuda Ta-

banan. Pada kesempatan itu, Bupati Eka mengucap syukur atas ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan ini. Sesuai ketentuan dan peraturan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Laporan Keuangan Pemkab Tabanan itu harus disampaikan kepada pihak BPK. "Pada hari ini kami menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2019. Semua sudah disiapkan dan mohon ini menjadi suatu bahan dasar kita agar dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang baik," ucap Bupati Eka sebelum menyerahkan laporan tersebut.

Tidak lupa saat itu Bupati Eka mengucapkan terima kasih kepada tim dari BPK-RI

Perwakilan Bali, karena sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan di Kabupaten Tabanan. Atas pemeriksaan tersebut, laporan Pemkab Tabanan jadi lebih baik lagi. "Semoga laporan yang kami susun bisa dibantu diperbaiki menjadi lebih benar sesuai aturan yang berlaku. Kami berharap mudah-mudahan memperoleh opini yang baik sebagaimana sebelumnya," harap Bupati Eka.

Ia mengakui mempertahankan hal yang baik itu sangat sulit. Tetapi, Bupati Eka yakin selama tim BPK selalu menyertai di dalam penyusunan laporan serta pihak Pemkab Tabanan selalu berkeinginan terus menjadi lebih baik, maka hal itu pasti terwujud. "Karena yang namanya belajar kita tidak boleh berhenti, melainkan harus terus belajar. Kami harapkan

agar komunikasi, koordinasi dan bimbingan dari tim BPK-RI Perwakilan Bali khususnya, bisa membantu kami di Tabanan," pinta Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati Eka juga meminta kepada pihak BPK agar membantu mencari solusi dalam penanganan pajak dan TPS3R. Bupati Eka juga menginstruksikan kepada jajaran Pemkab yang hadir saat itu agar tahun ini di setiap kecamatan di Tabanan ada TPS3R.

Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tabanan. Apalagi LKPD ini diserahkan secara langsung Bupati Tabanan yang memang diharapkan BPK penyerahan Laporan Keuangan itu paling lama pertengahan Maret 2020. "Sesuai peraturan perundang-



LKPD - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2019 itu diserahkan langsung Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan diterima Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto.

undangan maka BPK akan segera melakukan pemeriksaan lapangan," ucapnya.

Ia menambahkan, sesuai pemeriksaan internal tim BPK sebelumnya, ada beberapa hal koreksi meski-

pun tidak terlalu signifikan. Namun perlu dievaluasi dan diperbaiki. Ia berharap hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti dalam pemeriksaan lapangan nantinya. "Kami berharap bila ada

hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan laporan keuangan itu, maka pemda bisa segera menindaklanjuti sebelum pekerjaan lapangan pemeriksaan berakhir," imbuhnya. (ad347)



Upaya Tingkatkan PAD

Dewan Gencar Data Aset "Tidur" Milik Pemkab

POKJA Aset Pansus VI DPRD Tabanan belakangan ini gencar melakukan pengumpulan data aset. Terutama aset milik Pemkab Tabanan yang belum tergarap maksimal. Upaya ini dilakukan agar aset itu nantinya bisa segera dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jika sebelumnya menyasar aset pasar dan sejumlah terminal, Senin (9/3) kemarin dewan turun melihat aset di areal Pantai Nyanyi, Desa Beraban, seluas 1,55 hektar. Selain itu aset seluas 2,25 hektar di Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri. Bagaimanakah idealnya aset-aset itu dilakukan sebelum disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak lain?

Rombongan Pokja Aset Pansus VI itu dipimpin langsung Ketua Pansus, I Nyoman Arnawa. Turun ke lapangan dengan jajaran Pokja Aset, seperti I Gusti Nyoman Omardani, I Gusti Komang Wasana, I Gusti Ngurah Mayun, dan Putu Yuni Widyadnyani, beserta OPD terkait. Pertama kali rombongan mengecek aset di areal Pantai Nyanyi yang sebelumnya terjadi saling klaim oleh Pemkab Tabanan dan salah satu anggota dewan. Setelah terus berproses, aset seluas 1,55

hektar itu terbukti benar milik pemerintah daerah.

Dari informasi Dinas Pariwisata Tabanan, di lokasi itu kini sudah ada dua pengajuan permohonan pengelolaan aset, yakni dari Desa Adat Beraban untuk dijadikan wahana air. Kemudian permohonan sewa dari perseorangan seluas 10 are yang rencananya dikelola sebagai restoran.

Terkait hal itu, koordinator Pokja Aset Pansus VI Gusti Nyoman Omardani mengatakan, kalangan dewan hanya bisa memberikan

pertimbangan pada OPD terkait agar selalu melakukan kajian dengan baik segala sesuatunya terkait pengelolaan aset milik daerah itu. "Jangan sampai ada intervensi kepentingan. Apakah nanti akan dikerjasamakan atau disewakan. Hal itu harus dikaji matang. Tentunya bisa memberikan kontribusi pendapatan daerah dalam jangka panjang," terangnya.

Di samping juga khusus aset di areal Pantai Nyanyi ini, kata Omardani, keberlangsungan para nelayan yang sudah lama memanfaatkan lokasi ini juga harus diperhatikan. "Mereka (nelayan) banyak yang menyandarkan perahu di lokasi itu. Jadi mereka tetap diberikan akses agar tidak sampai merugikan masyarakat nelayan. Terpenting polanya diatur dengan baik," ucapnya.

Sementara di lokasi kedua yakni aset seluas 2,25 hektar di Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri. Jajaran Pokja Aset juga melihat sama sekali belum ada perencanaan dari awal karena tidak

ada akses jalan masuk ke tanah Pemkab. "Kami minta OPD menyiapkan perencanaan meski tidak ada akses. Terkait aset itu, perlu diketahui apa kelemahan dan kelebihan. Kalau tidak ada perencanaan, bagaimana pengembangan kawasan itu ke depannya," ucapnya.

Di samping itu, OPD terkait diharapkan membuat regulasi atau payung hukum masing-masing tempat wisata. Hal itu penting untuk mengatur keberadaan DTW. Misalnya di Bedugul, Tanah Lot, dan DTW lainnya.

Ketua Pansus VI DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa mengatakan dua bagian Pansus yakni Pokja Aset dan Pendapatan, belakangan ini memang ditugaskan turun mengecek kebenaran aset tersebut. Yang diperiksa adalah luasnya, lokasinya di mana, baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum. "Setelah data terkumpul, barulah penggunaannya dikaji terkait pendapatan. Apakah aset itu layak dikerjasamakan, atau malah

dibangun atau dimanfaatkan agar pendapatan tidak hanya melulu berputar pada hal yang sudah ada. Jadi, aset-aset yang tidur itu dikembangkan lagi," terangnya.

Nyoman Arnawa yang akrab disapa Komet itu menegaskan agar eksekutif selalu

berkoordinasi dengan dewan terkait sewa-menyewa ataupun dilakukan kerja sama pengelolaan aset milik daerah. "Jangan sampai ada intervensi oknum tertentu. Karena yang saya dengar, yang ingin bekerja sama pengelolaan aset di Nyanyi justru oknum

yang sebelumnya mengklaim aset itu milik pribadi. Dalam hal ini, apa pun bentuk kerja sama itu mungkin sewa dilakukan eksekutif, maka harus berkoordinasi dengan dewan. Alasannya, rekomendasi itu asalnya dari dewan," tegasnya. (kmb28)



Dewan Badung Terima LKPJ Bupati 2019

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Senin (9/3) kemarin menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung. Laporan terhadap pelaksanaan APBD 2019, diserahkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya dan diterima langsung Ketua DPRD Badung Dr. Drs. I Putu Parwata, M.K., M.M. didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa, S.H., Sekretaris Dewan Badung I Gusti Agung Made Wardika.

Ditemui usai menerima

LKPJ Bupati, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengapresiasi Bupati dan Pemkab Badung yang sudah tepat waktu menyelesaikan dan menyerahkan LKPJ kepada DPRD. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati atas APBD Badung 2019 ini akan segera dibahas di DPRD. "Kami apresiasi pemerintah daerah telah menyerahkan LKPJ tiga bulan setelah tahun anggaran selesai dan kami akan jadwalkan lebih lanjut untuk pembahasannya," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan pembahasan-pembahasan dengan

detail mengenai program yang telah terlaksanakan sesuai dengan APBD yang telah disepakati. "Pelaporan LKPJ merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi, karenanya kami akan membentuk Pansus (Panitia Khusus - red) apa yang sudah disepakati apa sudah dilaksanakan akan kami bahas," ucapnya.

Dikatakan, pansus akan mengevaluasi setiap program yang telah disepakati secara detail. Hal ini berfungsi mengetahui apakah program yang telah dicanangkan di tahun 2019 telah terealisasi atau belum. "Nanti akan ada ko-

reksi-koreksi, catatan-catatan dan rekomendasi, setelah itu baru dipaparkan dalam sidang," tegasnya. (ad246)

LKPJ - Ketua DPRD Badung Dr. Drs. I Putu Parwata, M.K., M.M. didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa, S.H., Sekretaris Dewan Badung I Gusti Agung Made Wardika menerima LKPJ Bupati 2019 yang diserahkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya, Senin (9/3) kemarin.



Terima Dana Hibah Rp 2,5 Miliar

Polres Bangun Gedung Pelayanan Terpadu

Singaraja (Bali Post) -

Polres Buleleng tahun ini membangun gedung pelayanan terpadu. Ini menyusul disetujuinya permohonan bantuan hibah Pemkab Buleleng yang diajukan tahun 2019 yang lalu. Polres akan menerima kucuran dana hibah dari APBD Buleleng Rp 2,5 miliar. Dengan dana tersebut, gedung pelayanan terpadu dibangun di atas lahan bekas gedung mes perwira polisi di Jalan WR Supratman, persisnya di depan Mako Polsek Kota Singaraja.

Kabag Ops Kompol A.A. Wiranata Kusuma didampingi Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, akhir pekan lalu mengatakan, selama ini Polres Buleleng masih kesulitan lahan. Akibatnya, beberapa unit pelayanannya dilakukan di luar gedung Mapolres Buleleng. Dia mencontohkan, unit pelayanan SIM dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) saat ini dialihkan di areal gedung Mako Polsek Kota Singaraja. Selain itu, lahan parkir kendaraan perwira, anggota dan pengunjung ke mapolres juga masih terbatas, sehingga terpaksa meminjam lahan

parkir di areal Pura Agung Jagat Natha, Singaraja.

Mengatasi masalah itu, Polres kemudian memprogramkan membangun gedung baru. Namun, anggaran belum bisa dipenuhi hingga 100 persen, sehingga tahun lalu pihaknya mengusulkan bantuan hibah kepada pemerintah daerah. Alhasil, tahun ini usulan itu disetujui Rp 2,5 miliar. Dengan dana itu, Polres membangun gedung pelayanan terpadu. Gedung baru ini dibangun di atas lahan bekas mes perwira di depan Mapolsek kota Singaraja dengan luas 2,3 are. Setelah terbangun, maka Polres akan membuka pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), SIM, dan SKCK di gedung terpadu tersebut. "Tahun

ini kita dapat bantuan hibah pemkab, sehingga lahan mes perwira yang sudah tidak ditempati itu kita jadikan gedung pelayanan terpadu. Sekarang proses persiapan lahan dan akan dilelang, sehingga pelaksanaan proyeknya bisa dilakukan pertengahan tahun ini," katanya.

Di sisi lain perwira asal Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng ini mengatakan, pemenuhan unit pelayanan ini dilakukan menyusul pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM di jajaran Polres Buleleng. Dari pengoperasian unit pelayanan yang memadai itu, pelayanan kepolisian di daerah semakin optimal sesuai target kebijakan Polri. (kmb38)





Eksekusi Uang Pengganti Rp 5 Miliar Terganjil

Korupsi Alkes RSUD Mangusada

Masih Sisakan Masalah

KASUS korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Mangusada, Badung masih menyisakan masalah meskipun para terdakwa sudah divonis bersalah. Masalah itu muncul dari terpidana I Made Susila. Dalam amar putusan hakim Pengadilan Tipikor, Susila divonis membayar uang pengganti hingga Rp 5.467.140.000 sebagaimana kerugian keuangan negara yang timbul dalam masalah ini.

Masalahnya adalah kejaksaan selaku eksekutor belum berhasil melakukan eksekusi

uang pengganti tersebut. Padahal, Susila berkeinginan membayar uang kerugian Rp 5.467.140.000, dengan memberikan tiga bidang tanah. Sedangkan hukuman lainnya adalah pidana penjara selama setahun enam bulan (1,5 tahun), denda Rp 100 juta subsider lima bulan kurungan.

Kajari Denpasar pimpinan Luhur Istighfar pun melakukan penelusuran tiga dokumen bidang tanah, sebagai pembayaran uang pengganti tersebut. Pasalnya, ada pihak yang merasa keberatan.

Dikonfirmasi Kamis (5/3) kemarin, Kasiintel Kejari Denpasar Agung Ary Kesuma membenarkan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak terkait. Salah satunya, BPN Denpasar untuk melakukan penelusuran dokumen tiga bidang tanah yang dipakai membayar uang pengganti Rp 5.467.140.000, oleh Susila. Sebelumnya, tiga bidang tanah itu disebut sudah diaudit oleh badan penilai aset dari Kantor Penilai Toto Suharto dan rekan. Dari data itu, sebidang tanah masing-

masing mempunyai nilai likuiditas Rp 3.600.300.000 di Tangerang yang ditandatangani oleh Rija, S.E., MAPPI. Rp 1.200.460.000 di Karanganyar, Jawa Tengah dan Rp 1.100.300.000 di Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah yang juga ditandatangani orang yang sama.

Masalah muncul ketika akan dilakukan eksekusi, dimana Pusat Pemulihan Aset (PPA) mengajukan permohonan perpanjangan pada KJPP Toto Suharto dan rekan. Pada 7 Januari 2020, Toto

malah menyebut bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan penilaian sebagaimana yang disampaikan terpidana Made Susila.

Atas dasar itulah, kata Ary Kesuma, pihaknya bakal melakukan klarifikasi atau mengecek kebenaran atas penilaian ketiga bidang tanah tersebut yang diajukan oleh terpidana Made Susila sebagai pembayaran uang pengganti, yang menurut terpidana dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto dan rekan. (kmb37)



Revitalisasi Pasar Banyuasri Dijamin Tak Terdampak Rasionalisasi

Singaraja (Bali Post) -

Terkoreksinya APBD hingga memicu rasionalisasi besar-besaran sempat dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan megaprojek revitalisasi Pasar Banyuasri. Meski demikian, pemerintah daerah menjamin proyek dengan nilai Rp 186 miliar itu tetap berjalan. Ini karena pelaksanaan megaprojek ini memakai skema anggaran tahun jamak.

Hal itu diungkapkan Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd., Kamis (5/3) kemarin. Suyasa mengatakan, sejauh ini pelaksanaan proyek masih berjalan sesuai perencanaan. Terutama masalah anggaran, pemerintah daerah menjamin tetap dialokasikan dalam dokumen APBD yang sudah disahkan bersama DPRD.

Alokasi anggaran ini berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, BKK dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung dan APBD Buleleng. Khusus untuk BKK PHR Kabupaten Badung telah ditransfer tahun 2019. Sehingga kekhawatiran APBD terkoreksi karena situasi ekonomi menyusul wabah virus Corona memengaruhi pendanaan dari PHR Badung dipastikan tidak terjadi. "Tahun ini tidak ada transfer dari PHR Badung terkait proyek tersebut, sehingga posisi anggaran masih tersedia. Untuk BKK Provinsi Bali tahun 2020, sampai saat ini belum ada konfirmasi bahwa dana tidak akan ditransfer. Karena ini proyek prioritas, tentu diusahakan tidak terkendala dari sisi pendanaan sehingga proyek bisa dilaksanakan tanpa ragu-ragu," katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si. mengatakan, BKK dari PHR Badung sudah ditransfer semua pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 anggaran revitalisasi Pasar Banyuasri khususnya dari APBD Buleleng sudah tersedia. Tinggal menunggu transfer dari BKK Provinsi Bali. "Yang dari BKK Provinsi Bali tahun 2020 belum ditransfer. Untuk BKK PHR Badung sudah kita terima pada tahun 2019," sebutnya.

Walaupun belum ditransfer, katanya, hal ini dipastikan tidak ada masalah karena pembayarannya menggunakan termin penyelesaian. Pendanaan, ataupun pembayaran bisa dilakukan dari sumber yang lain, seperti dari APBD. (kmb38)

Edisi : Jumat 6 Maret 2020

Hal : 10



Pemprov Percepat Realisasi APBD

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali kini mencoba melakukan intervensi untuk mengatasi perekonomian yang terganggu dengan adanya wabah virus Corona atau COVID-19. Yakni dengan melakukan percepatan pelaksanaan APBD tanpa mengubah pos-pos anggaran yang ada.

"Kita sudah mulai. Pengadaan barang dan jasa kita percepat. Kegiatan-kegiatan pemerintahan kita percepat," ujar Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (4/3).

Saat realisasi kegiatan dipercepat, lanjut Dewa Indra, maka uang dalam APBD bisa mengalir ke masyarakat. Hal ini diyakini dapat membantu perekonomian. Sebagai contoh percepatan pengadaan barang dan jasa, berarti ada pembelian bahan di dalamnya.

"Kan menambah aliran uang di masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor swasta kan lagi seret sekarang," jelasnya.

Sementara untuk antisipasi virus corona, menurut Dewa Indra, saat ini secara reguler ditangani oleh masing-masing instansi. Pihaknya berharap tidak ada kasus positif. Kalaupun sampai ada dan membutuhkan pembiayaan, pemerintah daerah sudah memiliki anggaran belanja tidak terduga. Pemprov Bali tahun ini men-

ganggarkan Rp 15 miliar. Anggaran ini tidak dipakai digunakan untuk ditambah jika memang situasi sudah semakin kritis.

"Tapi kami berharap anggaran itu tidak sampai digunakan. Artinya, tidak ada penyakit (COVID-19, red). Sekarang kan baru upaya pencegahan dilaksanakan oleh KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dengan *thermo scanner*, kemudian RS dengan tugas-tugas rutusnya kan sudah berjalan. Dinas Kesehatan berjalan seperti biasa, mereka punya anggarannya," paparnya.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, mengatakan saat ini belum masuk pada tahap *recovery* pariwisata, melainkan masa kuratif. Yakni lebih menunjukkan kepada dunia bagaimana Bali menangani yang baru dicurigai terpapar Corona mulai dari airport hingga kesiapan di rumah sakit.

"Ini menjadi promosi positif kita bahwa Bali sudah sangat siap, dan aturan-aturan, mekanisme-mekanisme itu sudah sesuai dengan apa yang distandarkan WHO," ujar

pria yang akrab disapa Cok Ace ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya mengatakan, Bali telah memiliki sistem mitigasi sesuai standar WHO, yakni RSUP Sanglah dengan 4 ruang isolasi dan ruangan lainnya yang terstandar dengan 18 tempat tidur, RSUD Sanjiwani Gianyar dengan 1 ruang isolasi dan ruangan lainnya yang terstandar dengan 10 tempat tidur, serta RSUD Tabanan dengan 2 ruang isolasi dan ruangan lainnya yang terstandar dengan 7 tempat tidur.

"Kami juga menunjuk RS PTN Unud sebagai tempat isolasi bila terjadi peningkatan kasus," ujarnya.

Suarjaya menambahkan, Bandara Ngurah Rai telah melakukan *screening* di pintu masuk dengan pemantauan kedatangan wisatawan melalui *thermo scanner*. (kmb32)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon (0361) 819448 / 861337032965



Tersangka Keenam Korupsi Santunan Kematian Ditahan

Negara (Bali Post) -

Tersangka kasus Korupsi Santunan Kematian, Tumari (43), dilimpahkan tim penyidik Unit Tipidkor Reskrim Polres Jembrana ke Kejaksaan Negeri Jembrana, Rabu (4/3) siang. Mantan Kepala Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya ini merupakan tersangka keenam yang terlibat kasus korupsi dana santunan kematian 2015 yang dikelola Dinas Sosial Jembrana.

Sebelumnya lima tersangka sudah terlebih dahulu menjalani proses hukum dan 4 di antaranya telah menjalani hukuman. Mereka adalah Indah Suryaningih (PNS Dinas Sosial), Gede Astawa dan I Dewa Ketut Artawan (mantan Klian Dinas di Desa Tukadaya, Melaya) dan I Komang Budiarta (mantan Kaling di Gilimanuk).

Pelimpahan tersangka Tumari ini hampir bersamaan dengan Ni Luh Sridani yang juga mantan kepala lingkungan di Gilimanuk. Modus yang dilakukan tersangka, yakni mengajukan berkas santunan kematian bekerja sama dengan Indah Suryaningih. Berkas-berkas yang diajukan itu tidak pernah diverifikasi dan ada pula yang diajukan secara fiktif dengan cara merekayasa dokumen kelengkapan ber-

kas dan pengajuan berkas untuk satu orang diajukan lebih dari satu kali.

Dari total 2.387 warga Kabupaten Jembrana yang menerima santunan kematian saat itu dari hasil laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali, ditemukan pengajuan fiktif/rekayasa dan yang diajukan lebih dari satu kali/pengajuan yang berulang sebanyak 301 berkas dengan nilai kerugian keseluruhan Rp 451.500.000. Khusus untuk Tumari yang saat itu menjabat Kaling Asih, mengajukan 32 berkas, dengan kerugian negara Rp 48.000.000. "Tumari sudah mengembalikan ke kas daerah sebesar sembilan juta rupiah," ujar Kasat Reskrim AKP Yogie Pramagita.

Selama penyidikan, tersangka belum ditahan dari pihak penyidik.

Saat dilimpahkan ke Kejari Jembrana siang kemarin, berkas dinyatakan telah lengkap dan jaksa langsung menahan tersangka. "Berkas sudah lengkap, tersangka langsung kita tahan. Pertimbangannya kita khawatir melarikan diri," ujar Kasi Pidsus Kejari Jembrana, Ivan Praditya Putra, seizin Kajari Jembrana di sela-sela penahanan. (kmb26)



Ketua LPD Tuwed Tersangka Korupsi

Negara (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tuwed memasuki babak baru. Kejari Jembrana menetapkan satu tersangka yang merupakan oknum pengurus lembaga perkreditan di desa yang berada di Kecamatan Melaya itu. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim jaksa dari Pidsus melakukan pemeriksaan, Selasa (3/3) kemarin.

Kajari Jembrana Pipiet Suryo Priarto W. mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan pidsus, Kejari telah menetapkan satu tersangka. Tersangka ini menjabat Ketua LPD Tuwed, Dewa Putu Astawa.

Tim penyidik juga telah menerima hasil audit pengelolaan keuangan di LPD tersebut dari audit independen. "Kerugian untuk satu tersangka ini mencapai Rp

800 juta," terang Pipiet didampingi Kasi Pidsus Ivan Praditya Putra.

Dari pemeriksaan, modus yang dilakukan tersangka menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi. Salah satu caranya menggunakan dana pinjaman warga ke LPD. Setelah penetapan tersangka ini, tim akan melakukan pemeriksaan tahap selanjutnya dan memanggil saksi-saksi. Tidak menu-

tup kemungkinan ada tersangka lainnya yang nantinya terlibat dalam korupsi dana LPD tersebut. Tim penyidik juga telah mendapatkan audit independen dari tahun 2001 hingga Maret 2019.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya laporan dugaan penyelewengan penggunaan dana di LPD Tuwed, akhir tahun lalu. Diduga ada penyimpangan dalam lembaga keuangan itu

setelah masyarakat yang juga nasabah tidak bisa menarik tabungannya. Dengan alasan tidak ada dana. Selama ini warga hanya dijanjikan tabungan mereka akan dicairkan. Warga khawatir uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pengurus. Lantaran tak berujung dibayar, akhirnya masalah tersebut berkembang hingga masuk laporan ke Intelijen Kejari Jembrana. (kmb26)



PKB Dianggarkan Rp 1,4 Miliar

Bangli (Bali Post) -

Pesta Kesenian Bali (PKB) akan kembali digelar Juni mendatang. Untuk mengikuti *event* tahunan tersebut, Kabupaten Bangli telah menyiapkan belasan sekaa seni. Sedangkan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,4 miliar. Dana itu berasal dari DAU dan BKK Provinsi.

Kabid Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli I Wayan Sudrawan, Selasa (3/3) kemarin mengatakan, sedikitnya ada 16 sekaa seni yang dilibatkan dalam PKB tahun ini. Adapun materi yang akan diisi oleh Bangli di antaranya gong kebyar dewasa, gong kebyar anak, gong kebyar wanita, drama gong, lagu pop, ngelawang, joged bungbung, lomba gender anak dan lainnya.

Persiapan seperti latihan-latihan sudah mulai dilakukan masing-masing sekaa seni yang akan terlibat. Pihaknya dari Disparbud juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek dan memantau persiapan yang sudah berjalan.

Kata Sudrawan, Pemkab Bangli tidak lagi menganggarkan dana dari BKK Kota Denpasar. Alasannya, agar kejadian tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Seperti diketahui, akibat dana PHR Denpasar tak kunjung cair hingga November tahun lalu, seniman dari Bangli yang berpartisipasi dalam PKB terpaksa harus menalangi pentas dengan biaya sendiri. Bahkan mirisnya ada yang sampai harus menjual mobil pribadinya. Saat itu dikatakan Denpasar batal memberikan dana BKK. (kmb40)

Edisi : Rabu 4 Maret 2020

Hal : 9



PHR Distop, Hilang Pendapatan Rp 38 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Keputusan Kementerian Keuangan menghentikan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) selama enam bulan mulai bulan Maret, memberikan implikasi luar biasa. Meski ada rencana pemberian insentif dari pusat dalam bentuk hibah. Tentunya daerah tidak boleh hanya berharap dari kompensasi pusat itu saja. Karena itu, daerah perlu melakukan inovasi menggali potensi dari pendapatan lainnya.

Kepala Bapelitbang Tabanan, I.B. Wiratmaja, mengatakan porsi PHR dalam PAD Tabanan tahun 2020 ini sekitar 8 persen atau sebesar Rp 38 miliar. Dampaknya sangat besar terhadap pembangunan di Tabanan.

Dengan adanya penghentian pemungutan PHR, potensi pendapatan hilang sebesar Rp 38 miliar. Di sisi lain target PAD harus tercapai. Terkait hal itu, tentu harus dilakukan upaya peningkatan potensi pendapatan dari sektor lainnya.

"Insentif hibah pusat segera turun. Kalau besarnya sama dengan potensi pendapatan yang hilang itu, ya... tidak masalah. Tetapi kalau nilainya jauh lebih kecil, tentu harus dicari sumber lainnya. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus berinovasi menggali potensi pendapatan lainnya," sergahnya.

Dengan dana insentif hibah pusat yang hanya Rp 3,3 triliun untuk Bali, jatah Tabanan diperkirakan paling banyak sekitar Rp 5 miliar. Yang banyak Badung dan Denpasar. Sebab, asumsinya memang dibagi secara proporsional. Untuk itu pihaknya bersama tim optimalisasi PAD akan melakukan rapat membahas hal tersebut. "Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh terkait penghentian pemungutan PHR ini," sebutnya.

Akibat penghentian ini, beberapa program mungkin harus ditunda terutama program internal yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Seperti perbaikan gedung kantor. "Terakhir terjadi penundaan pembayaran proyek yang dikerjakan di tahun 2020. Nanti akan dibayarkan di tahun 2021. Itu opsi yang mungkin bisa dilakukan," pungkasnya.

Ketua komisi III DPRD Tabanan, A.A. Nyoman Dharma Putra, juga mengakui keputusan pemerintah pusat memang menjadi pukulan berat bagi Bali, termasuk Tabanan yang sangat mengandalkan dana PHR untuk membiayai pembangunan. Namun, katanya, daerah itu mau tidak mau harus mengikuti instruksi tersebut. "Ya... memang berpengaruh, tapi belum signifikan untuk Tabanan," terangnya.

Potensi pendapatan dari sektor PHR belum terlalu signifikan bila dibandingkan potensi pendapatan sektor lainnya. Tabanan sendiri baru mulai menggarap secara serius PHR. Karena itu, perangkat lunak maupun kerasnya akan segera disiapkan termasuk SDM. Target PAD dari PHR juga masih relatif kecil dengan total Rp 38 miliar. "Selama ini Tabanan belum tergantung dari PHR sendiri. Targetnya pun masih kecil," sebutnya.

Untuk itu, dia mengajak semua *stakeholder* yang ada menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor lain. Seperti BPHTB, PBB, serta lainnya, tanpa mengesampingkan kontribusi PHR itu sendiri. Sejauh ini potensi pendapatan lainnya masih belum sepenuhnya tergarap dengan baik. Dan Tabanan sedang memulai menggarap seluruh potensi pendapatan, agar target pencapaian PAD sebesar Rp 450,405 miliar itu dapat tercapai.

"Harus berani berinovasi, menggali potensi pendapatan dari sektor lainnya. Banyak potensi memang yang belum tergarap secara optimal yang justru masih bisa dimaksimalkan," jelasnya. (kmb28)



Kucuran PHR Distop

APBD Terkoreksi, Program Fisik Terancam Tertunda

Singaraja (Bali Post) -

Kebijakan penghentian kucuran dana bagi hasil (DBH) dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung, membuat waswas jajaran Pemkab Buleleng. Pasalnya, kucuran PHR itu sudah dirancang dalam struktur APBD. Jika memang kucuran PHR distop selama enam bulan pada tahun ini maka APBD Buleleng terkoreksi. Dipastikan program fisik yang sudah dirancang pelaksanaannya ditunda.



Bali Post/kmb38

Putu Agus Suradnyana

Hal itu diungkapkan Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) usai melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Senin (2/3) kemarin. Bupati

mengatakan, Buleleng menggandakan kucuran PHR untuk membiayai beberapa program dan kegiatan fisik. Dalam setiap tahun, daerahnya mendapatkan kucuran PHR dengan nilai bervariasi antara Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar. Dana tersebut dimasukkan dalam struktur APBD yang kemudian dialokasikan untuk merealisasikan program atau kegiatan fisik sesuai Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena dana

ini sudah diprogram maka kalau di tengah perjalanan realisasinya dihentikan, maka dipastikan berdampak sistemik terhadap realisasi program atau kegiatan di daerah. "Kami masih menunggu. Pemkab Badung bersama Pemprov Bali masih lobi ke pusat. Mudah-mudahan ada kabar baik. Tapi kalau tetap distop untuk enam bulan, maka dampaknya APBD terkoreksi dan program atau kegiatan fisik kita tertunda," katanya.

Menurut Bupati, menunggu

kepastian itu pihkanya dalam waktu dekat ini akan menyusun langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melakukan rasionalisasi anggaran dengan besar-besaran. Untuk itu, rasionalisasi ini segera dibahas bersama DPRD Buleleng. Bupati mencontohkan, kalau opsi rasionalisasi harus diambil, maka kebijakan itu akan menyentuh semua lini. Tidak terkecuali dana perjalanan dinas di setiap OPD termasuk di DPRD Buleleng akan disasar. "Ya... terpaksa rasionalisasi besar-besaran karena estimasi saya APBD kita akan terkoreksi sekitar Rp 70 miliar. Ini akan kita bahas dengan dewan dan opsi kita lakukan adalah mengurangi perjalanan dinas dan efisiensi anggaran," tegasnya. (kmb38)



Dewan Badung Putuskan Hibah Rp 5 Miliar di Tahun 2021



HIBAH - Rapat dengan agenda pembahasan e-hibah dan pokok pikiran (pokir) dipimpin langsung oleh Ketua Dewan I Putu Parwata.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung menggelar rapat bersama pihak eksekutif, Senin (2/3) kemarin. Rapat dengan agenda pembahasan e-hibah

dan pokok pikiran (pokir) dipimpin langsung oleh Ketua Dewan I Putu Parwata. Pada rapat tersebut, Putu Parwata memutuskan hibah yang difasilitasi oleh anggota

Dewan sebesar Rp 5 miliar per anggota plus pokir Rp 1 miliar. Keputusan tersebut disambut baik oleh anggota dewan yang hadir dalam rapat. Akan tetapi, pihak eksekutif yang

hadir yakni Kepala bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Badung I Nyoman Sujendra dan Kadis Kominfo IGN Gede Jaya Saputra tak bisa berkomentar banyak. "Yang jelas kami akan laporkan dulu kepada pimpinan hasil rapat hari ini," kata Sujendra dikonfirmasi usai menghadiri rapat.

Selain memutuskan pagu hibah, rapat dewan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta itu juga meminta agar masing-masing anggota dewan diberikan akses untuk meng-input secara langsung daftar hibah yang difasilitasi dalam aplikasi e-hibah. Menurut Parwata, hal itu untuk memudahkan kerja pihak eksekutif. "Mohon berikan akun kepada masing-masing anggota dewan untuk mengakses e-hibah," katanya.

Parwata juga mempertegas, agar akun diamankan oleh pihak Kominfo untuk menghindari kesalahan. "Misalnya kalau pagunya Rp 5 miliar. Jika dipasang hibah melibihi dari itu, sistem secara otomatis *error*. Jadi, tidak bisa lebih dari pagu anggaran," katanya.

Selain itu, rapat itu juga membahas terkait mekanisme pemberian hibah di tahun 2021. Di mana hibah akan diberikan berupa barang. Misalnya untuk pembangunan pura maupun upacara yang dilakukan, semuanya akan diberikan berupa barang, tidak lagi secara gelondongan yang bisa swakelola oleh penerima hibah. Penerima hibah akan menerima berupa barang yang prosesnya dilakukan oleh pemerintah melalui proses tender.

Masalah baru muncul akan

hal itu. Wakil Ketua Dewan, I Made Sunarta, tak sependapat akan hal itu. Ketua DPC Demokrat Badung itu khawatir, penyaluran hibah tidak dapat dilakukan seratus persen. Mengingat dalam proses tender, harga yang ditenderkan sebesar 80 persen. Jumlah tersebut pun akan dipotong pajak. "Itu artinya penerima hibah tidak akan menerima hibah seratus persen," kata Sunarta.

Mekanisme lainnya adalah pura wajib memiliki domisili. Terkait hal itu, anggota Dewan Wayan Sandra pun angkat bicara. "Bagaimana bisa pura wajib memiliki domisili, lagian domisili hanya berlaku enam bulan. Kenapa pura harus ada surat domisili. Pura itu tidak akan pindah-pindah," kata Sandra.

Kabag Kesra I Nyoman Sujendra mengatakan, su-

rat domisili diperlukan atas saran dari BPK. Itu untuk mencegah terjadi kesalahan. Berkaca dari masalah pemberian hibah kepada kelompok tertentu, di mana saat pengajuan hibah berbeda dengan alamat saat menerima hibah. "Makanya penting surat domisili itu. Untuk pura, kami akan koordinasikan apakah mungkin dapat pengecualian," katanya.

Berkenaan dengan pemberian hibah berupa barang, Sujendra mengakui hal itu untuk mempermudah masyarakat penerima hibah. "Menurut BPK, ada ketidakterdayaan penerima hibah mengelola uang. Makanya disarankan kenapa tidak diberikan hibah berupa barang saja. Makanya itu kami akomodasikan," kata mantan Kabag Humas Badung itu. (ad051)



PHR Distop, Pusat Wajib Beri Insentif

PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Keuangan membuat kebijakan yang cukup mengagetkan. Sebab, pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) di sepuluh destinasi wisata utama di Indonesia, termasuk Bali, dihentikan selama enam bulan sejak Maret. Hal itu tentu berdampak pada pendapatan daerah. Ujung-ujungnya pada pembangunan daerah. Pusat pun melalui Kementerian Keuangan ada rencana memberikan insentif untuk mengganti hal tersebut. Bagaimanakah harapan Pemkab Tabanan kepada pihak pusat, terkait dihentikannya pemungutan PHR itu?

Wakil Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya mengatakan sudah tidak bisa diganggu gugat kebijakan pusat menyetop pemungutan PHR. Harapannya ada wisata biaya murah ke Bali. Dengan biaya akomodasi murah, maka wisatawan dari luar Bali diyakini ada gairah berkunjung ke Bali. "Dengan demikian pariwisata Bali diharapkan bisa lebih bergairah," ucap Wabup Sanjaya.

Bagaimanapun penghentian pemungutan PHR itu, kata Komang Gede Sanjaya, memberikan dampak pada penerimaan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, PHR itu menjadi salah satu pendapatan utama Bali, termasuk Tabanan sebagai daerah tujuan wisata.

Dengan dihentikannya pemungutan PHR itu maka jelas pendapatan daerah berkurang relatif besar. Hal itu juga berdampak pada

pembiayaan pembangunan. Selain itu juga janji politik dan janji program termasuk infrastruktur ke masyarakat dipastikan tersendat. "Pemerintah harus memberi insentif pada daerah sebagai pengganti hilangnya masukan dari pungutan PHR," jelasnya.

Terkait hal itu, kata Wabup Sanjaya, informasi yang didapatnya, tim dari provinsi dan kabupaten lain berencana melakukan rapat koordinasi dengan pusat. Saat rapat itu akan dijelaskan mekanisme pemberian insentif untuk daerah, termasuk Tabanan. Diakui, PHR yang ditargetkan Tabanan sebesar Rp 38 miliar dengan rincian Rp 18 miliar dari pajak hotel dan Rp 20 miliar dari pajak restoran. Masukan uang itu sebagai bagian target PAD sebesar Rp 450,405 miliar. "Mudah-mudahan pemerintah pusat memberikan insentif sama dengan target PHR Tabanan," sebutnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana memberikan insentif kepada Bali sebesar Rp 3,3 triliun sebagai pengganti tidak boleh memungut PHR selama enam bulan sejak Maret ini. Kepala Bakeuda Tabanan I Dewa Ayu Sri Budiarti mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan surat terkait hal tersebut. Dikatakan, insentif sebesar Rp 3,3 triliun untuk Bali itu rencananya dibagi secara proporsional sesuai target PHR masing-masing kabupaten/kota di Bali. "Jadi tidak dibagi sama setiap kabupaten/kota," jelasnya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah diminta menyerahkan target PHR dan PAD ke pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian insentif tersebut. Pihaknya juga sudah menyiapkan data tersebut. "Datanya sudah kami kirimkan sesuai yang diminta," pungkas Wabup Dr. Komang Gede Sanjaya. (bit)

Edisi : Senin 2 Maret 2020

Hal : 5



Bupati Suwirta Uji Petik TOSS Center Kinerja Menjadi Lebih Terukur

KOMITMEN Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dalam penanganan sampah melalui program inovasi Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) terus dikembangkan. Bupati Suwirta langsung melakukan uji petik pada semua mesin dan tenaga yang bekerja, Minggu (1/3) kemarin.

Bupati Suwirta yang mahir di bidang aplikasi *microsoft excel* itu langsung merancang sendiri rumus untuk melakukan pengujian itu. Meskipun dalam situasi libur hari Umanis Kuningan, Bupati Suwirta didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra dan seluruh jajaran OPD Pemkab Klungkung tetap bekerja.

Mereka melakukan uji petik peralatan pengolahan sampah di Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center yang dipusatkan di Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan.

Dengan uji petik ini maka pihaknya bisa menghitung berapa sampah yang dihasilkan, berapa alat cacah yang dibutuhkan, berapa alat pelet yang diperlukan dan berapa tenaga efektif yang dibutuhkan. Selama ini Pemkab membeli alat, tetapi tidak yakin berapa per jam bisa menghasilkan cacahan dan pelet itu. Alasannya, karena memang belum pernah melakukan uji petik, sehingga belum tahu kemampuan alat yang dimiliki.

"Hari ini saya siapkan rumus menguji petik itu. Semua alat kita uji coba. Dan hasilnya lumayan bagus," ujar Bupati Suwirta usai menguji semua alat yang ada di TOSS Center.

Pihaknya juga menjelaskan, untuk menghabiskan seluruh sampah yang ada di kabupaten ini, sekarang sudah jelas hitung-hitungannya. Setelah inovasi Gerakan Bersama Puputan Sampah Plastik (Gema Tansaplas) di-*launching*, nantinya masyarakat wajib membuang sampah secara terpilah. Semua desa juga wajib menuntaskan sampahnya di desa masing-masing.

"Saya mengajak semua per-

bekel memperkenalkan alat yang dibutuhkan serta yang baik kualitasnya. Hasil uji petik ini agar disampaikan sehingga optimal dilakukan di desa masing-masing dalam upaya menuntaskan penanganan sampah di desa," tandasnya.

Di samping itu, ia juga mengarahkan kepada tenaga yang bekerja dalam memilah sampah agar tetap menjaga kesehatannya. Caranya, dengan menggunakan masker, selop tangan, sepatu dan baju kerja yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Bupati Suwirta juga menugaskan tim pengawas untuk memantau kinerja di lapangan. (ad017)



Besok, Sidang Dana Silpa APBDes Saksi Pelapor Siap Buka-bukaan

Denpasar (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi dana Silpa APBDes Dauh Puri Kelod dengan terdakwa Ni Putu Ariyaningsih, Selasa (25/2) tertunda karena ketua majelis hakim sakit. Atas kondisi itu, para saksi kembali dipanggil ulang, termasuk saksi pelapor Nyoman Mardika.

"Ya, sidangnya ditunda Selasa lalu. Saya kembali mendapatkan panggilan Selasa, 3 Maret, untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Denpasar," ujar Mardika, Minggu (1/3) kemarin.

Atas pemanggilan itu, Nyoman Mardika yang selalu aktif memantau kasus tersebut mengaku akan siap bongkar-bongkaran dalam persidangan besok. Dia siap buka-bukaan apalagi dia mengaku tahu persis peristiwa yang menyeret bendahara Desa Dauh Puri Kelod sebagai terdakwa. "Siap," kata Mardika semangat.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Denpasar, Agung Ary Kesuma, memastikan bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Artinya ada keterlibatan orang lain. Sehingga dia memastikan dalam waktu dekat akan ada tersangka lain, di samping terdakwa Ni Putu Ariyaningsih. Namun demikian, dia kembali mengatakan bahwa pihaknya juga akan melihat proses persidangan, sehingga akan lebih gamblang dan terbuka siapa yang terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta itu.

Sebelumnya, mantan Kepala Desa Dauh Puri Kelod, I Gusti Made Wira Namiarta, disebut dalam dakwaan kasus korupsi dana Silpa APBDes Dauh Puri Kelod dengan terdakwa Ni Putu Ariyaningsih, Selasa (28/1). Bahkan, JPU I Kadek Wahyudi Ardika dkk., di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Gede Rumega, secara gamblang menjelaskan bahwa terdakwa Ni Putu Ariyaningsih yang merupakan bendahara Desa Dauh Puri Kelod, bersama-sama dengan I Gusti Made Wira Namiarta selaku Kades berdasarkan SK Wali Kota Denpasar, dan saksi Luh Made Cihna Kembar Dewi selaku Sekdes Desa Dauh Puri Kelod dan saksi Putu Wirawan, Kaur Keuangan, diduga melakukan tindak pidana korupsi. Yakni, kata jaksa, tahun 2013 hingga 2017 di Kantor Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, diduga telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, dan atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dalam perkara ini, terdakwa disebut merugikan keuangan negara hingga Rp 988.457.708,85, yang diketahui berdasarkan audit BPKP RI Perwakilan Bali. Masih dalam dakwaan jaksa, disebut terdakwa Ni Putu Ariyaningsih dan I Gusti Made Wira Namiarta, bersama Sekdes dan Kaur Keuangan mengelola sisa keuangan desa secara tidak benar dan tidak berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perwali Denpasar No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diganti dengan Perwali Denpasar No. 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (kmb37)



Lewat APBD Perubahan 2020

Pembayaran Ganti Rugi Lahan "Shortcut" 7-10

Singaraja (Bali Post) -

Pembayaran ganti rugi tanah warga di Desa Wanagiri, Pegayaman, dan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada yang terkena jalur proyek pembangunan jalan baru batas kota Singaraja-Menguwitani atau dikenal dengan istilah *shortcut* titik 7-10 yang ditarget tuntas tahun 2019, tidak mampu direalisasikan. Ini karena keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga pembayaran ganti rugi itu berlanjut ke tahun 2020. Meski demikian, pengerjaan struktur fisik *shortcut* tahap dua ini dipastikan tetap berjalan sesuai perencanaan pemerintah.

Data dikumpulkan di lapangan, Rabu (11/3) kemarin, pembebasan tanah warga di tiga desa itu dialokasikan melalui APBD Bali Tahun 2019. Dari total nilai ganti rugi yang disiapkan sekitar Rp 190 miliar, tahun 2019 yang lalu Dinas PUPR Bali telah membayar dana ganti rugi kepada para pemilik tanah Rp 48 miliar. Sementara sisanya tidak bisa dibayarkan di tahun yang sama, sehingga PUPR Bali baru membayar dana ganti rugi Rp 116 miliar melalui APBD Perubahan Tahun 2020. Selain itu, PUPR Bali juga terpaksa menitipkan dana ganti rugi tanah di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja melalui skema konsinyasi. Ini karena berbagai faktor teknis mulai dari pemilik keberatan dengan nilai ganti

rugi yang sudah dihitung oleh tim appraisal independen dan dokumen kepemilikan tanah yang asli belum bisa dipenuhi oleh pemilik tanah.

Kepala Dinas PUPR Bali Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si. membenarkan pembayaran dana ganti rugi tanah untuk proyek *shortcut* titik 7-10 tidak bisa sepenuhnya dilakukan tahun 2019. Dia mengatakan, kondisi ini tidak bisa dihindari karena batas waktu pelaksanaan pembayaran dana ganti rugi singkat, karena anggarannya dialokasikan pada pertengahan tahun anggaran. Hal ini ditambah lagi tahapan pengitungan nilai ganti rugi dan tahap melengkapi administrasi memerlukan waktu yang lumayan lama. Atas kondisi ini, Astawa Riadi menyebut pembayaran dana ganti rugi akan dilanjutkan dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2020. "Sebetulnya kami ditarget tuntas 100 persen di tahun 2019, namun tidak bisa sepenuhnya dibayarkan karena memang kita waktu pelaksanaan pembebasan lahan *shortcut* ini singkat," katanya.

Ditanya apakah pembayaran dana ganti rugi yang belum tuntas itu menghambat pengerjaan struktur fisik proyek *shortcut*, Astawa Riadi menyebut hal itu dipastikan tidak terjadi. Ini karena Kementerian PUPR melalui BBPJN VIII sudah memulai tahapan lelang struktur

fisik untuk titik *shortcut* 7-8. Saat ini lelang struktur fisik di dua titik *shortcut* itu tinggal menunggu pengumuman pemenang lelang, sehingga pelaksanaan fisiknya dipastikan dilaksanakan ditahun ini. "Untuk lelang di dua titik itu sudah dilakukan, dan lahan sudah siap dan telah dibayar gantiruginya, bisa dilakukan pengerjaan struktur fisiknya, sehingga tidak ada hambatan karena pembayaran ganti rugi yang belum tuntas 100 persen ini," jelasnya.

Demikian juga terkait dampak gangguan ekonomi global akibat pengaruh wabah virus Corona yang bisa saja berujung rasionalisasi anggaran, PUPR Bali sudah mengantisipasi hal tersebut. Bahkan untuk anggaran pembayaran ganti rugi yang diplot dalam APBD Perubahan Tahun 2020 ini sudah disiapkan, sehingga dipastikan tidak menghambat pelaksanaan fisik yang sudah direncanakan oleh Kementerian PUPR Pusat. (kmb38)

I Nyoman Astawa Riadi





Sidang Kasus BPR Suryajaya Ubud Agenda Pemeriksaan Dua Saksi

Gianyar (Bali Post) -

Sidang kasus penggelapan uang miliaran rupiah di BPR Suryajaya Ubud kembali digelar di Pengadilan Negeri Gianyar, Selasa (17/3). Sidang pemeriksaan kasus perbankan dengan terdakwa Ni Wayan Putri Lestari itu, dilanjutkan pemeriksaan dua saksi, Made Arsa selaku mantan *security* BPR Suryajaya Ubud dan Ida Bagus Govinda, *marketing* BPR Suryajaya Ubud.

Sidang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanthi dan didampingi Ni Luh Putu Pratiwi dan Erwin Harnold Palyama yang menggantikan Wawan Edy Prastiyo, sebagai hakim anggota.

Kedua saksi dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian itu mereka pernah melihat terdakwa datang ke kantor Sabtu sekitar November 2016 untuk lembur. Kedua saksi menyatakan terdakwa membawa tas kresek hitam putih keluar dari kantor. Pemeriksaan saksi itu dilakukan secara bergantian.

Namun saat ditanyakan lebih detail oleh kuasa hukum terdakwa, I Wayan Gendo Suardana, terkait pengetahuan mereka terhadap isi tas kresek itu. Kedua saksi mengatakan, tas kresek itu berisi kertas putih. "Setahu saya tas kresek itu berisi kertas putih," jawab Govinda dan diikatkan Made Arsa.

Ketua majelis lantas menanyakan apakah tas kresek itu berisi uang? Made Arsa

menjelaskan, dia hanya melihat kertas berwarna putih saja. Dijelaskan juga kronologisnya. Hari Sabtu itu, kata Arsa, terdakwa datang ke kantor untuk lembur karena perintah atasannya.

Saat itu, kata Arsa, dirinyalah yang membukakan pintu dan mengantar terdakwa masuk ke kantor sampai di depan pintu *teller* itu. Selanjutnya mengantarkan terdakwa keluar dengan tas kresek yang berisi kertas putih itu. "Saya dim-

inta mengantar ke dalam dan menunggu terdakwa karena dia merasa takut," kata Made Arsa.

Jawaban Made Arsa tersebut kontan membuat pihak penasihat hukum terdakwa mencecar balik. "Jika demikian faktanya, artinya terdakwa kan orang yang berniat baik. Datang lembur minta izin saksi. Juga minta diantar saksi ke dalam kantor dan juga ditungguin. Lalu apa dasar kecurigaan saudara?" tanya Gendo. (kmb35)



Kekurangan Anggaran Dana Operasional DLH Hanya Cukup Sampai April

Amlapura (Bali Post) -

Kecilnya anggaran yang diperoleh membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karangasem kelimpungan mencari dana untuk biaya operasional. Sebab, dana yang dimiliki saat ini hanya cukup untuk biaya operasional sampai April mendatang. Kepala DLH I Gede Yudiantara mengungkapkan hal itu, Kamis (12/3) kemarin.

Yudiantara mengatakan, anggaran yang digelontorkan eksekutif memang terbatas. Bahkan, untuk biaya operasional hanya cukup sampai pada April mendatang. Apabila anggaran itu habis maka dikhawatirkan segala bentuk kegiatan di DLH akan macet. "Dana yang dialokasikan hanya mampu memenuhi kebutuhan sampai April. Sementara dana yang dibutuhkan

DLH selama satu tahun sekitar Rp 7 miliar. Dana itu untuk membayar gaji tenaga kontrak," katanya.

Menurut Yudiantara, banyak kegiatan di DLH yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung. Sebab, bantuan BKK Badung memang untuk menunjang pariwisata. Karena peran DLH Karan-

gasem juga dianggap sebagai pendukung atau penunjang peningkatan pariwisata di Bali, sehingga dana PHR diprioritaskan untuk penanganan lingkungan. Hanya, hingga kini belum ada kepastian itu. "Bantuan belum cair lantaran masih menunggu dikeluarkannya SK Bupati Badung. Semoga saja bisa keluar secepatnya," harap pria yang akrab disapa Dodek itu. (kmb41)

Edisi : Jumat, 13 Maret 2020

Hal : 8



Korupsi PNPM Mandiri Pedesaan Ketua UPK Rendang Dituntut Delapan Tahun Penjara

KETUA Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Rendang, Karangasem, terdakwa I Wayan Sukertia (48), Kamis (12/3) kemarin dituntut pidana penjara selama delapan tahun. Selain itu, terdakwa ketiga dalam kasus PNPM ini juga dituntut membayar denda Rp 300 juta, subsider enam bulan kurungan. JPU Putu Gde Suriawan yang sekaligus menjabat Kasipidsus Kejari Karangasem di hadapan majelis hakim pimpinan Angeliky Andayani Day menyatakan I Wayan Sukertia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Lelaki asal Banjar Dinas Singerata, Desa Rendang, Karangasem itu dinyatakan

jaksa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sebelum pada kesimpulan tadi, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, merusak perekonomian negara, berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dalam persidangan.

Atas tuntutan itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya dari Berdikari Law Office pimpinan Gede Pasek Suardika (GPS) itu bakal mengajukan pembelaan atau pledoi dalam sidang berikutnya.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa, Wayan Sukertia yang Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Rendang disebut menyuruh dan mengarahkan Ni Wayan Murniati dan Ni Ketut Wartini dalam membentuk kelompok fiktif untuk mencairkan anggaran PNPM. Negara pun dirugikan dalam kasus ini. Sebagaimana dalam dakwaan jaksa, negara dirugikan hingga Rp 1.963.417.000. (asa)